KERTAS POSISI
Solidaritas Perempuan

MENGUAK
KEKERASAN STRUKTURAL NEGARA DAN KRISIS EKOLOGI
DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN AKAR RUMPUT



Solidaritas Perempuan
--- 2026 ---

Kertas Posisi Solidaritas Perempuan

MENGUAK KEKERASAN STRUKTURAL NEGARA DAN KRISIS EKOLOGI

DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN AKAR RUMPUT

Penulis:
Amelia
Armayanti Sanusi
Fina Falahu Sani
Nia Sudin
Novia Sari
Yuni Warlif

Editor:
Armayanti Sanusi

Layout:
Enday Hidayat

Penanggung Jawab:
Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan

Diterbitkan oleh:
Solidaritas Perempuan
Jl. Jatisari No. 12A, RT.2/RW.7, Jati Padang,
Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan
Telp: (021) 22788677
E-mail: soliper@centrin.net.id
Website: www.solidaritasperempuan.org

Solidaritas Perempuan 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 01

LATAR BELAKANG MENGUAK TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BENCANA EKOLOGIS DAN KETIMPANGAN GENDER 03

CATATAN KRITIS FEMINIS SOLIDARITAS PEREMPUAN: PENGALAMAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT DI TENGAH BENCANA EKOLOGI DAN KEKERASAN STRUKTURAL NEGARA 08

- SP Bungeong Jeumpa Aceh 09
- SP Palembang 13
- SP Sebay Lampung 16
- SP Kinasih 20
- SP Mamut Menteng 23
- SP Flobamoratas 27
- SP Mataram 31
- SP Sumbawa 34
- SP Palu 36
- SP Sintuwu Raya Poso 41
- SP Anging Mammiri 45
- SP Kendari 48

BENCANA EKOLOGI MANIFESTASI DARI KEKUASAAN PATRIARKI 57

MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KORPORASI SEBAGAI AKTOR BENCANA EKOLOGI DI INDONESIA 64

JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA: PERJUANGAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KORPORASI DAN KEADILAN EKOLOGIS 66

AGENDA POLITIK FEMINIS PEREMPUAN AKAR RUMPUT DALAM MENGHADAPI BENCANA EKOLOGI 73

REKOMENDASI 76

DAFTAR PUSTAKA 79



KATA PENGANTAR

Bencana ekologis yang berulang di berbagai wilayah Indonesia memperlihatkan bahwa krisis lingkungan bukan semata-mata persoalan alam, melainkan juga persoalan ketimpangan struktural akibat dari pembangunan ekstraktif, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan yang tidak menjamin keadilan iklim serta keadilan ekologis bagi masyarakat, perempuan dan subjek marginal. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, krisis air, hingga bencana geologis menunjukkan bagaimana kerusakan ekologis dan pembangunan patriarki dapat memperbesar kerentanan masyarakat serta mengancam keberlangsungan ruang hidup perempuan akar rumput.

Bagi Solidaritas Perempuan, bencana perlu dibaca melalui perspektif keadilan gender yang berdampak tidak netral bagi perempuan akar rumput, khususnya perempuan adat, perempuan petani, perempuan nelayan, dan kelompok marginal lainnya yang menghadapi situasi berlapis, seperti menghadapi kehilangan tanah dan sumber penghidupan, terbatasnya akses terhadap pangan dan air bersih, meningkatnya beban kerja perawatan, serta risiko kekerasan berbasis gender. Pada saat yang sama, pengetahuan dan inisiatif perempuan dalam melestarikan lingkungan dan memulihkan kehidupan komunitas tidak diakui. Keterlibatan bermakna perempuan dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan hanya bersifat penanganan, dan pemulihan tidak menjawab formal sehingga ketimpangan kuasa dan bencana terus memproduksi ketimpangan, feminisasi pemiskinan, dan ketidakadilan bagi perempuan akar rumput dan subjek marginal.

Berangkat dari pengalaman 12 komunitas Solidaritas Perempuan dalam menghadapi bencana akibat kerusakan ekologis dan kris iklim yang terus berulang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari perempuan akar rumput. Pengalaman dari Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Jakarta, Palu, dan Poso memperlihatkan berbagai bentuk dampak, mulai dari hilangnya sumber penghidupan dan rusaknya ekosistem hingga persoalan bantuan yang tidak merata, hunian sementara yang tidak aman, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta risiko kekerasan berbasis gender. Pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa kerentanan tidak berhenti ketika bencana berakhir. Ketidakadilan dapat terus berlangsung melalui proses pemulihan yang mengabaikan kebutuhan, hak, dan suara perempuan.

Pengalaman di atas menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar kelompok terdampak atau penerima bantuan. Perempuan merupakan subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kapasitas, dan kepemimpinan dalam menghadapi krisis ekologis. Karena itu, penanggulangan bencana harus melampaui pendekatan yang hanya menghitung kerusakan fisik dan kerugian material. Pemulihan yang adil harus menjamin pemulihan hak dan sumber penghidupan, akses terhadap tanah dan air, perlindungan dari kekerasan, keberlanjutan pengetahuan dan budaya lokal, serta partisipasi bermakna perempuan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Melalui pembacaan kritis feminis, Solidaritas Perempuan mendorong penguatan sistem respons kebencanaan organisasi yang berangkat dari pengalaman komunitas, termasuk pengembangan data terpilah gender, mekanisme keamanan holistik, standar penanganan bencana yang responsif gender, indikator relokasi yang aman bagi perempuan, serta penguatan advokasi untuk menuntut pertanggungjawaban negara dan korporasi. Upaya ini penting agar penanggulangan bencana tidak berhenti

pada penanganan dampak, tetapi juga menyasar akar persoalan yang menyebabkan kerusakan ekologis dan ketimpangan yang terus berulang. Karena bencana tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kemampuan perempuan dan masyarakat untuk terus bertahan dalam situasi krisis. Pengelolaan bencana harus diarahkan perubahan struktural yang menjamin hak, keadilan, keselamatan, dan kedaulatan perempuan atas ruang hidupnya.

Salam Solidaritas,
Jakarta 21 Oktober 2026

Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

LATAR BELAKANG

MENGUAK TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BENCANA EKOLOGIS DAN KETIMPANGAN GENDER

Kondisi geografis Indonesia berada di kawasan pertemuan lempeng tektonik dan Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), dengan iklim tropis yang membuat berbagai wilayah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, geologi, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi geografis tersebut memang menciptakan risiko bencana yang tinggi. Namun, besarnya dampak bencana tidak hanya ditentukan oleh kondisi alam, melainkan juga dipicu pembangunan ekstraktif yang diperparah oleh ketimpangan sistem kebijakan tata kelola lingkungan, sumber daya alam dan krisis iklim serta pengabaian negara untuk melindungi masyarakat.

Akhir November 2025, Indonesia dikejutkan dengan bencana banjir bandang yang menghantam Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, bencana tersebut masih menyisakan duka dan trauma bagi masyarakat. Bencana yang penanganannya masih menyisakan pekerjaan besar bagi bangsa ini. Namun, bencana tidak mengenal kata menunggu untuk bencana lainnya. Berdasarkan data BNPB, sepanjang Januari–September 2026 telah terjadi 1.730 serangkaian *bencana ekologis* seperti kebakaran hutan dan lahan (627 kejadian), banjir (543 kejadian), cuaca ekstrem (324 kejadian), tanah longsor (105 kejadian), kekeringan (101 kejadian), gelombang pasang/abrasi (14 kejadian), gempa bumi (13 kejadian), dan erupsi gunung api (3 kejadian). Namun media Spatial Highlight memberitakan bahwa pada 31 Agustus 2026 telah terjadi erupsi gunung berapi secara bersamaan[1]. Bencana ini telah menghilangkan 397 nyawa, 13 orang hilang, 2.109 orang mengalami luka-luka dan 4,23 juta kehilangan tempat tinggal, mengungsi dan menderita. Selain itu masyarakat harus kehilangan rumah. Sebanyak 111.533 rumah hancur dan 3.458 fasilitas umum hancur yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan dan beribadah. Bencana ekologis ini telah menghantarkan masyarakat khususnya subjek rentan pada penderitaan yang berlapis.[2]

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat keluarga yang kehilangan rumah, perempuan yang kehilangan sumber penghidupan, anak-anak yang terputus akses pendidikannya, kesehatan orang lanjut usia dan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan evakuasi, serta komunitas yang kehilangan ruang hidup dan sosialnya. Pada 2026, karhutla menunjukkan skala kerusakan ekologis sekaligus krisis kesehatan masyarakat. Data BNPB mencatat luas kebakaran kumulatif mencapai 129.899,59 hektare di enam provinsi prioritas hingga 12 Oktober 2026, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kalimantan Barat mencatat luas kebakaran terbesar,yakni 51.124,71 hektare, disusul Kalimantan Tengah seluas 23.304,72 hektare dan Kalimantan Selatan seluas 22.043,32 hektare.[3]

Dampaknya juga tercermin pada kesehatan masyarakat. Hingga 22 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla, termasuk 75.172 kasus pada balita. Wilayah terdampak mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,

1 Permana, A. (2026). 6 gunung berapi di Indonesia erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. Spatial Highlights. https://spatialhighlights.com/news/6-gunung-berapi-di-indonesia-erupsi-secara-bersamaan-pada-31-agustus-2026
2 Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), 2026
3 Evandio, A. (2026). BNPB: Karhutla di Kalimantan hingga 513,89 hektare. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20261013/15/2012121/bnpb-karhutla-di-kalimantan-hingga-51389-hektare

Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.[4] Data ini memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak dapat diukur hanya dari luas hutan dan lahan yang terbakar dan terbakar oleh kejahatan korporasi. Kabut asap, gangguan kesehatan, hilangnya sumber penghidupan, dan meningkatnya beban perawatan keluarga merupakan bagian dari dampak yang harus diperhitungkan dalam penanganan bencana dan pemulihan, terutama bagi perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lingkungan.

Dampak bencana tidak berhenti ketika api padam, air surut, atau aktivitas gunung api mereda. Paparan asap, gangguan kesehatan, hilangnya mata pencaharian, kerusakan lingkungan, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dapat terus dirasakan masyarakat selama masa pemulihan. Bagi perempuan akar rumput, khususnya perempuan petani, masyarakat adat, dan komunitas yang bergantung pada sumber daya alam, kerusakan lingkungan juga berarti hilangnya sumber pangan, pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penanganan bencana harus melampaui respons darurat dengan memastikan pemenuhan hak atas kesehatan, pemulihan penghidupan, perlindungan sosial, dukungan psikososial, serta layanan kesehatan yang responsif gender dan inklusif. Perempuan dan kelompok rentan harus ditempatkan bukan sekadar sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan mengenai penanganan dan pemulihan bencana.

Bencana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam yang datang tanpa keterkaitan dengan tindakan manusia, perlu dibedakan antara bahaya alam dan bencana yang dampaknya diperbesar oleh ketimpangan sosial, kebijakan, dan tata kelola. Gempa bumi dan erupsi gunung api memiliki proses geologinya sendiri. Dalam konteks bencana ekologis, kekerasan struktural terlihat ketika kepentingan investasi dan akumulasi keuntungan lebih diutamakan daripada keselamatan manusia, keberlanjutan lingkungan, serta hak masyarakat atas ruang hidup. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, mengatur penguasaan tanah, menerbitkan izin, dan menentukan arah pembangunan. Ketika kewenangan tersebut justru membuka ruang bagi eksploitasi sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat khususnya perempuan yang menanggung kerusakan lingkungan dan risiko bencana, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pihak-pihak yang memiliki modal dan kekuasaan.

Salah satu kebijakan yang perlu dikritisi adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang ditetapkan pada 2020 dan kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam perspektif gerakan perempuan dan keadilan ekologis, kebijakan yang mempermudah investasi dan pemanfaatan ruang harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan, hak atas tanah, partisipasi masyarakat, serta keberlangsungan hidup perempuan dan komunitas akar rumput.

UU Cipta Kerja dihadirkan untuk memfasilitasi pembangunan ekstraktif yang mendorong ekspansi investasi melalui pembukaan dan alih fungsi hutan serta lahan. Praktik ini mencakup pembabatan hutan untuk perkebunan monokultur, pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) untuk eksploitasi kayu, ekspansi pertambangan, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan investasi. Aktivitas tersebut menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, mengganggu tata air, merusak ekosistem, dan mengurangi kemampuan bentang alam dalam menyerap serta menahan air.

4 Huda, K. (2026). ISPA di 7 provinsi terimbas karhutla tercatat 333.470 kasus. Tirto.id. https://tirto.id/ispa-di-7-provinsi-terimbas-karhutla-tercatat-333470-kasus-hEa4

Kerusakan ekologis ini dapat memperparah risiko banjir dan tanah longsor. Sementara itu, pembakaran dan degradasi lahan menimbulkan pencemaran udara serta melepaskan gas rumah kaca yang semakin memperburuk krisis iklim memicu suhu bumi terus meningkat karena tidak ada lagi hutan yang akan menyerap karbon (CO2) salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global, situasi ini akan meningkatkan permukaan laut karena mencairnya es di kutub yang berpotensi terhadap masifnya krisis iklim dan menenggelamkan 17.000 kepulauan di Indonesia. Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kenaikan muka laut yang berkaitan dengan pemanasan global dapat memperbesar ancaman abrasi, banjir rob, intrusi air asin, dan hilangnya lahan produktif. Dampak tersebut mengancam tempat tinggal, sumber pangan, serta penghidupan masyarakat yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan ekosistem pesisir.

Bencana ekologis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan harus dibaca dalam kaitannya dengan model pembangunan ekstraktif, ketimpangan penguasaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan lemahnya perlindungan ruang hidup masyarakat. Ekspansi pertambangan, perkebunan monokultur, pembalakan hutan, dan alih fungsi lahan untuk kepentingan investasi telah mengubah bentang alam, menghilangkan tutupan vegetasi, mengganggu tata air, serta menurunkan kemampuan ekosistem dalam menyerap dan menahan air. Kerusakan tersebut dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor di wilayah tertentu. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menimbulkan pencemaran udara, meningkatkan risiko gangguan kesehatan, dan melepaskan gas rumah kaca yang memperburuk krisis iklim.

Dalam konteks tersebut, bencana ekologis berkaitan erat dengan pilihan pembangunan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Ketika kepentingan investasi lebih diutamakan daripada perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat, risiko bencana dapat meningkat, sedangkan masyarakat yang bergantung pada tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya menanggung dampak kehilangan ruang hidup serta sumber penghidupannya. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak cukup berfokus pada respons darurat dan penyaluran bantuan. Upaya tersebut harus disertai pencegahan kerusakan ekologis, pengurangan risiko bencana, perlindungan hak masyarakat, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti menyebabkan atau memperparah kerusakan dan kerugian.

Dampak bencana memang dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, tetapi tidak ditanggung secara setara. Bencana tidak pernah netral gender karena ketimpangan relasi kuasa, pembagian kerja berbasis gender, kemiskinan, serta perbedaan akses terhadap informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan mempengaruhi kemampuan setiap orang untuk menghadapi dan memulihkan diri dari bencana. Perempuan akar rumput, khususnya perempuan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam, menghadapi kerentanan berlapis akibat hilangnya sumber penghidupan, terbatasnya akses terhadap bantuan, dan minimnya keterlibatan dalam penentuan kebijakan penanggulangan bencana.

Catatan Komnas Perempuan 2024 menyebutkan bahwa perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender saat bencana, di mana perempuan rentan mendapatkan tindak kekerasan berbasis gender saat bencana. Perempuan akan mengalami kerentanan berlapis seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, ketidaksetaraan saat mengakses bantuan dan kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT)[5]. Sayangnya, dalam penyusunan tanggap bencana belum melibatkan perempuan secara aktif dan bermakna, hanya 20% perempuan yang dilibatkan dalam struktur kebencanaan di tingkat desa[6]. Dalam konstruksi sosial patriarkal, perempuan kerap ditempatkan sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik dan perawatan keluarga. Ketika bencana terjadi, perempuan tidak hanya menghadapi risiko terhadap keselamatan dan kesehatannya sendiri, tetapi juga harus memastikan kebutuhan anak, lansia, penyandang disabilitas, dan anggota keluarga lainnya tetap terpenuhi. Hilangnya rumah, lahan pertanian, sumber pangan, dan pendapatan memperberat beban tersebut. Dalam situasi pascabencana, perempuan juga harus berupaya memulihkan ekonomi keluarga sekaligus menjalankan pekerjaan perawatan yang sering kali tidak diakui dan tidak memperoleh dukungan memadai.

Kerentanan perempuan semakin besar ketika sistem peringatan dini, evakuasi, tempat pengungsian, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), layanan kesehatan, dan distribusi bantuan tidak dirancang secara terpilah, responsif gender, dan inklusif. Keterbatasan penerangan, sanitasi yang tidak layak, minimnya privasi, serta tidak tersedianya mekanisme pengaduan dan perlindungan yang aman dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Perempuan dan anak juga dapat menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan dan layanan kesehatan, sementara kondisi darurat dapat memperburuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perlindungan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas harus menjadi bagian integral dari seluruh tahapan penanggulangan bencana, bukan sekadar tambahan dalam respons kemanusiaan.

Pentingnya perlindungan tersebut telah diakui melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana. Namun, perlindungan yang efektif tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan layanan. Perempuan juga harus dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam mengidentifikasi risiko, menyusun rencana kesiapsiagaan, menentukan mekanisme evakuasi, merancang distribusi bantuan, serta mengawasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelibatan ini harus memberikan ruang bagi perempuan untuk mempengaruhi keputusan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif atau menghadirkan perwakilan tanpa kewenangan.

Pemenuhan hak masyarakat terdampak merupakan tanggung jawab negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Undang-undang tersebut juga mengakui hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari bencana, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta hak-hak lain yang diatur di dalamnya. Secara khusus, Pasal 26 ayat (1) huruf e mengakui hak atas ganti kerugian bagi orang yang terkena bencana akibat kegagalan konstruksi. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 mengatur pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan setelah bencana terjadi. Negara berkewajiban memperkuat pencegahan dan mitigasi, memastikan

5 Berdasarkan Catatan Komnas Perempuan tahun 2018, setidaknya 12 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tenda pengungsian korban gempa Palu pada tahun 2019.
6 Laporan BNPB 2022

kesiapsiagaan masyarakat, melindungi kelompok yang menghadapi risiko lebih besar, memenuhi kebutuhan dasar korban, serta mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan demikian, penanggulangan bencana ekologis dan krisis iklim harus ditempatkan dalam kerangka keadilan ekologis dan keadilan gender. Upaya ini menuntut perubahan dari pendekatan yang semata-mata reaktif menuju pencegahan risiko, perlindungan ruang hidup, pemulihan lingkungan, pemenuhan hak korban, dan penguatan kepemimpinan komunitas. Negara harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak mengorbankan keselamatan dan penghidupan masyarakat, serta bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian tidak dibebaskan dari kewajibannya.

Penanggulangan bencana yang berkeadilan harus menempatkan perempuan akar rumput sebagai subjek yang memiliki hak, pengetahuan, dan kepemimpinan. Partisipasi perempuan harus dijamin dalam seluruh tahapan pengelolaan bencana, disertai akses terhadap perlindungan, sumber daya, dan pemulihan yang setara. Pada saat yang sama, negara harus memperkuat pencegahan kerusakan ekologis, memastikan pertanggungjawaban atas dampak pembangunan, dan menjamin pemulihan yang tidak mereproduksi ketimpangan. Dengan demikian, membangun ketangguhan masyarakat bukan sekadar mengembalikan kehidupan ke kondisi sebelum bencana, melainkan memastikan kehidupan yang lebih aman, adil, berdaulat, dan berkelanjutan bagi perempuan dan seluruh masyarakat terdampak.

CATATAN KRITIS FEMINIS SOLIDARITAS PEREMPUAN: PENGALAMAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT DI TENGAH BENCANA EKOLOGI DAN KEKERASAN STRUKTURAL NEGARA

World Risk Report 2023 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara yang paling rawan terhadap bencana setelah Filipina. Sayangnya, resiko tinggi ini tidak dibarengi kapasitas kesiapsiagaan yang memadai. Hal ini terlihat dengan dampak yang cukup besar saat bencana terjadi. Indonesia perlu mengubah paradigma dari tanggap bencana menjadi kesiapsiagaan aktif. Prof. Djati Mardianto[7] menyampaikan bahwa penyediaan anggaran untuk mitigasi bencana lebih kecil dari anggaran darurat bencana. Padahal, mitigasi akan mengurangi dampak bencana. Oleh sebab itu, kapasitas kesiapsiagaan masyarakat harus diperkuat agar dampaknya juga kecil, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Persoalan semakin mendalam ketika kapasitas pembiayaan penanggulangan bencana belum sebanding dengan kebutuhan pemulihan di lapangan. Kementerian Keuangan pada September 2026 menyebut alokasi Dana Siap Pakai dan Dana Cadangan Bencana sekitar 5,25 triliun per tahun, sementara kebutuhan pemulihan pasca bencana rata-rata mencapai 22 triliun.[8] Perbandingan tersebut menunjukkan kesenjangan nominal sekitar 16,75 triliun, meskipun cakupan kedua angka tidak sepenuhnya sama. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya pembiayaan bencana yang lebih memadai, terencana, dan berkelanjutan.

Namun, persoalan tidak berhenti pada besarnya anggaran yang tersedia. Masyarakat juga perlu mengetahui berapa dana yang benar-benar dicairkan, berapa keluarga yang menerima bantuan, berapa nilai bantuan per keluarga, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bantuan diterima. Sebagai contoh, dalam penanganan gempa Flores pada 2026, BNPB menetapkan bantuan perbaikan rumah sebesar 15 juta untuk kerusakan ringan dan 30 juta untuk kerusakan sedang, sementara keluarga dengan rumah rusak berat memperoleh pilihan hunian sementara atau Dana Tunggu Hunian sebesar 600 ribu.[9] Contoh ini memperlihatkan bahwa bantuan memiliki kategori dan tujuan tertentu sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai rata-rata bantuan bagi seluruh masyarakat terdampak.

Di sinilah persoalan prioritas anggaran publik menjadi penting. Kebutuhan pemulihan pasca bencana yang besar menuntut pemerintah memastikan bahwa anggaran pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan benar-benar memadai. Pada saat yang sama, pemerintah menjalankan program berskala besar, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang memicu potensi pada ketimpangan fiskal bagi program prioritas dan berkelanjutan. keseluruhan kebijakan fiskal harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat, terutama ketika menghadapi keadaan darurat.

Namun, negara tidak dapat mengukur keberhasilan penanganan bencana hanya dari besarnya anggaran yang diumumkan atau frekuensi pejabat mendatangi lokasi terdampak. Kehadiran negara harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat: bantuan yang tiba tepat waktu, tempat pengungsian yang

7 Guru besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM
8 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Pooling fund bencana untuk ketahanan fiskal. Kemenkeu https://fiskal.kemenkeu.go.id/parb/2026/09/21/pooling-fund-bencana-untuk-ketahanan-fiskal/
9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026, August 18). BNPB siapkan dukungan perbaikan rumah warga terdampak gempabumi M 7,7 Flores. BNPB. https://bnpb.go.id/index.php/berita/bnpb-siapkan-dukungan-perbaikan-rumah-warga-terdampak-gempabumi-m-77-flores

layak, layanan kesehatan dan sanitasi yang memadai, perlindungan dari kekerasan, serta kepastian pemulihan rumah dan sumber penghidupan. Sebab, dalam situasi bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan kepedulian, tetapi juga pemenuhan hak dan jaminan perlindungan yang konkret. Ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi dan masyarakat justru harus bertahan dengan mengandalkan solidaritas antar sesama, persoalannya bukan lagi semata-mata keterbatasan sumber daya, melainkan mencerminkan dinormalisasikannya ketidakhadiran negara. Gotong royong merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Solidaritas antarmasyarakat semestinya memperkuat kerja-kerja kemanusiaan, bukan menjadi pengganti kewajiban negara dalam menjamin keselamatan, perlindungan, dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.

Di tengah berbagai kerentanan tersebut, perempuan akar rumput bukan sekadar korban atau penerima bantuan. Mereka memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, jaringan solidaritas, dan kapasitas untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam situasi darurat, perempuan mengorganisasikan bantuan, mengelola dapur umum, dan memastikan kebutuhan dasar keluarga serta komunitas terpenuhi. Dalam proses pemulihan, perempuan mengembangkan inisiatif ekonomi berbasis potensi lokal, membangun usaha kolektif, menjaga keberlanjutan pangan, dan memperkuat solidaritas antar komunitas. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan aktor penting dalam membangun ketangguhan masyarakat. Pengakuan terhadap peran dan kepemimpinan perempuan harus diikuti dengan dukungan nyata berupa akses terhadap informasi kebencanaan, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan, sumber daya pemulihan, perlindungan sosial, layanan kesehatan, serta ruang pengambilan keputusan. Pendekatan penanggulangan bencana yang berkeadilan gender harus memastikan bahwa perempuan tidak terus-menerus dibebani tanggung jawab pemulihan tanpa dukungan negara, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk menentukan arah pemulihan sesuai kebutuhan dan pengetahuan komunitasnya.

SP Bungeong Jeumpa Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatra, berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman di sebelah utara, Samudra Indonesia di sebelah selatan dan barat, serta Provinsi Sumatra Utara di sebelah timur. Aceh memiliki luas wilayah sekitar 56.839,09 km² dan terdiri dari 23 kabupaten/kota serta 363 pulau. Wilayahnya memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan pesisir dan dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan Bukit Barisan. Sekitar 68% wilayah Aceh merupakan kawasan berbukit hingga bergunung, sementara wilayah datar dan landai banyak ditemukan di sepanjang pesisir utara, timur, barat, dan selatan. Keberagaman bentang alam tersebut membentuk ruang hidup masyarakat yang bergantung pada sawah, kebun, hutan, sungai, dan wilayah pesisir sebagai sumber pangan serta penghidupan sehari-hari. Namun, kerusakan hutan, pembukaan perkebunan dalam skala besar, dan perubahan fungsi kawasan ekologis semakin meningkatkan

kerentanan masyarakat terhadap banjir, longsor, kekeringan, serta bencana ekologis lainnya.



(Kondisi Desa Bale Panah, Kecamatan Juli, Aceh (2025).
***Sumber**:* SP Bungeong Jeumpa Aceh)

Bencana banjir bandang yang melanda Pulau Sumatra bagian utara, khususnya Aceh pada November 2025 telah berlalu sepuluh bulan. Bencana tersebut tidak dapat dipandang sebagai bencana alam semata. Hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Senyar memang menjadi pemicu, tetapi besarnya kerusakan juga tidak terlepas dari deforestasi yang terus berlangsung. Data Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera menunjukkan bahwa deforestasi pada 2025 melonjak sebesar 426% di Aceh.[10] Dalam skala yang lebih luas, data WALHI menunjukkan sekitar 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dibuka sepanjang 2016–2025 untuk berbagai kepentingan, baik itu proyek pemerintah maupun korporasi, termasuk perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, proyek energi, dan lainnya.[11] Hilangnya tutupan hutan membuat kemampuan kawasan dalam menyerap dan menahan air semakin berkurang sehingga hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi banjir dan longsor. Oleh karena itu, bencana yang dialami masyarakat Aceh merupakan bagian dari krisis ekologis yang diperparah oleh deforestasi yang terus-menerus dilakukan untuk kepentingan segelintir kelompok, sementara masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak harus menanggung kehilangan rumah, lahan, sumber penghidupan, dan keselamatan mereka.

> *"Gob yang koh kayee pakon kami yang rasa susah?" ("Orang yang menebang pohon, kenapa kami yang merasakan susahnya?")* - **Perempuan di Desa Bale Panah, Aceh**

10 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2026). Pidato yang menghapus korban: Prabowo memamerkan capaian, Aceh-Sumatera dihilangkan dari ingatan negara. YLBHI https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pidato-yang-menghapus-korban-prabowo-memamerkan-capaian-aceh-sumatera-dihilangkan-dari-ingatan-negara/
11 Styawan, W. E. (2026). Bencana ekologis sebagai krisis capitalogenic: Membaca dari Sumatra. WALHI. https://www.walhi.or.id/bencana-ekologis-sebagai-krisis-capitalogenic-membaca-dari-sumatra

Hingga kini, pemulihan pascabencana belum juga tuntas. Aceh sama sekali belum pulih seperti yang diklaim oleh pemerintah. Data bencana Aceh-Sumatra mencatat sedikitnya 1.207 orang meninggal dunia, 137 orang masih hilang, dan 54 kabupaten/kota terdampak.[12] Ribuan keluarga kehilangan rumah, penghidupan, sekolah, layanan kesehatan, jalan, jembatan, sawah, kebun, dan rasa aman. Situasi di Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang terdampak sangat parah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mencatat sebanyak 75 ribu rumah hancur. Dari 287 ribu orang yang terdampak, 101 di antaranya meninggal dunia dan 1.396 orang masih berada di pengungsian yang tersebar di 13 titik.[13] Di wilayah lain, pemulihan infrastruktur juga masih berjalan lambat. Jalan masih banyak yang rusak, jaringan internet masih terganggu, sementara sekolah dan fasilitas kesehatan yang mulai dibersihkan belum sepenuhnya dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.



(Kondisi Aceh Tamiang dan Bener Meriah pascabencana (2026).
Sumber: SP Bungeong Jeumpa Aceh)

Sepuluh bulan pasca banjir, masyarakat masih hidup dalam penuh ketakutan akan adanya bencana berulang. Hujan yang turun selama dua malam saja sudah membuat masyarakat panik dan kembali bersiap mengungsi karena trauma dari banjir sebelumnya belum hilang. Di Aceh Utara, banjir masih terjadi setiap kali hujan turun, sementara banjir rob akibat air laut pasang juga sempat menggenangi hunian sementara (huntara) penyintas banjir. Selain itu, lumpur juga terus menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Rumah yang sudah dibersihkan kembali dimasuki lumpur karena tumpukan lumpur di luar rumah masih lebih tinggi daripada posisi rumah. Lumpur yang mengeras membuat proses pembersihan sangat sulit dan harus dilakukan sedikit demi sedikit, sementara ketika hujan kembali turun, masyarakat kembali menghadapi kondisi yang sama. Situasi ini membuat penyintas belum memiliki ruang yang aman untuk memulihkan kehidupan mereka, terlebih sebagian masyarakat masih bergantung pada bantuan kebutuhan pokok karena belum dapat bekerja dan belum memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

12 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Geoportal Data Bencana Indonesia: Banjir dan longsor Sumatera 2025 [Peta interaktif]. BNPB. https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/
13 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. (n.d.). Cek data bencana Aceh Tamiang. https://cekdatabencana.acehtamiangkab.go.id/



(Huntara di Bener Meriah (2026). ***Sumber***: SP Bungeong Jeumpa Aceh)

Kondisi hunian sementara (huntara) juga belum memberikan rasa aman, terutama bagi perempuan. Per 6 Mei 2026, huntara yang telah rampung dibangun sebanyak 17.315 unit atau 93% dari target 18.579.[14] Huntara yang disediakan pemerintah dibangun seperti permukiman komunal. Rumah-rumah berdiri berdekatan dengan jarak yang sempit. Di dalam huntara, tidak terdapat sekat antar keluarga sehingga perempuan tidak memiliki ruang privat yang memadai. Fasilitas MCK juga sangat terbatas karena digunakan bersama oleh banyak keluarga. Di Kampung Lubuk Sidup misalnya, satu unit toilet berukuran 1,5×2 meter disediakan untuk setiap 4 keluarga.[15] Di ruangan sempit itu, mereka mandi, mencuci pakaian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi perempuan, situasi ini menyulitkan ketika membutuhkan ruang privasi untuk menjaga kebersihan tubuh saat menstruasi, memandikan bayi, atau sekadar merawat diri. Selain itu, huntara yang hampir seluruhnya telah dibangun justru banyak yang belum layak dihuni karena dibangun rendah di wilayah yang masih rawan banjir, padahal masyarakat membutuhkan bangunan yang tahan akan genangan. Banjir rob bahkan sempat menggenangi huntara penyintas, sementara dalam kejadian angin kencang sebelumnya terdapat huntara yang sampai terangkat dan terbawa angin. Selain itu, kebutuhan air bersih juga masih menjadi persoalan mendesak karena banyak sumur yang rusak dan tertimbun lumpur. Pembersihan sumur belum selesai di seluruh wilayah, sementara pasokan air bersih masih terbatas dan masyarakat harus mengandalkan tangki air serta pembangunan sumur bor yang berasal dari bantuan dan donasi.

Pemulihan kehidupan masyarakat juga berjalan sangat lambat karena sebagian besar masyarakat belum dapat kembali bekerja. Mayoritas masyarakat yang dahulu merupakan petani sawah dan petani ladang, kini mereka belum dapat kembali mengelola lahan karena sawah rusak dan batas-batas lahan hilang sehingga diperlukan pencetakan sawah baru sebelum dapat ditanami kembali. Masyarakat juga belum dapat kembali mengelola ladang dan kehilangan sumber penghidupannya. Kondisi ini semakin berat karena pertanian di Aceh pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehingga kerusakan sawah dan ancaman kekeringan secara langsung mengancam ketersediaan pangan. Hal ini tentu akan berdampak kepada perempuan karena ia lah yang menjadi pihak untuk memastikan pangan tersedia di meja untuk keluarga. Selain itu, bantuan untuk pemulihan usaha

14 Indonesiago.id. (2026). 19.169 unit huntara sudah dibangun untuk warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per 6 Mei 2026. Instagram. https://www.instagram.com/p/DYPCmOnEzdv/
15 Ramadhani, M. Y. (2026). Penyintas banjir Aceh Tamiang menghuni atap panas, menjaga harta yang tersisa. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/penyintas-banjir-aceh-tamiang-menghuni-atap-panas-menjaga-harta-yang-tersisa/

juga belum merata, termasuk bagi pelaku UMKM yang mayoritas merupakan perempuan.

Pemulihan pascabencana di Aceh masih menghadapi persoalan karena kebutuhan penyintas belum sepenuhnya menjadi dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan huntara dan perbaikan infrastruktur belum cukup untuk memastikan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman, terutama ketika kebutuhan air bersih, penghidupan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman masih belum terpenuhi. Perempuan juga menghadapi kebutuhan yang lebih spesifik, seperti sanitasi, privasi, serta dukungan untuk memulihkan sumber penghidupan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Maka, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam menentukan bentuk pemulihan sesuai dengan yang mereka butuhkan karena setiap penyintas memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan pemulihan perlu dilihat dari sejauh mana penyintas dapat kembali menjalani kehidupan yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

SP Palembang

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatra yang memiliki luas wilayah mencapai 88.671,68 km² dan terdiri dari 13 kabupaten serta 4 kota. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sumatra Selatan pada 2025 mencapai sekitar 8,92 juta jiwa.[16] Wilayah Sumatra Selatan memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran rendah, kawasan rawa, hutan, lahan gambut, hingga wilayah perkebunan yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

Sebagian wilayah Sumatra Selatan memiliki ekosistem gambut yang mudah terbakar ketika mengalami kekeringan. Kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut juga ada di wilayah pengorganisasian Solidaritas Perempuan Palembang. Perempuan di wilayah tersebut bekerja sebagai buruh tani dan menggantungkan penghidupannya pada lahan pertanian maupun perkebunan. Namun, penguasaan lahan oleh perusahaan dan praktik pengelolaan yang tidak memperhatikan keselamatan ekologis telah meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terus berulang setiap tahunnya.



Kebakaran di lahan perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis (2026). **Sumber:** SP Palembang

Karhutla di Sumatra Selatan telah menjadi bencana yang berulang, setidaknya sejak 2015, 2018, 2023 hingga 2026. Hingga 23 Agustus 2026, karhutla tercatat mencapai 1.926 hektare dengan 1.520 kejadian. Berdasarkan analisis data hotspot WALHI Sumatra Selatan pada 1–21 Agustus 2026, terdapat sedikitnya 1.091 hotspot di wilayah konsesi perusahaan, yang

16 Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs https://sumsel.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/6e08ccf1b88eba0383051826/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2025.html

terdiri dari 524 hotspot pada 17 perusahaan PBPH atau HTI dan 567 hotspot pada 47 perusahaan perkebunan.[17] Tujuh perusahaan dengan jumlah hotspot yang tercatat adalah sebagai berikut:

1. PT Sentosa Bahagia Bersama sebanyak 133 hotspot
2. PT Musi Hutan Persada sebanyak 104 hotspot
3. PT Bumi Pratama Usaha Jaya sebanyak 100 hotspot
4. PT Paramitra Mulia Langgeng sebanyak 91 hotspot
5. PT Golden Blossom Sumatera sebanyak 67 hotspot
6. PTPN VII Cinta Manis sebanyak 59 hotspot
7. PT Segula Energi Sawit sebanyak 59 hotspot



(Kabut asap menyelimuti Kota Palembang 2026.
Sumber: SP Palembang dan WALHI Sumsel)

Karhutla yang terus berulang telah memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. WALHI Sumsel bersama Solidaritas Perempuan Palembang mencatat bahwa 259.297 jiwa telah menjadi korban Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA akibat paparan asap karhutla. Kabut asap juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan perempuan.

> *"Bagi kami juga perempuan, terutama saya yang lagi hamil, (situasi) ini sangat menyiksa. Setiap sore sekitar pukul tiga sore aja (langit) sudah gelap. Mata pedih dan sesak nafas. Dan kemudian, ini kan cuaca panas. Jadi kalau kami menghidupkan kipas angin, yang ada bukan angin segar yang kami dapatkan, tapi rasa pedih, rasa sesak yang mendalam. Ini sangat tidak enak. Keluar harus memakai masker, tapi masker juga belum sepenuhnya mampu untuk menghalangi kami kena ISPA." - Perempuan di Desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir,* ***Sumatera Selatan***

17 Solidaritas Perempuan. (2026). 259–297 warga jadi korban ISPA, karhutla berulang di konsesi bukti lemahnya tata kelola dan pengawasan korporasi. Solidaritas Perempuan https://solidaritasperempuan.org/259-297-warga-jadi-korban-ispa-karhutla-berulang-di-konsesi-bukti-lemahnya-tata-kelola-dan-pengawasan-korporasi/

Di wilayah pengorganisasian Solidaritas Perempuan Palembang, sebagian perempuan bekerja sebagai buruh tani dan mengalami dampak langsung ketika lahan tempat mereka bekerja terbakar. Bahkan, kebakaran pada 2026 telah menyambar dan merusak kebun milik perempuan di sekitar kawasan perkebunan, termasuk wilayah yang beririsan dengan PTPN VII Cinta Manis.

> *"Hampir setiap hari kebun kami, terutama yang dekat sekali dengan perusahaan tebu, pasti bakal ditunggu atau dijaga oleh pemilik kebun karena sangat rentan terjadinya kebakaran. Kami selalu ditakuti dengan mata pencarian kami hilang karena adanya kebakaran ini. Kami tidak tahu sumber api dari mana. Yang pastinya kalau kami sendiri pemilik kebun tidak mungkin dengan sengaja membakar kebun kami. Jangan salahkan kami sebagai petani karena kami tidak mungkin membakar mata pencaharian kami sendiri."- **Perempuan di Desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan***

Dampak karhutla semakin berat dirasakan oleh perempuan karena mereka tetap memikul tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga di tengah kondisi udara yang memburuk. Asap pekat dan bunga asap atau langas mengotori rumah, pakaian, serta sumber air bersih domestik sehingga perempuan harus melakukan pekerjaan tambahan untuk membersihkan rumah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan akibat asap, perempuan juga menjadi pihak yang banyak melakukan perawatan. Pada saat yang sama, kabut asap membatasi ruang gerak perempuan untuk bekerja dan mencari sumber penghasilan. Selain itu, kondisi karhutla juga mengancam keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sumber penghidupan mereka.

> *"Rumah kami tidak pernah bersih, banyak debu-debu bekas pembakaran yang terbang ke rumah kami." - **Perempuan di Desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan***

Karhutla yang terjadi berulang menunjukkan bahwa penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah belum menyentuh akar persoalan pada tata kelola lahan dan praktik produksi perusahaan. Salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian adalah PTPN VII Cinta Manis yang pada 2026 tercatat memiliki 59 hotspot. Perusahaan tersebut sebelumnya pernah mengalami penyegelan oleh Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan terkait kebakaran lahan, tetapi hasil penyegelan dan tindak lanjutnya belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Bagi Solidaritas Perempuan Palembang, penyegelan setelah kebakaran terjadi tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan pencegahan apabila praktik yang memicu kebakaran masih terus berulang. Pemerintah perlu memastikan adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap kewajiban perusahaan, pengawasan wilayah konsesi, serta pemulihan lingkungan dan hak masyarakat yang terdampak.

Selain karhutla, banjir juga menjadi bencana yang terus berulang di Kota Palembang. Hingga April 2026, tercatat 17 peristiwa banjir dengan genangan yang berulang di sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan R. Soekamto, Jalan RA Rozak, dan Jalan Kolonel H. Burlian. Kondisi ini menunjukkan semakin seringnya banjir terjadi dengan intensitas yang lebih besar.

Penyusutan sungai di Palembang yang kini hanya tersisa sekitar 114 sungai aktif, serta luas rawa yang diperkirakan tinggal 691 hektare atau berkurang hampir 30%, turut mempersempit ruang resapan air.[18] Banjir yang semakin sering dan semakin tinggi mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat, menyebabkan kendaraan dan barang terendam, kemacetan, hingga membuat sebagian masyarakat harus mengungsi dari rumahnya. Dampaknya juga dapat berujung pada hilangnya nyawa, seperti yang terjadi pada 25 Desember 2021 ketika seorang perempuan berusia sekitar 40–50 tahun terseret arus deras dari gorong-gorong yang meluap di kawasan Kenten Permai, Kalidoni, saat hendak pergi ke pasar dengan sepeda motor, dan kemudian ditemukan meninggal dunia sekitar 20 meter dari lokasi kejadian.[19] Banjir yang semakin sering dan intens di Palembang semakin memperbesar kerentanan masyarakat, terutama perempuan karena berdampak langsung pada keselamatan, mobilitas, dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

SP Sebay Lampung

Provinsi Lampung terletak di bagian paling selatan Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Selatan serta Bengkulu di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah timur, Selat Sunda di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Wilayah Lampung memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Kawasan pegunungan tersebut membentuk daerah tangkapan air yang penting bagi kehidupan masyarakat, sementara wilayah pesisir dan dataran rendah menjadi ruang hidup bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan, serta pekerja di sektor informal. Namun, perubahan fungsi lahan, penggundulan hutan, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, dan ekspansi perkebunan skala besar telah mengurangi fungsi ekologis berbagai kawasan di Lampung. Kerusakan tersebut semakin memperbesar risiko bencana yang dihadapi masyarakat, mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering dirasakan masyarakat, terutama di Kota Bandar Lampung. Pada bulan April lalu, tepatnya pada 14 April 2026, hujan deras sejak sore hingga malam menyebabkan banjir di hampir seluruh kecamatan di Bandar Lampung, dengan ketinggian air mencapai lutut hingga dada orang dewasa dan menggenangi ratusan rumah masyarakat.[20] Banjir juga terjadi di Kecamatan Sukarame yang tidak berada langsung di sekitar sungai, menunjukkan bahwa persoalan banjir berkaitan erat dengan buruknya sistem drainase, berkurangnya daerah resapan, dan hilangnya tutupan hutan di wilayah tangkapan air. Air banjir surut dalam waktu yang lama sehingga genangan di jalan mengganggu mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Genangan air tersebut menyebabkan kemacetan parah, sejumlah kendaraan terjebak dan mogok, sementara rumah masyarakat terendam dan perabotan mengalami kerusakan.[21] Banjir rob juga terus berulang di wilayah pengorganisasian Cungkeng, sementara masyarakat di wilayah kaki Bukit Barisan, khususnya Lampung Barat, menghadapi ancaman longsor akibat penggundulan hutan yang dilakukan oleh negara. Masyarakat berharap pemerintah mengambil tindakan nyata agar banjir yang berulang setiap kali hujan deras tidak terus terjadi. Sejak 2025,

18 Ariana, N. (2026). Palembang dilanda 17 banjir berulang hingga April 2026. RRI.co.id. https://rri.co.id/palembang/regional/2358016/palembang-dilanda-17-banjir-berulang-hingga-april-2026
19 Syahbana, P. (2021). Wanita hilang terseret banjir di Palembang ditemukan tewas. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-5870326/wanita-hilang-terseret-banjir-di-palembang-ditemukan-tewas
20 Saputra, T. (2026). Bandar Lampung kembali dikepung banjir, aktivitas warga terganggu. DetikSumbagsel. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8444473/bandar-lampung-kembali-dikepung-banjir-aktivitas-warga-terganggu
21 ibid

Solidaritas Perempuan Sebay Lampung telah melakukan dorongan kepada pemerintah kota untuk mencari solusi bersama atas persoalan banjir, tetapi tuntutan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

Dampak bencana ekologis di Lampung dirasakan secara berlapis oleh perempuan dan anak-anak. Ketika banjir terjadi, perempuan dan anak-anak mengalami trauma serta harus bersiap mengemasi barang-barang dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi setiap kali hujan deras turun. Di tengah situasi tersebut, respons pemerintah cenderung bersifat pragmatis, seperti pembagian makanan dan sosialisasi mengenai cara menghadapi banjir, tanpa menyelesaikan persoalan tata ruang, kerusakan daerah aliran sungai, hilangnya daerah resapan, dan penggundulan hutan. Banjir yang terus berulang sejak 2023 menunjukkan bahwa masyarakat masih dibiarkan menghadapi risiko yang sama tanpa pemulihan ekologis dan perlindungan yang memadai. Perempuan kembali menanggung beban tambahan karena harus menjaga keselamatan keluarga, memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi, dan menghadapi ancaman kehilangan harta benda maupun tempat tinggal.

Selain bencana banjir, masyarakat Lampung juga menghadapi kemarau yang semakin panjang dan sulit diprediksi. Perubahan pola musim membuat masyarakat tidak lagi dapat mengandalkan pengetahuan mengenai waktu datangnya hujan dan kemarau seperti sebelumnya. Di satu waktu, hujan deras dapat memicu banjir, sementara pada periode berikutnya kemarau panjang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dampak kekeringan paling terasa bagi perempuan karena mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, memasak, mencuci, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga lainnya. Ketika sumber air semakin berkurang, perempuan harus mencari air dari tempat yang lebih jauh atau mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah memperbesar beban kerja perempuan sekaligus mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi berulang di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan catatan Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, kebakaran terjadi pada 2023, 2025, dan 2026, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang. Pada Agustus 2026 lalu, kebakaran melanda kawasan Resort Kuala Penet, tepatnya di wilayah Jati 3, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Kuala Penet, Kecamatan Braja Selebah.[22] Hingga 22 Agustus 2026, sekitar 673,4 hektar kawasan TNWK telah terbakar.[23] Kebakaran tersebut terjadi di kawasan yang memiliki ekosistem savana, rawa, dan lahan basah yang selama ini menjadi sumber air serta pakan bagi satwa liar. Kebakaran berulang di Way Kambas menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan hanya disebabkan karena musim kemarau dan kondisi lahan, namun di dalamnya juga terdapat aktivitas manusia dan keberadaan perusahaan yang berbatasan dengan kawasan konservasi.

22 Saputra, T. (2026). Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas seluas 673 hektare, belum padam. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8630380/kebakaran-di-taman-nasional-way-kambas-seluas-673-hektare-belum-padam
23 Indriawati, T. (2026). Way Kambas kebakaran, bagaimana nasib gajah dan siapa yang diduga membakar?. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/08/22/185654678/way-kambas-kebakaran-bagaimana-nasib-gajah-dan-siapa-yang-diduga-membakar



(Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas (2026). ***Sumber:*** DetikNews)

Di sekitar kawasan Way Kambas terdapat sejumlah perusahaan, antara lain PT Gunung Madu, PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indolampung Perkasa, PT Sugar Labinta, dan pimpinan Pabrik Gula PTPN 7 Bunga Mayang.[24] Kedekatan kawasan perusahaan dengan wilayah konservasi dan lahan pertanian masyarakat menimbulkan dugaan keterlibatan mereka menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Balai TNWK menyebut adanya kemungkinan bahwa kebakaran sengaja dipicu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk dugaan keterlibatan pemburu liar, tetapi dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan.[25] Oleh karena itu, penyebab karhutla tidak seharusnya disederhanakan hanya sebagai akibat El Nino atau musim kemarau, tetapi perlu juga ditelusuri terkait kondisi tata kelola kawasan, pengawasan aktivitas di sekitar taman nasional, serta kemungkinan adanya aktivitas perusahaan yang memperbesar risiko kebakaran.



(Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas (2026). ***Sumber:*** AntaraNews)

Karhutla di Way Kambas memberikan dampak langsung terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi serta lahan

24 Ini Lampung. (2026). Pemprov Lampung gelar rakor siaga karhutla: Undang 6 perusahaan besar. https://www.inilampung.com/2026/08/pemprov-lampung-gelar-rakor-siaga.html
25 Saputra, T. (2026). Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas seluas 673 hektare, belum padam. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8630380/kebakaran-di-taman-nasional-way-kambas-seluas-673-hektare-belum-padam

pertanian. Asap kebakaran menyebabkan gangguan kesehatan berupa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk, sesak nafas, dan iritasi mata. Paparan asap juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, terutama pada kelompok rentan.[26] Anak-anak, lansia, dan ibu hamil disebut sebagai kelompok paling rentan, bahkan paparan pada ibu hamil juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan janin. Suhu panas yang meningkat juga dapat menyebabkan dehidrasi, sementara serpihan asap dan sisa pembakaran berpotensi mengotori sumber air bersih yang digunakan masyarakat. Hal ini menambah beban kerja perawatan yang dilakukan perempuan karena perempuan merupakan pihak yang selalu memastikan adanya air bersih untuk keluarga.

Karhutla ini tidak berdampak secara langsung pada satwa liar seperti gajah dan badak Sumatera. Namun, dampaknya dapat mengancam potensi kerusakan rantai makanan dan habitat yang dilindungi serta satwa juga berpotensi keluar kawasan jika kebakaran terus berulang.[27] Sebelum kebakaran terjadi, kawasan savana, rawa, dan lahan basah di Way Kambas berfungsi sebagai sumber air dan pakan bagi satwa liar. Ketika ekosistem tersebut terbakar dan mengalami kerusakan, masyarakat semakin khawatir terhadap perubahan pergerakan satwa, terutama gajah, yang dapat keluar dari kawasan konservasi ke pemukiman untuk mencari makanan dan air. Kekhawatiran masyarakat terhadap konflik antara manusia dan satwa semakin besar karena kawasan Way Kambas berada tidak terlalu jauh dari pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Gajah yang keluar dari wilayah konservasi berpotensi memasuki pekarangan, kebun, dan ladang masyarakat sehingga merusak tanaman serta mengancam keselamatan penduduk. Kekhawatiran tersebut bukan hanya ketakutan imajiner belaka, namun berdasarkan pengalaman nyata yang pernah terjadi. Pada 31 Desember 2025 lalu, Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, Lampung, Darusman tewas terinjak saat berupaya menghalau kawanan gajah liar yang memasuki perkebunan warga di perbatasan kawasan Taman Nasional Way Kambas.[28] Oleh karena itu, kebakaran di kawasan TNWK ini tidak dapat dinilai hanya sebagai kerusakan tutupan lahan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan satwa yang kehilangan habitat serta sumber pangan alaminya.

Kerusakan ekosistem tersebut pada akhirnya juga berdampak pada kehidupan sehari-hari perempuan yang bergantung pada ketersediaan air, pangan, dan sumber daya alam di sekitarnya.

1. Hilangnya sumber air dan pangan: Kekeringan, kebakaran, dan kerusakan kawasan hutan mengurangi ketersediaan air serta sumber pangan yang digunakan masyarakat. Perempuan yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga harus menghadapi kesulitan memperoleh air dan bahan pangan ketika lingkungan mengalami kerusakan.
2. Terputusnya pengetahuan ekologis perempuan: Perubahan musim yang semakin sulit diprediksi membuat pengetahuan masyarakat mengenai pola hujan, kemarau, waktu tanam, dan pengelolaan sumber daya alam semakin sulit diterapkan. Pengetahuan yang diwariskan antargenerasi terancam

26 Paino, C. (2026). Asap karhutla tak kenal batas administratif, bikin manusia dan satwa liar menderita. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/09/15/asap-karhutla-tak-kenal-batas-administratif-bikin-manusia-dan-satwa-liar-menderita/
27Shafa, C. A. (2026). Dari Kalimantan hingga Taman Nasional Way Kambas: Mengapa karhutla terus mengancam hutan Indonesia?. Jurnalposmedia. https://jurnalposmedia.com/dari-kalimantan-hingga-taman-nasional-way-kambas-mengapa-karhutla-terus-mengancam-hutan-indonesia/
28 Oktavia, V. (2025). Kepala Desa di Lampung Timur Tewas Saat Halau Gajah Liar. Kompas.com. https://www.kompas.id/artikel/kepala-desa-di-lampung-timur-tewas-saat-menghalau-gajah-liar

kehilangan ruang praktik karena hutan, lahan pertanian, dan sumber air terus mengalami perubahan.

3. Meningkatnya beban kerja perempuan: Ketika sumber air semakin jauh dan sumber pangan mengalami kerusakan, perempuan harus mencurahkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beban tersebut semakin berat ketika bencana menyebabkan perempuan kehilangan pendapatan, mengalami gangguan kesehatan, dan harus merawat anggota keluarga yang terdampak.
4. Terancamnya keselamatan masyarakat dan satwa: Kerusakan habitat akibat kebakaran dapat mendorong satwa liar keluar dari kawasan konservasi dan memasuki permukiman atau lahan pertanian. Situasi ini menempatkan perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam risiko konflik dengan satwa, sementara satwa juga kehilangan ruang hidup serta sumber makanan alaminya.

SP Kinasih

Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 3.185,80 km². Secara fisiografis, wilayah Yogyakarta memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan Gunung Api Merapi di bagian utara, Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu di Gunungkidul, Pegunungan Kulon Progo, hingga dataran rendah yang membentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Kawasan Gunung Api Merapi yang meliputi Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Bantul merupakan kawasan vulkanik yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, sementara Pegunungan Selatan di Gunungkidul merupakan kawasan perbukitan batu gamping yang dikenal memiliki keterbatasan air. Struktur batu gamping (karst) tersebut meloloskan air hujan langsung ke dalam rongga dan sungai bawah tanah sehingga sulit ditampung di permukaan.[29] Di wilayah tersebut, tanah tidak pernah membiarkan air hujan menggenang lama. Air hanya mengalir di perut bumi dan bias ditemukan dengan menuruni lorong-lorong gua.[30] Pegunungan Kulon Progo juga memiliki topografi berbukit dengan lereng yang cukup curam dan potensi air tanah yang kecil. Bentang alam tersebut menjadi ruang hidup masyarakat untuk bertani, mengelola lahan, memperoleh air, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga perubahan pada kawasan hutan, sumber air, dan lahan secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.

29 Geopark Jogja. (n.d.). Telisik Bhumi Jogja #1: Sumbu imaginer tak lagi imaginer. https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/news/telisik-bhumi-jogja-1-sumbu-imaginer-tak-lagi-imaginer
30 KH1. (2018). Memahami secara utuh potensi dan permasalahan air di Gunungkidul. Kabarhandayani.com. https://kabarhandayani.com/memahami-secara-utuh-potensi-dan-permasalahan-air-di-gunungkidul/

Persoalan bencana ekologis di Yogyakarta semakin terasa dengan adanya kerusakan sumber air, pembukaan lahan, aktivitas pertambangan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Di Wadas, Purworejo, masyarakat mulai mengalami banjir dan ancaman tanah longsor, serta kehilangan akses terhadap sejumlah mata air yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari akibat berkurangnya vegetasi dan tutupan pohon. Hal ini merupakan dampak dari adanya pembukaan petak hutan di perbukitan untuk akses jalan yang menghubungkan lokasi tambang batu andesit di Wadas dan lokasi Waduk Bener di Desa Bener yang berjarak sekitar 12 km. Akibatnya, air hujan tidak lagi tertahan tumbuhan dan masuk ke tanah tetapi langsung mengalir di permukaan dan meluncur tanpa hambatan.[31] Sebelumnya, Desa Wadas yang terkenal dengan sumber alamnya yang melimpah sebagai sumber penghidupan masyarakat[32] digerus untuk mendukung sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) bernama Bendungan Bener. Pembangunan ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah No. 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener. Surat Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini juga menetapkan alas Wadas seluas 146 hektare atau hampir setengah dari luas desa akan dikuasai negara sebagai lokasi penambangan batu quarry (andesit). Batu andesit di perut alas Wadas itu adalah material utama pembangunan Bendungan Bener yang berada di sebelah barat Desa Wadas.[33]



Selain itu, di kawasan Merapi-Klaten, aktivitas penambangan batu dan batu putih atau batu kapur berdampak pada rusaknya lahan pertanian dan lahan perkebunan yang akan mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selain itu, aktivitas pertambangan juga telah merusak jalur evakuasi, mengganggu resapan air, ekologi, dan meningkatkan risiko longsor.[34] Hal ini berdampak pada sumber mata air dan mengurangi akses masyarakat terhadap air bersih. Ketika perbukitan kapur atau kawasan lereng dikeruk, fungsi alami lahan sebagai daerah resapan air menjadi rusak. Akibatnya, debit air di titik-titik mata air terus menurun, bahkan beberapa di antaranya mengering, yang langsung memicu krisis air bersih bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Krisis air bersih juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo karena dilanda kekeringan sejak Juli 2026. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat bahwa distribusi air hingga pertengahan Oktober 2026 telah mencapai sekitar 3 juta liter, dengan ribuan keluarga terdampak.[35]

31 Setiawan, D. (2023). Banjir di Wadas Setelah Hutan Ditebas. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/banjir-di-wadas-setelah-hutan-ditebas/
32 Muryanto, B. (2021). 'Tanah Surga' Wadas Dijadikan Tambang: 'Mengapa Pemerintah Menindas Petani?'. Project Multatuli https://projectmultatuli.org/tanah-surga-wadas-dijadikan-tambang-mengapa-pemerintah-menindas-petani/
33 Muryanto, B. (2021). Wadon Wadas Menjaga Alam untuk Anak-Cucu. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/wadon-wadas-menjaga-alam-untuk-anak-cucu/
34 Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir Merapi di Klaten. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(2), 147–161. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990
35 Ma'arif, K. (2026). Kekeringan Kulonprogo makin parah, distribusi air bersih tembus 3 juta liter. Harianjogja.com. https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1275249/kekeringan-kulonprogo-makin-parah-distribusi-air-bersih-tembus-3-juta-liter



(Masyarakat mengantre mengambil air bersih (2022). ***Sumber:*** Kompas)

Bukan hanya di Kulon Progo, krisis air bersih juga menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat di Kota Yogyakarta, terutama Umbulharjo dan Mujamuju di mana adanya penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Masalah pencemaran dan penurunan kualitas air ini bukan temuan baru. Sejak 2015, melalui Survei Kualitas Air Yogyakarta yang rilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan 67,1% rumah tangga memiliki air siap minum yang terkontaminasi bakteri *Escherichia coli* atau dikenal *E.coli*.[36] Paparan bakteri *E. coli* melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai gangguan pencernaan, seperti sakit perut, diare, mual, dan muntah. Pencemaran air juga berasal dari aktivitas domestik, usaha laundry skala mikro, serta kegiatan usaha dan industri yang membuang air limbah dengan kualitas yang belum memenuhi baku mutu.[37]

Maraknya pembangunan sektor perhotelan, apartemen, rumah indekos, dan bangunan komersial lain juga rentan memicu krisis air karena menyedot air dari sumur bor dalam. Di Kota Yogyakarta, pembangunan ini semakin masif dilakukan ketika persoalan sanitasi, kualitas air, dan ketersediaan air tanah belum terselesaikan. Di pesisir Kulon Progo, kawasan pantai yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat juga mulai menghadapi tekanan dari pengembangan pariwisata eksklusif oleh perusahaan atau pemilik modal. Sejak 2006, seiring dengan semakin banyaknya pembangunan hotel, permukaan air tanah terus menurun 15-50 sentimeter per tahun.[38] Hotel-hotel di Yogyakarta banyak yang tidak memiliki ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang memadai[39], bahkan beberapa di antaranya juga tidak memiliki izin.[40] Dampaknya tentu paling dirasakan oleh masyarakat kecil. Masyarakat di wilayah pinggiran seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo mulai kesulitan memperoleh air bersih, terutama ketika musim kemarau berlangsung. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air mulai mengering sehingga sebagian masyarakat terpaksa

36 Sawal, R. (2023). Krisis Air Bersih Hantui Jogja, Budayakan Panen Air Hujan. Mongabay. https://mongabay.co.id/2023/05/23/krisis-air-bersih-hantui-jogja-budayakan-panen-air-hujan/
37 ibid
38 Syambudi, I. (2020). Ironi Sleman: Warga Krisis Air di Tengah Geliat Bisnis Hotel & Mal. Tirto. https://tirto.id/ironi-sleman-warga-krisis-air-di-tengah-geliat-bisnis-hotel-mal-ep4w
39 ibid
40 Adzani, B. G. (2025). Krisis air tanah di Yogyakarta: Bahaya di balik sumur bor dan hotel-hotel baru. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/bangkitgemmaadzani6789/682ec13cc925c41c223ace45

mengolah air dengan kaporit atau membeli air galon untuk kebutuhan minum dan memasak.

Dalam situasi tersebut, kekeringan menjadi persoalan yang sangat krusial bagi kelompok perempuan petani di Yogyakarta. Ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, perempuan harus mengambil air dari tempat yang semakin jauh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Persoalan ini memperlihatkan bahwa krisis air tidak berhenti pada hilangnya sumber air secara fisik, tetapi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari perempuan melalui bertambahnya waktu dan tenaga yang harus mereka keluarkan untuk memperoleh air, mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air, dan menjaga keberlangsungan pekerjaan mereka sebagai petani. Oleh karena itu, kekeringan perlu dilihat sebagai persoalan ekologis yang memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung terhadap kehidupan perempuan. Kerusakan sumber air dan lahan juga perlahan menghilangkan ruang bagi perempuan untuk mempertahankan pengetahuan mengenai pengelolaan air, pertanian, tanaman pangan, dan cara menjaga keberlangsungan lingkungan. Pengetahuan tersebut selama ini tumbuh dari pengalaman perempuan berinteraksi langsung dengan lahan, sumber air, tanaman, dan musim. Ketika musim semakin sulit diprediksi dan ruang hidup terus berubah akibat pembangunan, pertambangan, serta perubahan fungsi lahan, perempuan semakin sulit meneruskan pengetahuan ekologis tersebut kepada generasi berikutnya.

SP Mamut Menteng

Provinsi Kalimantan Tengah terletak di jantung Pulau Borneo yang terletak antara 0°45’ lintang utara, 3°30’ lintang selatan dan 111°-116° bujur timur. Provinsi ini merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 km². Kalimantan Tengah terdiri dari kawasan hutan seluas 12.675.364 Ha (82,16%) dan kawasan non-kehutanan seluas 2.751.416 Ha (17,84%) yang berbatasan langsung dengan Secara geografis, Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan dan Kalimantan Timur di sebelah utara, Laut Jawa di Selatan, Provinsi Kalimantan Barat di Sebelah Barat dan Provinsi Kalimantan selatan dan Kalimantan timur di sebelah timur. Data BPS yang dirilis pertengahan tahun 2026, mencatat penduduknya berjumlah 2.879.500 jiwa yang terdiri dari 1.483.000 jiwa laki-laki dan 1.396.600 jiwa perempuan.

Wilayahnya didominasi oleh dataran rendah, hutan, dan daerah aliran sungai yang luas. Provinsi ini memiliki 11 sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai. Sungai-sungai besar ini dimanfaatkan menjadi jalur transportasi oleh masyarakat dan sumber penghidupan masyarakat, karena dari sungai mereka bisa mengambil berbagai sumber pangan untuk memenuhi kehidupan. Untuk memenuhi perekonomian dan kebutuhan keluarga, masyarakat Kalimantan Tengah yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai peladang, nelayan sungai dan meramu hasil hutan untuk mendapatkan sumber pangan, obat-obatan, dan mengambil rotan untuk membuat berbagai anyaman. Namun sayang keberadaan sungai-sungai itu telah tercemar bahan kimia dari perkebunan besar dan pertambangan yang merusak ekosistem mereka dan habitat flora dan fauna

Alih fungsi hutan dan lahan ini mendatangkan bencana secara rutin. Sepanjang Januari – September 22026, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah mencatat telah terjadi sebanyak 3.012 bencana. Bencana ini didominasi kebakaran hutan hutan dan lahan sebanyak 2.775 kejadian dengan luas lahan yang terbakar seluas 9.169,22 Ha.

Kemudian diikuti oleh cuaca ekstrim dan banjir. Selain itu kemarau panjang juga telah meningkatkan titik api dan panas terutama di lahan gambut yang mudah terbakar, akibatnya ada 126 pemukiman yang terbakar. Cuaca ekstrem sebanyak 50 kejadian, kekeringan 8 kejadian, banjir 47 kejadian dan abrasi dan tanah longsor 3 kejadian.

Bencana ini telah menghancurkan sarana dan prasarana yang ada dan menyebabkan luka, sakit bahkan kehilangan nyawa sebagai berikut

1. Terdampak /kehilangan tempat tinggal 68.667 jiwa
2. Luka/ sakit 13 orang
3. Meninggal 1 orang
4. Bangunan tergenang 8412 unit
5. Bangunan rusak berat 216 unit
6. Bangunan rusak sedang 30 unit
7. Bangunan rusak ringan 58 unit
8. Gedung pendidikan 93 unit
9. Rumah ibadah 43 unit
10. Fasilitas kesehatan 25 unit
11. Kantor 16 unit
12. Jalan rusak 91 titik
13. Jembatan 60 unit

Kejadian bencana ini khususnya Karhutla menjadi ancaman serius dan perlu penanganan dan pencegahan secara menyeluruh. Perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya karena bencana ini memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat, seperti hancurnya pemukiman, hilangnya sumber penghidupan dan rusaknya ekosistem dan habitat flora dan fauna atau keragaman hayati. Dalam konsolidasi yang dilakukan oleh Seknas SP bersama komunitas tanggal 3 September 2026, Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) menyampaikan bahwa karhutla ini juga berdampak pada:

1. Kesehatan: Dinas Kesehatan mencatat puluhan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat sebaran kabut asap karhutla. Pada Agustus 2026 Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di tercatat menyentuh angka 977 di Palangkaraya
2. Gangguan psikologis : Lahan pemukiman penduduk umumnya adalah lahan gambut yang sangat mudah terbakar. Kondisi ini yang memberikan kegelisahan. Mereka susah tidur, ketakutan diserang binatang buas, dan rumah terbakar.
3. Ketersediaan air bersih : kemarau panjang menyebabkan kekeringan di banyak tempat, karhutla semakin memicu kekeringan dan terancam gagal panen
4. Ekonomi masyarakat khususnya perempuan : Pekatnya kabut asap menyebabkan masyarakat terutama perempuan sulit keluar rumah untuk berusaha, sementara di Palangkaraya pelaku UMKM kebanyakan adalah perempuan
5. Mengancam kehidupan satwa yang mendiami hutan seperti orang hutan dan satwa endemik lainnya



(Kondisi di Mantangai Hulu dan Palangkaraya (2026). ***Sumber:*** SP Mamut Menteng)

Banyak media cetak, elektronik maupun media sosial yang memberitakan atau menayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Dampak parah semakin parah mereka rasakan pada Juli 2026. Kebakaran hutan dan lahan semakin tidak terkendali. Lingkungan mereka dilingkupi asap tebal dan kotor dengan jarak pandang sangat terbatas karena kabut tebal. Bahkan kabut asap ini sampai ke Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Pemerintah Kalimantan Tengah hanya menetapkan kebijakan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026, yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 dengan melibatkan berbagai stakeholder dan relawan dari masyarakat. Namun tidak ada kebijakan yang memberikan sanksi bagi perusahaan perkebunan atau pertambangan yang membabat hutan. Yang disalahkan dalam peristiwa karhutla ini adalah petani tradisional yang membakar lahan. Padahal, kebakaran hutan merupakan strategi berbiaya murah yang dilakukan oleh perusahaan untuk ekspansi perkebunan.

Karhutla ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Kabut asap telah membatasi masyarakat khususnya untuk beraktivitas di luar rumah. Mereka tidak bisa ke kebun, ke ladang atau masuk hutan karena asap yang tebal dan kotor. Kehilangan sumber penghidupan akan melahirkan pemiskinan karena ia terjadi secara struktural yang disebabkan oleh kebijakan negara yang tidak berkeadilan dan bertumpu pada pertumbuhan modal dan berorientasi pada investasi.

Bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta alih fungsi lahan di Kalimantan Tengah memutus rantai pengetahuan ekologis dan tradisional perempuan yang diwariskan secara turun-temurun :

1. **Hilangnya sumber obat dan pangan :** Hutan dan lahan gambut berfungsi sebagai apotek hidup serta pasar alam bagi perempuan untuk mencari bahan pangan serta obat-obatan herbal. Ketika ekosistem ini rusak atau terbakar, kemampuan meracik obat tradisional ikut terhenti.
2. **Terputusnya ruang belajar antar generasi :** Ladang dan hutan bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan ruang sosial tempat perempuan berbagi pengetahuan mengenai nilai-nilai pertanian, benih lokal, dan hubungan spiritual dengan alam. Hilangnya ruang ini menyudahi proses transfer pengetahuan kepada generasi muda
3. **Kerentanan berlapis :** Komnas Perempuan mencatat bencana ekologis menciptakan beban berlapis bagi perempuan. Mulai dari krisis kesehatan akibat asap, hilangnya sumber penghidupan, hingga terancamnya tradisi lokal seperti keahlian kerajinan tangan khas.



(Air keruh dari sungai di Desa Sei Ahas (2026). ***Sumber:*** SP Mamut Menteng)

Beban perempuan semakin berlapis dalam situasi ini karena peran-peran domestik yang dilekatkan pada mereka seperti mencukupi pangan keluarga, merawat, dan menjaga anak dan peran domestik lainya. Selain itu karhutla telah menghancurkan ladang dan kebun mereka juga berbagai biodiversitas yang ada di hutan mereka. Perempuan juga akan kehilangan pengetahuannya, baik dalam pemuliaan tanaman maupun karena hutan sebagai sekolah alam meracik obat-obatan tradisional sudah tidak ada lagi.



(Kondisi lahan semangka milik masyarakat di Desa Henda, Pulang Pisau (2026). ***Sumber:*** SP Mamut Menteng)

> *"Saya kemarin kena dampak kebakaran. Perkebunan karet kami habis terbakar karena api ini masih hidup. Dampaknya, hilang mata pencaharian kami sebagai petani, jadi penghasilan kami berkurang. Kemarin sempat sakit juga karena asap yang menimpa kami. Saya kelelahan memadamkan api sendiri sehingga sempat dilarikan ke puskesmas karena sesak."* ***- Perempuan di Desa Henda, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah***

SP Flobamoratas

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di bagian tenggara Indonesia dan merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, serta Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Secara astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak antara 8°–12° Lintang Selatan dan 118°–125° Bujur Timur. NTT memiliki luas daratan sekitar 46.446,64 km² yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, dengan 609 pulau yang membentuk wilayah kepulauan Flobamorata. Pada 2026, jumlah penduduk NTT mencapai sekitar 5,83 juta jiwa.[41] Wilayah NTT memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan. Bentang alam tersebut menjadi ruang hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan kehidupan pada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai sumber daya alam di sekitarnya. Namun, kondisi ekologis NTT yang menghadapi tekanan kekeringan dan kerusakan sumber daya alam semakin memengaruhi keberlanjutan sumber air, pangan, dan penghidupan masyarakat. Selain itu, NTT juga berada di kawasan Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) yang membuat wilayah ini memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik tinggi serta rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung api.

41 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026). Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2026. https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTU2IzI=/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html



(Gempa bumi di NTT mengakibatkan sejumlah rumah rusak parah (2026).
Sumber: Selo/AFP)

Gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu banyak menelan korban jiwa. Gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 ini mengguncang Flores dengan pusat gempa berada sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo pada kedalaman 15 kilometer. Gempa ini dipicu oleh aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Flores atau Flores *Back-Arc Thrust*, yang merupakan bagian dari sistem tektonik aktif akibat pertemuan dan pergerakan Lempeng Australia dengan Lempeng Sunda di kawasan Nusa Tenggara. Gempa tersebut menimbulkan guncangan kuat di sejumlah wilayah Flores dan sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum peringatan tersebut diakhiri setelah kondisi muka air laut kembali menunjukkan tren aman. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur per 27 September 2026 mencatat, dari 156 korban meninggal dunia, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sementara 108 lainnya meninggal akibat dampak tidak langsung setelah bencana terjadi.[42] 1.620 orang mengalami luka-luka, dan 115.421 orang harus mengungsi.[43] Gempa juga merusak 97.986 rumah serta ribuan fasilitas publik rusak, antara lain 1.378 sekolah, 157 fasilitas kesehatan, 607 kantor, dan 528 rumah ibadah.[44]

42 https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm790p742qvgo
43 https://www.teras.id/foto/ekora-ntt/rubrik/jeda/peta-dampak-gempa-flores-dari-penyebab-hingga-menelan-korban-jiwa-2288768
44 ibid.



(Korban gempa dirawat di tenda medis darurat di depan RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (2026). ***Sumber:*** BBC Indonesia)

Dengan besarnya dampak gempa tersebut, pemerintah seharusnya menetapkan status bencana nasional guna mempercepat bantuan kemanusiaan dan pemulihan. Namun, penanganan yang berjalan justru memperlihatkan lemahnya kapasitas negara dalam memastikan keselamatan penyintas setelah bencana terjadi. Hingga 28 September 2026, sebanyak 156 orang meninggal dunia, dan 108 di antaranya meninggal ketika berada di tenda maupun lokasi pengungsian, lebih dari dua kali jumlah korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa yang mencapai 48 orang.[45] Sebagian besar korban meninggal merupakan lanjut usia dengan penyakit penyerta seperti stroke dan diabetes melitus. Namun, kondisi tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk mengabaikan hak mereka atas layanan kesehatan yang memadai, terlebih ketika seorang balita berusia dua tahun asal Kabupaten Nagekeo meninggal pada 20 Agustus 2026 setelah mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang saat berada di pengungsian. Terbatasnya fasilitas, minimnya layanan medis, serta kondisi cuaca yang sangat panas pada siang hari dan dingin pada malam hari menunjukkan bahwa tempat pengungsian belum mampu menjamin keselamatan dan kesehatan kelompok rentan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan masyarakat terus berlangsung di tempat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan. Selain itu, di saat masih banyak wilayah, terutama daerah terpencil, yang belum menerima bantuan secara memadai, masyarakat sipil justru harus mengambil peran untuk mengisi kekosongan penanganan pemerintah melalui posko-posko mandiri dan penyaluran bantuan. Kejadian di NTT ini menjadi bagian dari kegagalan beruntun pemerintah dalam menangani bencana di berbagai wilayah Indonesia. Negara gagal dalam memastikan hak penyintas atas keselamatan, kesehatan, kebutuhan dasar, dan perlindungan selama berada di pengungsian. Ironisnya, di tengah situasi pengungsian yang masih menghadapi persoalan pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nagekeo pada 26 Agustus 2026 justru diisi dengan pembahasan mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menunjukkan sikap abai dan minimnya empati pemerintah terhadap kondisi penyintas yang sedang berada dalam situasi sulit. Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi ketidakpastian di

45 Robert, E. (2026). Mengapa lebih banyak penyintas gempa NTT meninggal di pengungsian daripada akibat bencana?. BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm790p742qvgo

pengungsian, pemerintah justru sibuk membawa dan mempromosikan agenda programnya sendiri tanpa menunjukkan kepekaan terhadap kondisi sulit yang sedang dihadapi oleh rakyatnya.

Selain menjadi korban bencana, perempuan juga mengalami dampak berlapis karena kebutuhan mereka sering luput dalam penanganan darurat. Solidaritas Perempuan Flobamoratas menemukan bahwa di banyak lokasi pengungsian, perempuan, laki-laki, anak-anak, dan kelompok rentan masih ditempatkan dalam tenda yang sama karena belum tersedia pengungsian yang terpilah berdasarkan kebutuhan. Di Desa Ulubelang, misalnya, bantuan beras dan sembako telah tersedia, tetapi banyak perempuan kehilangan periuk dan kuali karena tertimbun reruntuhan sehingga mereka tetap kesulitan mengolah bantuan pangan yang diterima. Lambatnya pendataan dan belum tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas membuat kebutuhan perempuan dan kelompok rentan semakin mudah terlewat. Padahal, Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2026 telah mengatur pentingnya pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana dengan memperhatikan kebutuhan dan kerentanan kelompok yang berbeda.



(Kondisi di tenda pengungsian di Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2026). ***Sumber:*** BBC Indonesia)

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena selain kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, perempuan juga menghadapi ancaman kekerasan di tengah kondisi pengungsian yang belum sepenuhnya aman. Solidaritas Perempuan Flobamoratas juga menemukan bahwa belum semua lokasi pengungsian memiliki tenda yang terpisah berdasarkan gender, sementara proses pendataan masih lambat dan belum menggunakan data terpilah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sulit dipetakan dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender di lokasi yang minim pengawasan. Dua hari setelah gempa, seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sikka mengalami kekerasan seksual pada 17 dan 18 Agustus 2026, ketika keluarganya sedang mengungsi.[46] Seharusnya, pengungsian menjadi ruang yang memberikan rasa

46 Laksono, M. Y. (2026). Anak di Sikka Diduga Jadi Korban Pemerkosaan, 2 Hari Setelah Gempa NTT. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/09/09/085847578/anak-di-sikka-diduga-jadi-korban-pemerkosaan-2-hari-setelah-gempa-ntt?page=all

aman dan perlindungan, tetapi dalam kenyataannya perempuan masih menghadapi ancaman kekerasan bahkan di tengah kondisi yang sulit. Dalam situasi bencana, perempuan tidak berhenti menjadi korban bencana, tetapi juga dapat menjadi korban dari kekerasan dan berbagai dampak lain yang muncul selama proses pengungsian dan pemulihan. Bencana tidak pernah netral gender karena perempuan mengalami dampak berlapis yang tidak dirasakan secara sama oleh laki-laki.

SP Mataram

Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di bagian barat Pulau Lombok, di antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Secara astronomis, Kota Mataram berada pada 08°33’–08°38’ Lintang Selatan dan 116°04’–116°10’ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 61,30 km² yang terbagi ke dalam enam kecamatan, yaitu Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara, dan Sandubaya. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara, timur, dan selatan, serta Selat Lombok di sebelah barat. Dua kecamatan, yaitu Ampenan dan Sekarbela, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai. Pada 2026, jumlah penduduk Kota Mataram mencapai sekitar 452,4 ribu jiwa.[47]

Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan perekonomian di Pulau Lombok, Kota Mataram berkembang sebagai wilayah perkotaan yang memiliki keterhubungan erat dengan kawasan di sekitarnya. Namun, perkembangan tersebut juga berlangsung di tengah tekanan ekologis yang semakin terasa, mulai dari persoalan air, perubahan pola cuaca, kekeringan, hingga tekanan pembangunan dan aktivitas industri di wilayah sekitar Mataram. Bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam, perubahan kondisi lingkungan tersebut berpengaruh langsung terhadap penghidupan dan ruang hidup mereka. Tekanan ekologis tersebut juga tidak berhenti di wilayah perkotaan Mataram, tetapi terhubung dengan berbagai wilayah pengorganisasian Solidaritas Perempuan Mataram di Pulau Lombok. Salah satu pengalaman yang memperlihatkan bagaimana krisis ekologis dan perubahan iklim berkelindan dengan hilangnya ruang hidup, penghidupan, serta pengetahuan lokal perempuan terjadi di Desa Adat Sade, Lombok Tengah.

Desa Adat Sade merupakan salah satu ruang hidup masyarakat Suku Sasak yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Desa ini diperkirakan sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, Sade bukan sekadar kawasan permukiman atau destinasi wisata budaya, tetapi juga tempat berlangsungnya



(Kebakaran di Desa Adat Sade (2026). *Sumber*: Koran NTB)

47 Pemerintah Kota Mataram. (2026). Jumlah penduduk. PINTAR: Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu. https://pintar.mataramkota.go.id/detail/98-jumlah-penduduk

kehidupan sehari-hari, penghidupan, serta pewarisan pengetahuan dan tradisi masyarakat Sasak. Pada 22 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 WITA, kebakaran melanda kawasan tersebut dan dengan cepat merambat ke bangunan-bangunan adat yang sebagian besar menggunakan material bambu dan atap tradisional yang mudah terbakar. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan kebakaran dipicu oleh masalah kelistrikan atau korsleting listrik.[48] Dari kebakaran tersebut, 167 bangunan terbakar, yang terdiri dari 75 rumah adat, 69 *art shop* (toko seni), 8 lumbung alang, serta masjid dan bangunan adat lainnya[49], dengan kerugian materi yang ditaksir mencapai 34 miliar rupiah.[50] Sebanyak 189 kepala keluarga terdampak, sementara sekitar 320 orang yang menjalankan usaha pariwisata di Sade, yang sebagian besar merupakan perempuan penenun, pembuat gerabah, dan pelaku usaha kerajinan, kehilangan ruang untuk menjalankan penghidupannya. Hingga setelah kebakaran, area tersebut nyaris tidak menyisakan bangunan selain fondasi.



(Kondisi Desa Adat Sade setelah kebakaran (2026). ***Sumber:*** Relawan Nusantara)

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun, besarnya dampak yang ditinggalkan tidak dapat diukur hanya melalui jumlah bangunan yang musnah atau nilai kerugian material. Kebakaran di Sade turut menghilangkan bagian dari warisan masyarakat Sasak yang selama berabad-abad dirawat dan diwariskan antargenerasi. Rumah adat, benda-benda bersejarah, arsip, tradisi, serta pengetahuan yang hidup di dalamnya merupakan bagian dari identitas komunitas yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan membangun kembali bangunan yang terbakar. Seluruh arsip sejarah dan dokumen tradisional yang tersimpan ikut terbakar, sementara alat-alat tenun milik perempuan yang selama ini digunakan untuk menghasilkan tenun dan diwariskan dari generasi ke generasi juga tidak berhasil diselamatkan. Kehilangan tersebut berarti hilangnya bagian dari pengetahuan lokal perempuan yang melekat pada alat, cara menenun, serta proses pewarisannya. Alat tenun yang digunakan masyarakat Sade memiliki nilai historis dan budaya yang tidak dapat begitu saja digantikan dengan

48 Akbar, A. (2026). Gubernur NTB ungkap dugaan sementara penyebab kebakaran Kampung Adat Sade. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8631665/gubernur-ntb-ungkap-dugaan-sementara-penyebab-kebakaran-kampung-adat-sade
49 Yayasan Komite Relawan Nusantara. (2026). Kebakaran Desa Adat Sade Lombok: Ketika Riwayat Suku Sasak Berubah Menjadi Puing. Relawan Nusantara. https://relawannusantara.org/kebakaran-desa-adat-sade-lombok-tengah/
50 Suryansyah, E. (2026). Kebakaran Desa Adat Sade: 75 Rumah-69 Art Shop Hangus, Kerugian Rp 34 M. Detik.com. https://www.detik.com/bali/nusra/d-8632270/kebakaran-desa-adat-sade-75-rumah-69-art-shop-hangus-kerugian-rp-34-m

membuat alat baru. Oleh karena itu, ketika alat-alat tersebut terbakar, yang hilang bukan hanya alat kerja atau alat penggerak ekonomi, tetapi juga bagian dari ingatan dan pengetahuan yang selama ini hidup melalui praktik sehari-hari.



(Kondisi Desa Adat Sade setelah kebakaran (2026). ***Sumber:*** Kompas)

Desa Sade sejak awal merupakan wilayah lahan kering, dengan kondisi tanah yang retak pada musim kemarau dan menjadi berlumpur ketika musim hujan. Dalam situasi kemarau yang semakin panjang dan kering, risiko kebakaran pun semakin besar. Kebakaran tersebut juga memutus berbagai sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Sade. Perempuan di Sade tidak menggantungkan hidup hanya dari aktivitas menenun, tetapi juga bertani dan mengelola sumber pangan keluarga. Kebakaran yang terjadi juga menghanguskan lumbung pangan kolektif masyarakat Sade yang selama ini digunakan untuk menyimpan hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan bersama. Kebakaran menghanguskan delapan lumbung alang yang selama ini menjadi bagian dari sistem penyimpanan pangan masyarakat. Bagi perempuan, kehilangan tersebut berarti bertambahnya beban untuk memastikan ketersediaan pangan keluarga ketika sumber penghidupan dan tempat penyimpanan hasil pertanian ikut terbakar.

Selain masalah listrik, kebakaran tersebut juga diduga dipicu karena wilayah Mataram memasuki musim kemarau sehingga kekeringan juga mulai mengancam. Kondisi cuaca yang semakin kering, ditambah peringatan El Niño, meningkatkan risiko kebakaran dan mempercepat penyebaran api. Kekeringan ini mulai mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat. Di Desa Bukit Tinggi, wilayah sekitar Bendungan Meninting, krisis air mulai dirasakan sejak akhir Agustus 2026 dan berdampak pada sekitar 229 kepala keluarga. Sungai-sungai yang menjadi sumber air masyarakat mulai mengering dan alirannya semakin kecil, bahkan keberadaan Bendungan Meninting tidak serta-merta menjamin masyarakat di sekitarnya memperoleh akses air yang cukup.

Krisis air juga dirasakan di wilayah lain di sekitar Bendungan Meninting. Di Dusun Ketapang, sekitar 290 kepala keluarga yang bergantung pada jaringan air mengalami kesulitan ketika aliran air keran mulai tersendat. Sementara itu, sekitar 40% masyarakat lainnya yang masih mengandalkan sumur dan sumur bor juga mulai

menghadapi penurunan volume air. Kondisi serupa terjadi di Desa Dasan Geria dengan sekitar 300 kepala keluarga yang masih bergantung pada aliran air dari Bendungan Meninting. Kekeringan tersebut kemudian berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk perempuan yang bekerja sebagai pedagang dan petani. Ketika air semakin sulit diperoleh, perempuan harus menghadapi tambahan beban untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga sekaligus mempertahankan aktivitas penghidupan mereka.

SP Sumbawa

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota di Sumbawa Besar. Sumbawa berada di jalur penghubung penting antara Pulau Lombok dan Flores, serta memiliki kawasan pesisir potensial di wilayah Saleh, Moyo, Tambora. Kabupaten yang memiliki luas wilayah daratan sekitar 6.643,98 km². Sumbawa merupakan Lumbung pertanian dengan komoditas padi dan jagung. Selain lumbung pertanian, Sumbawa juga merupakan serta kawasan strategis pariwisata seperti kawasan Samota (Saleh-Moyo-Tambora).

Bentang alam Sumbawa terdiri atas pegunungan, perbukitan, dataran rendah, kawasan pesisir, teluk, dan pulau-pulau kecil. Kondisi geografis tersebut menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sumbawa juga menjadi salah satu wilayah penting bagi produksi pangan di NTB, terutama komoditas padi dan jagung. Namun, ketergantungan penghidupan masyarakat pada sumber daya alam, perubahan pola cuaca, serta kerentanan ekosistem menghadirkan tantangan serius bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat, khususnya perempuan akar rumput.

Secara geografis dan klimatologis, Sumbawa menghadapi ancaman berbagai bencana, antara lain banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, serta gempa bumi. Hujan berintensitas tinggi dapat meningkatkan aliran permukaan dan luapan sungai, terutama di kawasan hilir dan permukiman yang berada di sekitar aliran air. Sebaliknya, musim kemarau panjang dan fenomena El Niño dapat memperburuk kekurangan air, menurunkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan kerentanan terhadap karhutla. Risiko tersebut tidak hanya ditentukan oleh kondisi alam, tetapi juga oleh perubahan tutupan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, tata kelola sumber daya alam, dan akses masyarakat terhadap infrastruktur serta layanan dasar.

Pengalaman bencana di Sumbawa memperlihatkan bagaimana kerusakan ekologis dapat memutus akses terhadap air bersih, merusak infrastruktur, menghambat mobilitas warga, dan menghancurkan sumber penghidupan. Pada 21 Februari 2024, hujan lebat di wilayah hulu dilaporkan menyebabkan banjir yang menggenangi tiga desa di Kecamatan Buer. Peristiwa tersebut berdampak pada warga Desa Labuhan Burung dan Desa Jurumapin, merendam sekitar 25 hektar lahan pertanian, serta menyebabkan kerusakan jembatan penghubung desa.[51] Sementara itu, berdasarkan informasi kebencanaan tahun 2026 kekeringan pada September 2026 disebut berdampak terhadap sekitar 42.728 jiwa di 14 kecamatan.[52]

51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). Bencana Alam Banjir Bandang Melanda Kabupaten Sumbawa. https://bpbd.ntbprov.go.id/post/bencana-alam-banjir-bandang-melanda-kabupaten-sumbawa
52 Syahroni, I. (2026). Wilayah Terdampak Kekeringan di Sumbawa Meluas. Suara NTB. https://suarantb.com/2026/09/17/wilayah-terdampak-kekeringan-di-sumbawa-meluas-2/

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa mencatat sedikitnya ada sekitar 8.170 jiwa terdampak bencana, paling parah ada di Kecamatan Empang dengan jumlah masyarakat 1.162 kepala keluarga atau sekitar 3.476 jiwa.[53] Kekeringan yang terjadi pada September 2026 di 14 kecamatan menyebabkan kekeringan , lebih dari setengah Kabupaten Sumbawa mengalami kekeringan. BPBD mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan.[54] Bencana alam dan perubahan iklim di Kabupaten Sumbawa memiliki dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan perempuan serta kerentanan ekonomi keluarga. Wilayah ini dikategorikan oleh BNPB memiliki tingkat risiko bencana cuaca ekstrem yang sangat tinggi, dengan potensi kerugian ekonomi akibat banjir menempati peringkat tiga besar di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bagi perempuan akar rumput, bencana membawa dampak yang tidak setara karena mereka berada dalam posisi yang dipengaruhi oleh ketimpangan kuasa, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Ketika sawah terendam, tanaman gagal panen, ternak terdampak, atau sumber air mengering, perempuan petani, peternak, nelayan, dan pengolah pangan lokal kehilangan sebagian sumber pendapatan sekaligus menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan perempuan dalam produksi pangan, pengolahan hasil pertanian, pemeliharaan ternak, dan ekonomi informal sering kali tidak tercatat secara memadai sebagai kerugian ekonomi. Akibatnya, pemulihan pascabencana yang hanya menghitung kerusakan aset fisik berisiko mengabaikan kehilangan pendapatan, pekerjaan perawatan, pengetahuan lokal, serta sumber daya yang menopang kehidupan sehari-hari perempuan.

Krisis air bersih memperberat beban ganda perempuan. Ketika sumur mengering atau sumber air tercemar, perempuan kerap harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari dan menyediakan air, memasak, merawat anak, mendampingi anggota keluarga yang sakit, serta memenuhi kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas. Beban perawatan yang meningkat mengurangi waktu perempuan untuk bekerja, mengelola lahan, menjalankan usaha, mengikuti kegiatan organisasi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam situasi pengungsian, keterbatasan fasilitas sanitasi yang aman, ruang privat, layanan kesehatan reproduksi, dan mekanisme pengaduan juga dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender.

Bencana ekologi juga mengancam keberlanjutan pengetahuan ekologis dan budaya masyarakat. Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga benih lokal, mengenali tanaman pangan dan obat, mengolah hasil pertanian, meneruskan pengetahuan musim tanam, serta mempertahankan praktik pengelolaan pangan yang diwariskan antargenerasi. Peran tersebut juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan

53 Siaga NTB. (2024). Bencana Alam Banjir Bandang Melanda Kabupaten Sumbawa. https://siaga.ntbprov.go.id/info-kebencanaan/bencana-alam-banjir-bandang-melanda-kabupaten-sumbawa
54 Putra, R. P. (2026). Kekeringan Sumbawa Meluas, 42.728 Jiwa Terdampak. RRI. https://rri.co.id/mataram/regional/2731267/kekeringan-sumbawa-meluas-42728-jiwa-terdampak

perempuan di Kabupaten Sumbawa mencapai 35,99 persen pada 2024.[55] Namun ironisnya, ketika lahan produktif rusak, sumber air menghilang, dan pendapatan keluarga merosot, sebagian anggota keluarga dapat terdorong untuk bermigrasi demi mencari penghidupan. Jika tidak disertai ruang pewarisan pengetahuan dan dukungan terhadap penghidupan lokal, proses tersebut dapat melemahkan transmisi pengetahuan etnobotani,[56] pangan lokal, dan praktik ekologis yang selama ini menopang ketahanan komunitas. Kehilangan ini bukan sekadar persoalan budaya, melainkan juga menyangkut kemampuan masyarakat menghadapi krisis pangan dan perubahan iklim.

pengalaman perempuan akar rumput di Sumbawa menunjukkan bahwa dampak bencana tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan dan penanggulangan bencana. Perempuan sering ditempatkan sebagai penanggung jawab utama keberlangsungan rumah tangga, tetapi belum selalu memperoleh ruang yang setara dalam menentukan tata kelola air, pertanian, pesisir, anggaran kebencanaan, dan arah pemulihan wilayah. Ketika keputusan ditetapkan tanpa partisipasi bermakna perempuan terdampak, kebutuhan mereka terhadap air bersih, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, pemulihan mata pencaharian, dan keberlanjutan pangan akan terus mendapat terabaikan.

SP Palu

Kota Palu, merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas wilayah 395,06 km² yang terbagi menjadi delapan kecamatan dan 46 kelurahan. Terletak di lembah yang diapit pegunungan dan berbatasan langsung dengan Teluk Palu, wilayah ini memiliki bentang alam berupa pegunungan, lembah, sungai, teluk, dan lautan. Kondisi geografis dan geologis tersebut menjadikan Palu rentan terhadap gempa bumi akibat aktivitas Sesar Palu-Koro, tsunami, likuifaksi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Kerentanan tersebut semakin kompleks ketika risiko bencana berhadapan dengan ketimpangan sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, tata ruang, serta keterbatasan perlindungan dan kesiapsiagaan masyarakat.[57]

Palu, terletak di kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Berada di antara 0°36'–0°56' Lintang Selatan dan 119°45'–121°01' Bujur Timur, tepat di garis khatulistiwa dengan ketinggian sampai 700 meter di atas permukaan laut. Palu memiliki luas wilayah 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala. Kota Palu dikelilingi oleh pegunungan dan berbatasan langsung

55 Badan Pusat Statistik. (2025). Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen), 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY3IzI%3D/sumbangan-pendapatan-perempuan.html
56 Riadi, M. (2025). Etnobotani - Sejarah, Fungsi dan Ruang Lingkup. Kajianpustaka.com. https://www.kajianpustaka.com/2025/03/etnobotani.html#:~:text=Etnobotani%20adalah%20ilmu%20yang%20mempelajari%20hubungan%20antara%20manusia,atau%20rumah%2C%20pengobatan%2C%20pakaian%2C%20perburuan%20dan%20upacara%20adat.
57 Sumber: Pemerintah Kota Palu, Letak Geografis; BPS Kota Palu, Kota Palu dalam Angka 2026

dengan Teluk Palu. Bentuk wilayahnya berupa Lembah yang memanjang yang diapit oleh pegunungan di sisi barat dan timur yang terbuka ke arah Teluk Palu di bagian utara. Kota Palu terbagi menjadi tiga zona utama yaitu : Zona rendah, yaitu zona dataran rendah dan pesisir, dengan ketinggian 0 – 100 mdpl, Zona sedang, yaitu perbukitan atau lereng bawah, dengan ketinggian 100 – 500 mdpl Zona tingga, yaitu wilayah pegunungan, dengan ketinggian >500 mdpl.

Dengan topografi seperti ini maka kota Palu dijuluki dengan kota lima dimensi karena memiliki lima bentang alam sekaligus seperti pegunungan, Lembah, teluk, lautan dan Sungai. Ahli Geologi UGM, Prof. Dr. Ir. *Subagyo Pramumijoyo*, DEA, mengatakan bahwa Palu dan Donggala merupakan titik pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Sehingga pergeseran lempeng akan mendorong pergeseran sesar palu koro, ini juga diperkuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Palu tahun 2026[58], mencatat ancaman bencana untuk kota Palu meliputi :

1. **Gempa bumi dan sesar aktif**, karena kota Palu dilintasi oleh patahan aktif kerak bumi sesar Palu-Koro yang pemicu utama gempa bumi.
2. **Tsunami,** kawasan pesisir Teluk Palu rawan terhadap terjangan gelombang tsunami akibat aktivitas gempa bawah laut.
3. **Likuifaksi**, fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran gempa yang mengubah padatan tanah menjadi seperti cairan, berisiko tinggi di wilayah tertentu seperti Petobo dan Balaroa pada tahun 2018.
4. **Bencana Hidrometeorologi**, Intensitas hujan tinggi memicu potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang pasang.
5. **Kebakaran**, Sepanjang Januari September 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mencatat ratusan kejadian kebakaran permukiman dan lahan yang juga menjadi ancaman nyata

Sejarah mencatat, bahwa Palu pada 28 September 2018 dihantam oleh gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang disertai tsunami dan likuifaksi dengan dampak yang sangat luas dan kompleks di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, serta wilayah sekitarnya. Data resmi menunjukkan bahwa bencana ini menyebabkan 4.340 orang meninggal dunia, 10.679 orang mengalami luka-luka, 667 orang dinyatakan hilang, serta sebanyak 70.821 penduduk harus mengungsi ke berbagai lokasi sementara. Palu menghadapi tiga senjata pemusnah yaitu gempa, tsunami dan likuifaksi. BNPB dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah (2020) mencatat lebih dari 65.000 unit rumah rusak/ hancur, ribuan fasilitas publik terdampak, serta kerusakan infrastruktur strategis seperti Jembatan Palu IV, Pelabuhan Pantoloan, dan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp18,48 triliun yang mencakup sektor permukiman, sosial, infrastruktur, dan ekonomi produktif.[59]

58 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). (Update) Gempa Sulawesi Tengah, 6.458 Jiwa Terdampak. https://www.bnpb.go.id/berita/update-gempa-sulawesi-tengah-6458-jiwa-terdampak
59 Nurfaisal, M. D., Syarkawi, S., & Windra, P. (2026). Pengelolaan Risiko Bencana pada Peristiwa Gempa Bumi dan Tsunami Palu dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Ensiklopedia of Journal, 8(2). https://doi.org/10.33559/eoj.v8i2.3654



(Gambar diambil melalui Citra satelit ©2018 DigitalGlobe, a Maxar company. Likuifaksi yang terjadi di area petobo telah menghilangkan dan memindahkan pemukiman, kebun, sawah dan sumber air, ***sumber*** BBC)

Bencana ini menunjukkan tingginya tingkat kerentanan sosial masyarakat dan keterbatasan kapasitas perlindungan yang tersedia sebelum bencana terjadi. Tidak ada pendidikan mitigasi bencana pada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan tanggung jawab negara untuk melakukan pendidikan mitigasi bencana. Karena bencana bukan hanya berdampak pada lingkungan, hilangnya nyawa dan tempat tinggal tapi juga memberikan trauma psikologis yang berkepanjangan karena kehilangan anggota keluarga, serta gangguan kesehatan mental dan kondisi pengungsian yang buruk terutama bagi subjek rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak. Bencana ini menyebabkan 70.821 penduduk harus mengungsi ke berbagai lokasi sementara walaupun pengungsian ini tidak sesuai dengan standar minimal untuk kehidupan mereka. Catatan Komnas Perempuan, fasilitas pengungsian tidak dipisahkan untuk kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Kondisi bencana yang terjadi di 2018 telah banyak menimbulkan dampak dan kerentanan yang cukup besar, bagi seluruh masyarakat khususnya perempuan yang telah menjadi korban, temuan Solidaritas Perempuan Palu di lapangan antara lain:

1. Kekerasan seksual paling banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak di kawasan pengungsian, mulai dari percobaan pemerkosaan hingga pengintipan di kamar mandi dan di tenda-tenda.

2. Hilangnya pemukiman akibat likuifaksi dan tsunami : seperti Kawasan Petobo dan Balaroa yang amblas karena likuifaksi. Kemudian pesisir Talise, Mamboro dan Lero yang dihantam tsunami.
3. Hilangnya sumber ekonomi dan mata pencaharian : yang terjadi terhadap petani garam di Mamboro Barat kehilangan tambak garam, atau di kawasan jalan komodo yang mayoritas adalah nelayan kecil telah kehilangan tempat penjemuran ikan, perahu dan tempat tambatan perahu mereka. Relokasi yang jauh dari laut telah menjauhkan mereka dari sumber pendapatan utama dari hasil laut.
4. Perubahan Paksa Profesi: perempuan penyintas yang kehilangan suami dan tempat tinggal terpaksa beralih profesi menjadi pemulung atau buruh serabutan dengan pendapatan yang sangat minim demi bertahan hidup di hunian sementara (huntara).
5. Tidak ada cukup lahan yang masuk kategori hijau (aman) untuk membangun Huntap (hunian tetap), jika ada, lokasi tersebut jauh dari aktivitas keseharian masyarakat, resikonya akan menjauhkan mereka dari sumber ekonomi utama. Selain itu relokasi di wilayah baru dan asing juga akan mencabut akar budaya, tradisi lokal serta sistem sosial antar mereka.
6. Meningkatnya arus migrasi: Bencana ini juga berkontribusi mendorong meningkatnya migrasi ke luar daerah dan luar negeri. Bencana yang telah menghilangkan sumber pencaharian utama masyarakat, sementara kebutuhan hidup terus berjalan dan meningkat.
7. Perubahan bentang alam: Pasca gempa, tsunami dan likuifaksi telah merubah bentang alam secara permanen. Sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan, ruang hidup, sosial serta keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.

Dikepung asap kebakaran hutan dan lahan dari Morowali, Sulawesi Barat, Kalimantan, Papua, dan Maluku, kualitas udara di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mencapai kondisi terburuk dalam beberapa bulan terakhir. Konsentrasi PM 2,5 sempat mencapai 206 mikrogram, jauh di atas ambang sehat 15,5 mikrogram.[60] Sebelumnya, terjadi kebakaran di Desa Lemboroma, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara pada 20 Oktober 2026 yang menghanguskan sekitar 15 hektare lahan dan menyebabkan sejumlah warga mengalami kerugian materiil.[61] Karhutla juga melanda kawasan Puncak Ranindi, Desa Berdikari, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menghanguskan sekitar 60 ha kawasan hutan lindung sejak 19 Oktober 2026.[62] Selain di Morowali dan Sigi, karhutla juga melanda Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah di mana sekitar 100 ha area yang didominasi padang ilalang dan kawasan hutan pinus terbakar.[63]

60 Ayu, S. R. (2026). Kualitas Udara Palu Memburuk, PM 2,5 Tembus 206 akibat Kepungan Asap Karhutla. Kompas.com. https://www.kompas.id/artikel/kualitas-udara-palu-memburuk-pm25-tembus-206-akibat-kepungan-asap-karhutla
61 Karama.id. (2026). Polres Morowali Utara Tetapkan Tersangka Karhutla, 15 Hektare Lahan Terbakar. https://karama.id/hukum-kriminal/polres-morowali-utara-tetapkan-tersangka-karhutla-15-hektare-lahan-terbakar/
62 Yunus, M. (2026). BNPB: 60 hektare hutan terbakar di Palolo Sigi. Suara.com. https://sulsel.suara.com/read/2026/10/21/155210/bnpb-60-hektare-hutan-terbakar-di-palolo-sigi
63 Amalia, F. (2026). Karhutla di Poso Hanguskan 100 Hektare Lahan, Polisi Sisir Kawasan Lembah Napu. Tribun News. https://palu.tribunnews.com/sulteng/195817/karhutla-di-poso-hanguskan-100-hektare-lahan-polisi-sisir-kawasan-lembah-napu



(Kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dan kondisi udara yang didominasi asap di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Napu (2026). ***Sumber:*** SP Palu)

> *"Kebakaran hutan dan lahan serta kemarau berkepanjangan yang terjadi di Napu semakin menambah beban perempuan. Menurunnya kualitas tanaman dan meningkatnya pangan keluarga. Kabut asap yang berlangsung berkepanjangan ini juga mengancam kesehatan, terutama perempuan, anak-anak dan lansia yang mengalami gangguan pernapasan. Perempuan pun harus melakukan upaya tambahan untuk melindungi diri dan keluarganya, termasuk menyiapkan masker saat beraktivitas di luar rumah."* ***- Perempuan di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah***

Selain Karhutla, aktivitas pertambangan di Kota Palu dan wilayah Sulawesi Tengah perlu dilihat sebagai bagian dari persoalan tata kelola sumber daya alam, ekspansi industri ekstraktif, dan ketimpangan penguasaan ruang hidup. Di Kota Palu, perhatian perlu diarahkan pada aktivitas pertambangan batuan atau galian C di Watusampu dan Buluri serta pertambangan emas di Poboya. Sementara itu, ekspansi pertambangan dan industri pengolahan nikel di Morowali.

Persoalan pertambangan galian C di Watusampu dan Buluri mencakup potensi kerusakan bentang alam, debu, gangguan terhadap sumber air, serta risiko banjir yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan lingkungan. Banjir yang melanda kedua kelurahan pada Mei 2026 menjadi alasan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di sekitar wilayah terdampak. Untuk pertambangan emas di Poboya, persoalan yang perlu dikaji meliputi perubahan bentang alam, penggunaan air, metode pengolahan emas, serta potensi pencemaran tanah dan air. Pemeriksaan perlu mencakup penggunaan bahan kimia, termasuk merkuri atau sianida apabila digunakan dalam proses pengolahan, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Penilaian harus didasarkan pada data pemantauan

lingkungan dan investigasi lapangan, bukan semata-mata asumsi mengenai dampak pertambangan.

Solidaritas Perempuan Palu selama bertahun-tahun telah mengadvokasi dampak industri nikel di Morowali, telah menguak fakta lapangan mengenai kerusakan ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan sebagai persoalan yang berkaitan dengan tindakan perusahaan serta pembiaran oleh pemerintah. Perempuan yang bergantung pada sumber daya alam menghadapi risiko kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan masyarakat dan lingkungan.[64] Pada Juli 2025, Solidaritas Perempuan Palu bersama Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) juga meluncurkan hasil penelitian *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) mengenai dampak PLTU captive terhadap kehidupan perempuan di Desa Fatufia dan Desa Labota, Kabupaten Morowali. Penelitian ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pengumpulan pengetahuan mengenai dampak industri pengolahan nikel terhadap kehidupan mereka.

Bagi perempuan, karhutla dan berbagai bencana yang telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan telah menjadi pemicu terpinggirkan perempuan dari ruang-ruang strategisnya. Perempuan kehilangan mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, menjadi disabilitas karena bencana. Perempuan mengalami pemiskinan secara karena pendanaan pemulihan pasca bencana umumnya didominasi oleh laki-laki. Perempuan berusaha membangun kemandirian ekonomi dengan sumber daya yang terbatas, menjadi buruh serabutan, pemulung hingga menjadi buruh migran ke luar negeri. Pekerjaan ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kewajiban di domestik seperti mencukupi pangan keluarga, memenuhi tanggung jawab terhadap anak dan orang tua. Bencana yang telah menghancurkan ruang penghidupan mereka, memaksa perempuan menjadi petarung untuk menyambung kehidupan. Mereka menggali pengetahuan juga kearifan lokal yang hancur oleh bencana. Mereka secara perlahan mulai bergerak dan secara kolektif untuk memanfaatkan potensi yang ada seperti pisang, kopi, kelor, kelapa dan hasil laut untuk dikembangkan menjadi usaha produktif kelompok.

SP Sintuwu Raya Poso

Poso merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini memiliki luas daratan mencapai 7.112,25 km². Secara astronomi berada diantara 1°06'44"–2°12'53" Lintang Selatan (LS) dan 120°05'–120°52' Bujur Timur (BT) dengan topografi Sebagian besar didominasi oleh pegunungan, dataran tinggi, serta memiliki perairan luas seperti Danau Poso dan pesisir pantai di Teluk Tomini dengan ketinggian rata-rata di atas 500 meter dari permukaan laut. Masyarakat di Poso hidup dalam kemajemukan dan saling berdampingan antar agama seperti Kristen, Islam dan Hindu. Poso memiliki lahan yang subur baik di dataran rendah maupun area pegunungan yang sangat potensia di

64 Benua Indonesia. (2024). Cerita perempuan terdampak proyek hilirisasi nikel di Morowali. Benua Indonesia. https://benua.id/cerita-perempuan-terdampak-proyek-hilirisasi-nikel-di-morowali/

kembangkan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat dan peternak. Kabupaten ini berbatasan dengan Sebelah Utara Teluk Tomini dan Kabupaten Parigi Moutong; Sebelah Timur Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Sebelah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sebelah Barat Kabupaten Sigi.

Namun, bencana telah berdampak pada rusaknya infrastruktur, korban jiwa, dan mengganggu aktivitas warga karena kebakaran hutan dan lahan. *Detik Sumsel* pada 13 September 2026 memberitakan bahwa kebakaran telah menghanguskan sekitar 50 hektare lahan di Kabupaten Poso, yang terdiri dari 20 hektar perkebunan dan 30 hektar lahan gambut. Kebakaran ini juga membakar 9 ruang belajar. Kebakaran ini dipicu oleh cuaca panas dan angin kencang di tengah dampak fenomena El Nino. Selain itu, pada 20 September 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Desa Tampemadoro, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kebakaran ini menjalar hingga kawasan permukiman masyarakat yang menyebabkan sedikitnya 15 ha lahan perkebunan serta dua unit rumah terbakar.[65]



(Kebakaran di hutan dan lahan masyarakat Desa Tampemadoro (2026).
Sumber: SP Sintuwu Raya Poso)

> *"Karhutla sangat mengganggu aktivitas masyarakat Tampemadoro. Proses kebakaran hutan itu ketika malam sampai subuh kebakarannya lebih besar sehingga saya merasa ini tidak masuk akal, kebakaran hutan ini seperti disengaja. Saya sebagai perempuan mengapresiasi masyarakat yang berinisiatif dan bersolidaritas memadamkan api. Ada sebagian lahan masyarakat yang sudah terbakar kurang lebih 15 ha dan yang berada di daerah padi ladang sekitar 10 kk, dan 2 bagunan rumah yang dihuni oleh perempuan. Dan ini tentunya sangat memprihatinkan, terkhusus bagi perempuan, ruang amannya terganggu, psikis dan mental apalagi. Saya melihat dampak dari kebakaran hutan ini sebagai perempuan ini adalah beban kemiskinan bagi perempuan di mana mengurangi pendapatan harian dan bulanan*

65 Husna, R. (2026). Karhutla di Poso menjalar ke permukiman, dua rumah dan 15 hektare lahan terbakar. AFU.id. https://afu.id/nusantara/karhutla-di-poso-menjalar-ke-permukiman-dua-rumah-dan-15-hektare-lahan-terbakar

serta kerugian secara tahunan dari hilangnya dan terbakarnya tumbuhan yang telah ditanam dan dirawat." - ***Perempuan di Desa Tampemadoro, Poso, Sulawesi Tengah***

Di sisi lain, proyek PLTA Poso Energy juga menjadi penyebab bencana yang memiskinkan masyarakat termasuk perempuan. Pembangunan PLTA Poso energi dimulai pada tahun 2003, dengan kapasitas 515 MW dan diresmikan pada 25 Februari 2022 oleh Presiden Joko Widodo. PLTA Poso Energy telah merampas ruang hidup masyarakat termasuk perempuan dan meninggal penderitaan yang tak berkesudahan. Pada saat uji coba pintu air pada Bulan April hingga Desember 2020 telah menenggelamkan sawah dan padang penggembalaan petani Desa Meko Kecamatan Pamona Barat seluas 96 hektar yang berada disekitar danau Poso akibat luapan danau poso karena permukaan airnya naiknya setinggi 50 sentimeter dan 148 petani kehilangan sumber mata pencaharian utama mereka.[66] Sejak uji coba pintu air ini, permukaan selalu meningkat yang menenggelamkan sawah masyarakat. Petani mengalami kerugian karena sawah tidak bisa dikerjakan karena terendam.



(Proyek PLTA Poso Energy 2. ***Sumber***: Muh Azwar)

66 Litha, Y. (2021). Petani Poso Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Pembangunan Bendungan PLTA Poso 1. Voa Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/petani-poso-kehilangan-mata-pencaharian-akibat-pembangunan-bendungan-plta-poso-1/6260791.html

Pembangunan PLTA Poso Energy telah menjadi bencana ekologis bagi masyarakat karena pembangunannya telah menghancurkan ruang-ruang hidup masyarakat melalui aktivitas yang mereka lakukan merusak bentang alam dan mendatangkan bencana dan merampaskan ruang hidup masyarakat, terutama merugikan masyarakat desa yang berdomisili di sekitar danau Poso. Pembangunan PLTA Poso, telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem, sosial, ekonomi dan budaya. Proyek PLTA Poso energy telah berdampak pada berbagai aspek :

1. Lingkungan dan ekosistem melalui : Penurunan permukaan air danau. Pengerukan saluran air danau telah menyebabkan permukaan danau Poso turun secara permanen dan mengubah pola pasang surut alami danau dan Merusak habitat biota dan mengancam kepunahan ikan endemik yang ada di danau Poso seperti Sidat, udang dan mollusca. PLTA Poso energy juga mengganggu migrasi Ikan: Bendungan menghalangi jalur migrasi ikan sidat (*masapi*) dari danau menuju laut untuk bertelur.
2. Sosial dan ekonomi, telah menyebabkan terendamnya lahan pertanian, kebun dan lahan penggembalaan masyarakat serta hilangnya mata pencaharian nelayan karena pengerukan sungai merusak keramba dan alat tangkap tradisional nelayan. Hal ini akan berdampak pada menurunya kesejahteraan menyebabkan Sebagian warga terlilit hutang dan anak-anak putus sekolah
3. Menghancurkan nilai-nilai budaya masyarakat dan mencerabut masyarakat dari akar budayanya. Pengerukan danau dan Sungai mengancam tradisi penangkapan ikan tradisional Mosango dan budaya Wayan Masapi[67]di paksa mati, padahal tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu
4. Rumah masyarakat dan rumah ibadah di Desa Sulewana mengalami keretakan dan tidak bisa ditempati karena pengerukan Sungai oleh PLTA Poso energy

Proyek ekstraktif berkedok transisi energi yang dilakukan oleh PLTA Poso Energy telah melahirkan rantai kemiskinan struktural khususnya bagi perempuan, karena dalam pandangan budaya patriarki perempuan dibebankan dengan tanggung jawab domestik yang berkaitan dengan pemenuhan pangan dan pemeliharaan keluarga. Pemiskinan terhadap perempuan diciptakan oleh negara secara terstruktur, demi investasi dan kapitalis. Sumber-sumber penghidupannya sudah di jadi milik PLTA Poso Energy. Perempuan tidak punya lahan lagi untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan pangan. PLTA Poso Energy bukan hanya menghancurkan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya mereka tapi juga menghancurkan pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh perempuan, baik dalam budidaya pertanian, obat-obatan dan budaya kolektif lainnya.[68]

67 Wayanmasapi atau pagar masapi adalah alat tangkap ikan sidat tradisional masyarakat sekitar Danau Poso yang terbuat dari bambu yang disusun berjajar panjang di tengah danau. Cara tangkap ikan itu sudah ada sejak ratusan tahun dan menjadi ikon budaya Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso.

68 Amelia, Icut, A., Sani, F. F., Rina, Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025). Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di semenanjung bagian selatan Pulau Sulawesi. Terletak antara 0°12'–8° Lintang Selatan (LS) dan 116°48'–122°36' Bujur Timur (BT). Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. BPS Provinsi dengan luas 45.323,98 km² memiliki jumlah penduduk sekitar 9,66 juta jiwa.[69] Provinsi ini terbagi atas 3 lanskap :

1. Dataran rendah, dengan ketinggian 0 – 400 mdpl terletak di sepanjang pesisir Pantai dan Lembah Sungai. Meliputi wilayah pesisir barat (Selat Makassar) hingga pesisir timur (Teluk Bone)
2. Dataran tinggi, dengan ketinggian 400 – 1.000 mdpl, yang tersebar di beberapa kabupaten bagian tengah dan utara, contohnya dataran tinggi Tana Toraja dan Malino Kabupaten Gowa
3. Pegunungan, dengan ketinggian >1.000, terbentuk dari aktivitas tektonik kompleks, contohnya gunung Rantemario (3.470 mdpl) dan gunung Lompobattang (2.871 mdpl)

Resiko bencana yang mengancam masyarakat di Sulawesi Selatan meliputi :

1. Banjir bandang, daerah yang rentan meliputi Kota Makassar, Kabupaten Wajo, Luwu Utara, Gowa, dan Maros akibat curah hujan tinggi serta alih fungsi lahan penampungan air
2. Tanah longsor, sering melanda wilayah dengan topografi berbukit dan lereng terjal seperti Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, dan Sinjai.
3. Angin kencang dan puting beliung, tersebar merata di berbagai daerah terbuka dan wilayah pesisir
4. Kebakaran hutan dan lahan, Menjadi ancaman saat periode hidrometeorologi kering, seperti yang terpantau di beberapa titik lahan di Maros, Enrekang, Parepare, dan Palopo
5. Gelombang ekstrim dan abrasi, resiko di wilayah kepulauan dan pesisir seperti Kabupaten Takalar, Kepulauan Pangkep, dan Kepulauan Selayar

Sepanjang tahun 2026, bencana di Sulawesi Selatan didominasi oleh kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta banjir dan cuaca ekstrem :

1. Kekeringan dan krisis air bersih, yang pada bulan September di Kota Makassar dan Sinjai
2. Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) pada bulan September 2026 di Maros dan Gowa
3. Banjir dan longsor pada bulan Mei 2026 di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Bone
4. Peringatan dini cuaca ekstrem pada bulan September 2026, BMKG Wilayah IV Makassar mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem, angin kencang, udara panas, serta gelombang tinggi mencapai 2,5 meter di

69 Data terbaru BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

perairan Pangkep, Makassar, dan Jeneponto hingga pertengahan September 2026.

Kekeringan dampak bencana ini dirasakan oleh 8 kecamatan dan 58 kelurahan bagi 26.888 kepala keluarga di Makassar dan 314 hektare lahan persawahan di Kecamatan Sinjai Barat mengalami kekeringan akibat kurangnya pasokan air irigasi. Sementara banjir di kabupaten Luwu yang melanda 4 desa telah merendam puluhan rumah dan merusak sawah dan di Bone melanda 5 kecamatan merendam pemukiman warga dan menyebabkan dua orang meninggal dunia. BNPB Maros, pada Februari 2026 mencatat hujan lebat dan angin kencang menyebabkan banjir dan longsor menyebabkan 4000 kepala keluarga terdampak banjir di 14 kecamatan. Sementara itu di Makassar, ada kurang lebih 2.164 jiwa yang terdampak dari 4 kecamatan.

Selain korban jiwa, bencana sepanjang 2025 juga berdampak besar pada kerusakan fisik. BPBD tahun 2025 mencatat 11.676 rumah dan 11.878 sarana umum mengalami kerusakan, mulai dari fasilitas pendidikan (91 unit), tempat ibadah (51 unit), fasilitas kesehatan (24 unit), perkantoran (36 unit) hingga infrastruktur jalan sepanjang 4.969,5 meter dan 40 jembatan rusak. Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan Menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan Tahun 2023 memiliki tutupan hutan sekitar 1.359.039 Ha atau 29,70% dari luas provinsi. Tutupan hutan dibawah 30% menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang masuk dalam kategori kritis. Hal ini terjadi karena masifnya izin pertambangan di wilayah hulu atau kawasan hutan, alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pembangunan. Tercatat dari 139 DAS yang ada di Sulawesi Selatan hanya sekitar 38 DAS yang masuk dalam kategori sehat karena memiliki tutupan hutan di atas 30%.[70] Banjir, longsor dan alih fungsi lahan merupakan salah penyebab utama masyarakat kehilangan dan merusak lahan produktif, yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian ekonomis dan tidak bisa bergantung lagi pada sektor agraris.

Perempuan adalah entitas yang paling terdampak akibat bencana ini. Mereka mengalami beban berlapis karena tanggung jawab domestiknya. Perempuan dipaksa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga bertanggung jawab pada beban perawatan dan pengasuhan keluarganya. Sementara perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara akses terhadap bantuan umumnya didominasi oleh laki-laki.

Bencana alam dan krisis ekologis yang terjadi di Sulawesi Selatan, secara perlahan mengikis pengetahuan lokal dan kearifan tradisional perempuan dalam mengelola alam. Beberapa bentuk pengetahuan perempuan yang rentan hilang akibat rentetan bencana alam[71]:

70 WALHI Sulsel. (2025). Bencana terus berulang, WALHI Sulawesi Selatan beberkan penyebabnya. WALHI Sulawesi Selatan. https://walhisulsel.or.id/4604-bencana-terus-berulang-walhi-sulawesi-selatan-beberkan-penyebabnya/
71 WALHI Sulawesi Selatan. (2026). Catahu 2025 region Sulawesi: Ragam perlawanan perempuan Sulawesi melindungi, menjaga hutan hujan. WALHI Sulawesi Selatan. https://walhisulsel.or.id/4863-catahu-2025-region-sulawesi-ragam-perlawanan-perempuan-sulawesi-melindungi-menjaga-hutan-hujan/
Fajar, J. (2017). Perempuan Pesisir Perkotaan Rentan Terdampak Perubahan Iklim. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2017/12/19/perempuan-pesisir-perkotaan-rentan-terdampak-perubahan-iklim/

1. **Pengetahuan Pengelolaan pangan dan Tanaman obat (Etnobotani),** Ketika hutan mengalami deforestasi atau wilayah pertanian hancur akibat longsor, akses perempuan terhadap tanaman herbal dan teknik diversifikasi pangan lokal menjadi terputus. Generasi muda kehilangan kesempatan untuk mempelajari cara membaca tanda-tanda alam dari ibu mereka melalui pemanfaatan tanaman liar untuk ketahanan pangan saat krisis
2. **Manajemen air bersih tradisional dan perlindungan pesisir**, Kerusakan ekologis akibat cuaca ekstrem, rob, dan industri ekstraktif memaksa perempuan menghabiskan waktu lebih banyak hanya untuk mencari air bersih. Ruang dan waktu mereka untuk mempraktikkan serta mewariskan sistem tata kelola air dan wilayah pesisir yang berkelanjutan menjadi hilang karena tergerus oleh beban domestik pascabencana
3. **Kearifan lokal mitigasi bencana berbasis komunitas**, Masyarakat adat seperti **Suku Kajang di Sulawesi Selatan** memiliki prinsip hidup *"Kamase-masea"* (hidup sederhana dan menjaga keseimbangan alam). Di berbagai komunitas, perempuan sering kali memegang kendali atas penyimpanan logistik (seperti lumbung padi) dan mendeteksi tanda alam dari perilaku hewan. Ketika bencana memaksa masyarakat mengungsi ke hunian sementara yang tidak ramah gender, pola relasi sosial ini rusak. Kurangnya pelibatan perempuan dalam forum formal Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat desa membuat perspektif dan kepekaan naluri perempuan dalam melindungi generasi penerus seringkali terabaikan dan tidak terdokumentasikan
4. **Pengetahuan kolektif wilayah hutan dan adat**, Perempuan adat mengandalkan hutan sebagai ruang hidup untuk meramu, menenun, dan ritual adat. Bencana alam yang diperparah oleh konflik lahan memicu erosi pengetahuan ruang kelola perempuan. Ketika mereka kehilangan akses fisik ke hutan, istilah lokal, fungsi ritual, serta metode pelestarian hutan hujan yang biasanya diwariskan secara lisan dari ibu ke anak perempuan ikut punah.

> *"Sebagai perempuan komunitas, ketika bencana datang pasti kamilah yang mengalami beban berlapis. Kami menolak pembangunan yang mengorbankan alam demi keuntungan segelintir pemilik modal. Pembangunan bukanlah kemajuan jika merusak lingkungan dan mengorbankan rakyat. Suara perempuan harus didengar, ruang hidup masyarakat harus dilindungi"* - ***Perempuan Pengelola Cambaya, Makassar, Sulawesi Selatan.***

Perempuan merupakan entitas yang tangguh dalam situasi bencana. Mereka akan segera pulih dan bangkit untuk melindungi keluarganya dalam situasi sulit, begitu juga

Zamroni, M. (2025). Suku Kajang dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Tunas Hijau ID. https://tunashijau.id/suku-kajang-dan-kearifan-lokal-dalam-mitigasi-bencana/
Vun, J., Widjarnarso, T. H., & Sari, K. (2022). Melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dalam situasi pascabencana di Sulawesi Tengah, Indonesia. Bank Dunia. World Bank Blogs https://blogs.worldbank.org/in/eastasiapacific/melindungi-perempuan-dan-anak-anak-perempuan-dalam-situasi-pascabencana-di-sulawesi

saat terjadi bencana. Inisiatif-inisiatif mereka paksa lahirkan untuk membangun kemandirian. Melihat potensi yang bisa dikembangkan sebagai usaha produktif yang akan menopang kehidupan mereka dan bisa dikelola secara kolektif.

SP Kendari

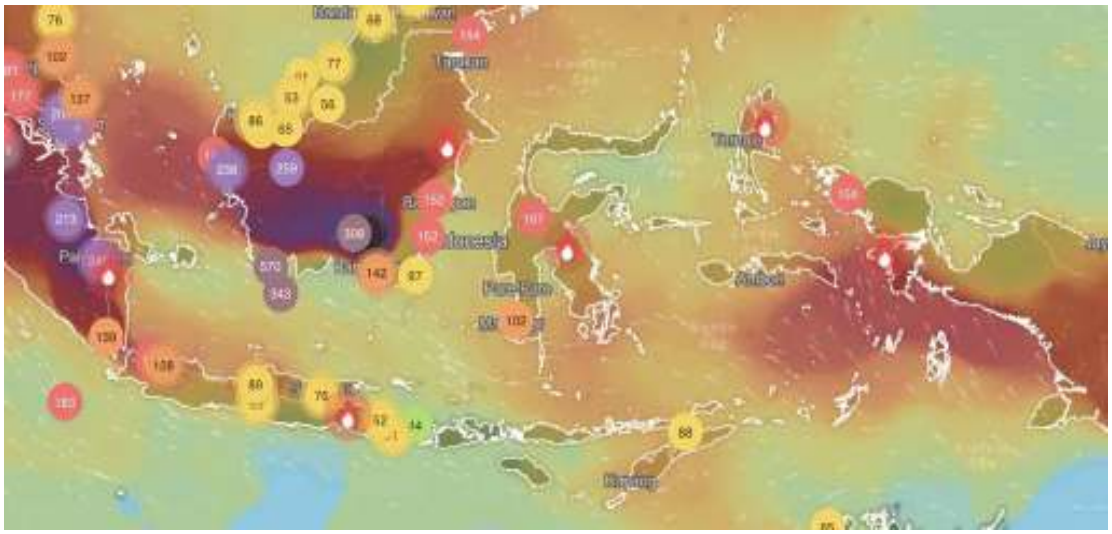
Kondisi Geografis dan Topografi Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis, wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada koordinat 3°54'40"–4°5'05" Lintang Selatan dan 122°26'33"–122°39'14" Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas daratan sekitar 38.140 km² dan wilayah perairan laut sekitar 110.000 km², dengan jumlah penduduk mencapai 2.848.747 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah barat, Laut Flores di sebelah selatan, serta Laut Banda di sebelah timur. Posisi geografis tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah yang memiliki karakteristik daratan, pesisir, dan kepulauan, sekaligus memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem laut dan sumber daya pesisir.

Dari segi topografi, sekitar 74% wilayah daratan Sulawesi Tenggara didominasi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan yang bergelombang serta sebagian ditutupi hutan tropis alami. Kondisi ini membentuk karakteristik bentang alam yang beragam dan berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan, pengelolaan sumber daya alam, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain kawasan pegunungan dan perbukitan, Sulawesi Tenggara memiliki dataran rendah dan dataran aluvial yang umumnya tersebar di wilayah pesisir serta lembah-lembah sungai. Beberapa di antaranya adalah dataran aluvial Mowewe, Ladongi, dan Lainea. Kawasan ini berpotensi mendukung kegiatan pertanian, permukiman, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, dengan Kabupaten Konawe disebut sebagai salah satu wilayah yang berisiko tinggi. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini meliputi gempa bumi, banjir dan banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor. Berbagai bencana tersebut menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan, serta mengancam keberlanjutan penghidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada Mei 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara melaporkan bahwa banjir yang melanda wilayah setempat menyebabkan 657 unit rumah terendam dan sekitar 2.985 jiwa terdampak. Sementara itu, banjir yang melanda 13 desa di Kecamatan Andowia dan Asera berdampak pada 1.812 jiwa dan 1.252 rumah, serta merendam lahan pertanian dan empang seluas 3,4 hektare serta SDN 06 Andowia. Dampak banjir juga dirasakan pada sektor pertanian. Sekitar 151 hektare lahan sawah di Kendari dilaporkan mengalami gagal panen akibat banjir pada Mei 2026. Selain itu, puluhan hektare lahan pertanian milik warga terendam air keruh dan lumpur, yang berpotensi menurunkan kesuburan tanah dan produktivitas lahan dalam jangka

pendek. Cuaca ekstrem dan hujan berintensitas tinggi juga meningkatkan risiko erosi dan tanah longsor di sejumlah titik rawan, sehingga memperparah degradasi lahan.

Baru-baru ini, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Papua terus meluas di sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari.[72] Dampak kabut asap yang kian pekat membuat aktivitas di luar ruangan harus dibatasi, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan lansia. Di Kendari, sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak 16 Oktober 2026 agar tidak ada aktivitas anak-anak di luar ruang yang terpapar asap. Berdasarkan pantauan kualitas udara melalui situs IQair.com pada 16 Oktober 2026, angka PM 2,5 di Kendari terpantau tidak sehat.



(Pantauan kualitas udara di Indonesia yang tidak sehat (2026). ***Sumber:*** IQair.com)

72 Yunus, S. R. (2026). Kabut Asap Terus Meluas di Sulawesi, Kendari Terapkan PJJ, Makassar Waspadai ISPA. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/kabut-asap-terus-meluas-di-sulawesi-kendari-terapkan-pjj-makassar-waspadai-ispa



(Kondisi Kota Kendari yang diselimuti asap (2026). ***Sumber:*** SP Kendari)

"Ketika asap menyelimuti Kota Kendari, kami sebagai perempuan dan ibu merasa khawatir terhadap kesehatan anak-anak dan keluarga. Kami membutuhkan udara bersih, informasi yang jelas dan perlindungan kesehatan yang mudah diakses. Kami ingin lingkungan pesisir yang sehat dan aman. Bencana asap bukan hanya persoalan udara, tetapi juga persoalan hak masyarakat untuk hidup sehat, bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa rasa takut. Kami menuntut pemerintah memastikan pencegahan karhutla atau bencana asap atas perlindungan kesehatan, keterbukaan informasi kualitas udara, serta pelibatan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan penanggulangan bencana, seperti memastikan layanan pemeriksaan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak ibu hamil, lansia dan warga dengan gangguan pernapasan seperti, sesak napas, batuk,sakit tenggorokan, pilek dan demam." ***- Perempuan akar rumput di Sodohoa, Kendari***

Kami perempuan pesisir PKL Kel. Tipulu, membutuhkan lingkungan sehat dan aman untuk hidup bekerja dan membesarkan anak-anak kami. Ketika bencana asap terjadi kesehatan dan penghidupan keluarga harus menjadi perhatian dari pemerintah perlu memastikan perlindungan kesehatan, informasi kualitas udara yang terbuka serta kebijakan udara yang terbuka, serta kebijakan penanggulangan bencana yang melibatkan suara perempuan. Kemudian kalau soal mata pencaharian ibu-ibu PKL pesisir, mereka mengalami ketika turun ke laut karena kabut asap itu menyelimuti langit yang tadinya biru sekarang sudah dikepung oleh asap di langit. Ketika turun ke laut,

penglihatan nelayan melaut dari jarak pandang dengan adanya asap kabut sehingga pendapatan kami menurun." - ***Perempuan akar rumput di Tipulu, Kendari***

Catatan kritis beberapa organisasi dan media menunjukan bahwa Bencana alam dan krisis ekologis yang terjadi Sulawesi Tenggara ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama perempuan karena terjadi peningkatan beban[73]:

- Bertambahnya beban kerja domestik: mencari air bersih, memasak, dan mengurus keluarga yang dibebankan pada perempuan. Setelah kembali ke rumah, perempuan dituntut untuk membersihkan rumah dan peralatan rumah tangga, merawat anggota keluarga yang sakit dan melanjutkan kerja perawatan dalam situasi yang belum pulih
- Beban ganda: Bukan hanya bertahan dalam bencana, tapi perempuan juga harus bertahan dan menjaga anggota keluarga lainnya di tengah keterbatasan fasilitas. Mereka harus memastikan anak–anak dalam kondisi aman, merawat lansia, memasak, dan mengatur kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan.
- Krisis ekonomi dan pangan: Menurunnya pendapatan keluarga akibat bencana memaksa perempuan mencari cara tambahan untuk bertahan hidup di tengah kelangkaan sumber daya.
- Minimnya akses sanitasi dan kesehatan: fasilitas umum yang ada sangat tidak ramah terhadap perempuan, misalnya MCK dan shelter juga fasilitas lainnya yang tidak disediakan khusus bagi perempuan yang berpotensi untuk terjadinya kekerasan seksual.

Di Sulawesi Tenggara, risiko bencana dan krisis ekologis tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola ruang, perubahan fungsi lahan, serta ekspansi industri ekstraktif yang menekan daya dukung lingkungan. Pada 2024, terdapat 174 izin pertambangan nikel aktif di Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas 172 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dua Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).[74] Jumlah tersebut setara dengan sekitar 45,08% dari total izin pertambangan nikel aktif di Indonesia pada tahun yang sama.

Besarnya aktivitas pertambangan ini menunjukkan skala tekanan pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam di provinsi tersebut. Di sektor perkebunan, luas areal kelapa sawit di Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 21.396 hektar pada 2024.[75] Dimana aktivitas pertambangan dan perubahan fungsi lahan dapat meningkatkan tekanan terhadap hutan, tanah, sumber air, pertanian, dan ekosistem pesisir yang membuat daya tampung dan daya dukung lingkungan mengalami degradasi dan memicu percepatan krisis iklim dan bencana ekologi. WALHI Sulawesi Tenggara pernah melaporkan sekitar 640.000 hektare kawasan hutan dan lahan berada dalam penguasaan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit, berdasarkan pemberitaan

73 Catatan Akhir Tahun Walhi 2025, Kajian Resiko Bencana Nasiona Provinsi Sulawesi Tenggara, Kajian resiko kerentan dan resiko iklim sulawesi Tenggara, UNFPA dan Kompas 22 Desember 2025)
74 Ridwan, A. (2025). 45% izin tambang nikel RI berada di Sulawesi Tenggara pada 2024. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/statistik/691a8d3e87cea/45-izin-tambang-nikel-ri-berada-di-sulawesi-tenggara-pada-2024
75 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2025). Statistik perkebunan kelapa sawit Sulawesi Tenggara, tahun 2024. Sistem Informasi Manajemen Data (SIMDATA). https://simdata.sultraprov.go.id/detail-tabel/tabel_74_328/2024

Mongabay pada Juni 2019. Angka tersebut merupakan estimasi historis gabungan konsesi tambang dan sawit, bukan luas perkebunan sawit saja. Dalam laporan yang sama, kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan untuk pertambangan serta perkebunan disebut sebagai faktor yang memperburuk banjir di Konawe Utara.[76]

Di Sulawesi Tenggara, data yang dikutip dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan berkaitan dengan kehilangan sekitar 25.400 hektare tutupan hutan pada periode 2001–2024. Sementara itu, penelitian yang diterbitkan dalam Analisis Kebijakan Pertanian pada 2025 menemukan bahwa aktivitas pertambangan nikel di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, menyebabkan gangguan terhadap usaha tani melalui alih fungsi lahan dan pencemaran sumber air irigasi. Penelitian tersebut memperkirakan kerugian ekonomi petani mencapai Rp498 juta per tahun pada lokasi studi.[77]

Hilangnya sumber penghidupan juga memperbesar beban ekonomi dan kerja perawatan perempuan. Ketika hasil pertanian dan perikanan menurun, perempuan harus mencari alternatif pendapatan sekaligus memastikan ketersediaan pangan, air, dan kebutuhan keluarga. Kerusakan lingkungan juga mengancam pengetahuan perempuan tentang benih, pangan, tanaman obat, dan pengelolaan sumber daya alam yang diwariskan antargenerasi. Karena itu, dampak bencana tidak berakhir ketika air surut atau rumah dibangun kembali, tetapi berlanjut selama sumber penghidupan, ekosistem, dan pengetahuan komunitas belum pulih.

Meskipun menghadapi tekanan tersebut, perempuan bersama komunitas dan jaringan masyarakat sipil terus memperjuangkan perlindungan ruang hidup dan keadilan ekologis. Namun, suara perempuan masih kerap tersisih dari pengambilan keputusan pembangunan dan penanganan bencana. Pemulihan harus mencakup bukan hanya infrastruktur, tetapi juga sumber penghidupan, ekosistem, pengetahuan lokal, dan kedaulatan perempuan atas ruang hidupnya. Perempuan perlu dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam perencanaan tata ruang, pengawasan industri, mitigasi bencana, serta pemulihan pascabencana.

Pengalaman dari 12 komunitas Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa dampak bencana ekologis terhadap perempuan berlangsung berlapis, lintas waktu, dan berkaitan erat dengan hilangnya ruang hidup, sumber penghidupan, serta akses terhadap sumber daya alam. Ketika tanah, hutan, kebun, lahan pertanian, sungai, laut, dan pesisir rusak atau hilang, perempuan kehilangan ruang untuk bekerja, memenuhi kebutuhan pangan, dan mempertahankan kehidupan keluarganya. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dalam konteks meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. Pada 2025, bencana di Indonesia didominasi oleh banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Data BNPB mencatat 2.009 kejadian banjir, 1.329 kejadian karhutla, 958 kejadian cuaca ekstrem, dan 330 kejadian tanah

76 Kamarudin. (2019). Lingkungan Rusak Picu Bencana di Sulawesi Tenggara. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu-bencana-di-sulawesi-tenggara/
77 Sidik, B. (2025). Dalam jangka panjang, investasi pertambangan berpotensi mendegradasi lingkungan dan menurunkan kualitas pembangunan. Perpustakaan DPR RI. https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/20092

longsor. Secara keseluruhan, bencana menyebabkan 1.666 orang meninggal, 214 orang hilang, 6.799 orang luka-luka, serta 12,11 juta orang masuk dalam kategori menderita dan mengungsi. Kerusakan mencakup 281.199 rumah, 3.642 fasilitas, serta 1.343 kantor dan jembatan.[78] Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat.

Sedangkan karhutla, hingga 15 Oktober 2026, luas kumulatif lahan terbakar mencapai sekitar 202.000 hektare. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan pada 20 Oktober 2026 mencatat 314.124 kasus ISPA selama periode 20 Agustus–20 Oktober 2026 di wilayah terdampak karhutla. Angka tersebut mencakup 70.890 kasus pada anak usia 0–5 tahun dan 243.234 kasus pada penduduk berusia di atas lima tahun.[79] Sebelumnya, pada 21 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari tiga juta penduduk terpapar langsung kabut asap di 37 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.[80]

Table.1. *Data kasus berdasarkan umur dan jenis kelaim; Sumber Kementerian Kesehatan ;2026*

Provinsi	Usia		Jenis Kelamin	
	0-5 tahun	> 5 tahun	Perempuan	Laki-Laki
Sumatera Selatan	18.747 kasus	63.430 kasus	44.099 kasus	38.078 kasus
Kalimantan Selatan	18.160 kasus	60,734 kasus	43.753 kasus	35.151 kasus
Kalimantan Barat	11,667 kasus	44.019 kasus	29.848 kasus	25.838 kasus
Riau	8.646 kasus	27.787 kasus	19.195 kasus	17.238 kasus
Kalimantan Tengah	5.133 kasus	21.607 kasus	14.496 kasus	12.244 kasus
Kalimantan Timur	6.982 kasus	20.706 kasus	14.980 kasus	12.708 kasus

Selain terjadi di tujuh provinsi tersebut, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mengalami eskalasi penyebaran yang terdeteksi di sejumlah provinsi lainnya, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Karhutla juga terdeteksi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Barat, serta di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.[81]

Berdasarkan Data BNPB paa November 2025 menyebutkan bahwa hingga 26 November 2025, kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai Rp22,8

78 Ridwan, A. (2026). Banjir dan karhutla, bencana terbanyak di Indonesia sepanjang 2025. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/699fbe3bdc44a/banjir-dan-karhutla-bencana-terbanyak-di-indonesia-sepanjang-2025

79 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2026). Kemenko PMK koordinasikan perlindungan kesehatan dan pendidikan dari dampak karhutla. https://kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-koordinasikan-perlindungan-kesehatan-dan-pendidikan-dari-dampak-karhutla

80 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Antisipasi dampak karhutla, Kemenkes kerahkan nakes dan logistik ke 7 provinsi. https://kemkes.go.id/id/antisipasi-dampak-karhutla-kemenkes-kerahkan-nakes-dan-logistik-ke-7-provinsi

81 CNBC Indonesia. (2026). BMKG ungkap daftar wilayah RI dikepung asap karhutla 15 Oktober 2026. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20261015144828-37-776500/bmkg-ungkap-daftar-wilayah-ri-dikepung-asap-karhutla-15-oktober-2026

triliun, dengan 2.942 kejadian bencana tercatat pada saat itu. Angka ini merupakan estimasi yang dilaporkan pada tanggal tersebut, bukan angka final kerugian sepanjang 2025.[82] Sementara itu, rekapitulasi tahunan BNPB yang diberitakan Katadata mencatat kerusakan 281.199 rumah, 3.642 fasilitas, serta 1.343 kantor dan jembatan sepanjang 2025. Namun, statistik korban secara agregat belum menjelaskan berapa banyak perempuan, anak perempuan, perempuan hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain yang meninggal, terluka, mengungsi, kehilangan rumah, atau kehilangan sumber penghidupan melalui data terpilah. Dimana kerugian material yang tercatat belum mencakup seluruh biaya yang ditanggung perempuan dan masyarakat terdampak. Kehilangan lahan pertanian, tanaman pangan, ternak, usaha rumahan, hasil hutan, dan sumber air dapat menghilangkan pendapatan sekaligus kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sendiri. Tambahan biaya membeli air bersih, makanan, obat-obatan, transportasi, dan kebutuhan sanitasi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Kerugian tersebut perlu dihitung bersama kehilangan waktu akibat kerja perawatan yang meningkat, hilangnya pengetahuan lokal, dan rusaknya jaringan solidaritas komunitas. Jika hanya aset yang dimiliki secara formal atau kerugian usaha yang dihitung, kontribusi ekonomi perempuan dan biaya reproduksi sosial yang mereka tanggung berisiko tidak terlihat.

Dampak bencana tidak berhenti ketika banjir surut, api padam, atau rumah dibangun kembali. Kehilangan lahan produktif, rusaknya sumber air, menurunnya hasil pertanian dan perikanan, serta hilangnya akses terhadap hutan dan pesisir dapat mengurangi pendapatan keluarga dalam jangka panjang. Ketika sumber penghidupan terganggu, perempuan harus mencari alternatif pendapatan sekaligus menanggung peningkatan kerja domestik dan perawatan yang tidak dibayar. Mereka tetap bertanggung jawab memastikan ketersediaan pangan dan air, merawat anggota keluarga yang sakit, serta memenuhi kebutuhan keluarga di tengah sumber daya yang semakin terbatas. PBB menegaskan bahwa perempuan melakukan setidaknya 2,5 kali lebih banyak kerja domestik dan perawatan tidak berbayar dibandingkan laki-laki; beban ini dapat bertambah ketika bencana terjadi.[83]

Selain dampak kerugian ekonomi dan kerja perawatan berlapis, perempuan juga diperhadapkan pada paparan asap kebakaran dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, sesak nafas, serta memperburuk asma dan penyakit paru-paru maupun jantung yang telah ada. Partikel halus dalam asap dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Namun Ironisnya, pemerintah lamban memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya subjek rentan, pengalaman langsung dari perempuan akar rumput di Kalimantan tengah Hingga kini, mereka terpaksa bertahan dengan seadanya. Selama dua bulan terakhir, satu-satunya bantuan yang sampai warga datang inisiatif Solidaritas Peduli Perempuan Mamut Menteng, Palangka Raya.

82 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). BNPB Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Logpal bagi TRC PB di Wilayah Timur. https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-tingkatkan-kapasitas-pengelolaan-logpal-bagi-trc-pb-di-wilayah-timur
83 United Nations. (n.d.). Why women are key to climate action. https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/women

"*Sampai pada saat ini kami tidak pernah menerima bantuan apa pun, baik bantuan alat pemadaman maupun masker,"* **Lola Perempuan Kalimantan Tengah**

Seperti yang dialami oleh Ibu Riwun dan keluarganya di Desa Henda, Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit menyaksikan kebun karet yang menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya habis tanpa sisa dilalap si jago merah. Tak hanya kehilangan seluruh sumber pendapatan, Riwun bahkan dilarikan ke puskesmas setelah ambruk. Ia kelelahan dan ambruk lantaran paparan asap pekat saat berusaha memadamkan api di kebunnya.[84]

Ditengah bencana dan beban berlapis, perempuan tetap harus bekerja di luar rumah, mengurus kebutuhan keluarga, atau tinggal di dekat lokasi kebakaran, pembatasan aktivitas di luar ruangan tidak selalu mudah dilakukan. Ketika mereka tidak memiliki pilihan untuk berhenti bekerja, berpindah tempat tinggal, atau memperoleh perlindungan udara yang memadai, paparan dapat terus berlangsung. Beban tersebut semakin berat apabila perempuan menunda pemeriksaan karena biaya, jarak ke fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi, atau prioritas untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Kondisi ini dapat membuat kebutuhan kesehatan perempuan tidak tertangani dan tidak tercatat dalam data layanan kesehatan.

Rendahnya angka kasus ISPA yang dirilis oleh Kemenkes RI pada periode 20 Agustus - 20 Oktober 2026 tentunya patut untuk dipertanyakan, karena jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di enam provinsi prioritas penanganan Karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan yang mencapai 30 juta penduduk rasanya sulit untuk dipercaya, jika hanya 300 ribuan yang mengalami ISPA[85], dengan kondisi udara yang sangat berbahaya, apalagi selain wilayah prioritas hampir seluruh provinsi di Indonesia dan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapur, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam sudah terpapar kabut asap akibat Karhutla.

Kondisi ini semakin diperparah oleh terbatasnya infrastruktur dan kapasitas layanan kesehatan dalam merespons dampak karhutla di Kalimantan Tengah. Lonjakan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga tiga kali lipat menyebabkan fasilitas kesehatan, termasuk RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, mengalami tekanan dan kepadatan kapasitas yang signifikan.[86]

Situasi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi krisis kesehatan publik yang mengancam keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Paparan asap dan kabut beracun yang berlangsung terus-menerus memperbesar risiko gangguan kesehatan, terutama bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

84 Sinombor, S. H. (2026). Ruang Hidup Perempuan yang Terenggut Karhutla. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/ketika-karhutla-merampas-ruang-hidup-perempuan?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic
85https://tribratanews.polri.go.id/blog/kesehatan-7/kemenkes-catat-314-124-kasus-ispa-akibat-karhutla-mayoritas-balita-terdampak-107813
86 https://kumparan.com/kumparannews/puan-infrastruktur-kesehatan-di-kalteng-harus-diperkuat-tangani-dampak-karhutla-28RyZspsgNi/2 diakses pada 30 Oktober 2026.

Di tengah keterbatasan layanan kesehatan, masyarakat kembali harus menanggung beban dan biaya untuk memperoleh pengobatan, menambah beban kerja perawatan, perempuan juga harus merawat anggota keluarga yang sakit, merawat anak bahkan harus mendampingi anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, membersihkan rumah lebih sering dari biasanya karena tertutup debu, atau melakukan pekerjaan domestik lain yang tentunya lebih berat dari biasanya. Pada saat yang sama perempuan tetap harus melakukan pekerjaan diluar rumah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan ia dan keluarganya. Sementara akar persoalan berupa kerusakan lingkungan dan lemahnya pencegahan serta penanganan karhutla belum terselesaikan secara serius oleh negara.

Kerentanan kesehatan reproduksi perempuan juga semakin meningkat, karena keterbatasan akses terhadap air bersih yang sangat dibutuhkan terutama pada periode menstruasi dan juga nifas, jika kebutuhan terhadap air bersih tidak terpenuhi maka akan meningkatkan kerentanan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Karhutla juga menimbulkan gangguan psikologis bagi perempuan, seperti ketakutan, kecemasan, gangguan tidur, trauma, serta kehilangan rasa aman akibat ancaman kebakaran rumah atau lahan yang mereka miliki, kehilangan tempat tinggal, dan hilangnya sumber penghidupan.[87] Kondisi tersebut semakin berat ketika perempuan harus menghadapi ketidakpastian, meningkatnya beban perawatan keluarga, serta tekanan dalam rumah tangga. Situasi psikologis perempuan juga dapat semakin diperparah dengan muncul atau meningkatnya gangguan dari hewan di sekitar tempat tinggal terutama ketika perempuan harus tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kondisi lingkungan yang tidak aman.

87 Sumber data konsolidasi 12 Komunitas SP pada Oktober 2026.

BENCANA EKOLOGI MANIFESTASI DARI KEKUASAAN PATRIARKI

Bencana ekologis di Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fenomena alam atau akibat perubahan iklim. Risiko dan dampaknya juga diakibatkan oleh pembangunan patriarki, ketimpangan tata kelola sumber daya alam, kebijakan tata ruang, ketimpangan penguasaan tanah, serta relasi kuasa yang menentukan siapa yang berhak mengendalikan ruang hidup dan mengambil keputusan atas sumber daya alam. Hujan ekstrem, misalnya, dapat menjadi pemicu banjir, tetapi tingkat kerusakan yang ditimbulkan turut dipengaruhi oleh kondisi daerah aliran sungai, tutupan hutan, alih fungsi lahan, tata ruang, dan perlindungan terhadap ekosistem.

ketimpangan tersebut berkaitan dengan tata kuasa patriarki yang menempatkan penguasaan atas tanah, sumber daya alam, produksi ekonomi, dan pengambilan keputusan publik pada aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, sementara pengetahuan serta kepentingan perempuan kerap dipinggirkan. Pembangunan yang mengutamakan investasi dan ekstraksi sumber daya alam dapat mengabaikan keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat atas ruang hidupnya. Pada saat yang sama, kerja reproduktif dan perawatan yang sebagian besar dibebankan kepada perempuan sering tidak diperhitungkan dalam biaya pembangunan. Ketika hutan rusak, air tercemar, lahan pertanian kehilangan produktivitas, atau pesisir terdegradasi, kerugiannya tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Perempuan harus menghadapi semakin sulitnya memperoleh air dan pangan, hilangnya sumber penghidupan, meningkatnya kebutuhan merawat anggota keluarga, serta risiko kesehatan dan kekerasan. Dengan demikian, bencana ekologis memperlihatkan bagaimana keuntungan ekonomi dapat terkonsentrasi pada pihak yang berkuasa, sementara biaya sosial dan ekologisnya dialihkan kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki akses dan kontrol paling terbatas atas sumber daya.

BNPB mencatat bahwa hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Data tersebut menunjukkan bahwa risiko ekologis bukan persoalan abstrak, melainkan persoalan nyata yang berulang dan membutuhkan pencegahan struktural[88]

Besarnya persoalan ini terlihat dari data deforestasi Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat deforestasi netto pada 2024 mencapai sekitar 175.400 hektare, yang merupakan hasil pengurangan deforestasi bruto sekitar 216.200 hektare dengan hasil deforestasi sekitar 40.800 hektare.[89] Sementara itu, pemantauan Auriga Nusantara melalui Status Deforestasi Indonesia 2025 memperkirakan deforestasi pada 2025 mencapai 433.751 hektare, meningkat sekitar 66% dibandingkan angka 2024 versi pemantauan mereka. Keduanya menunjukkan bahwa kehilangan tutupan

88 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), "Kepala BNPB Hadiri Rakor Penanganan Karhutla, Pemerintah Perkuat Operasi Darat Hadapi Puncak Risiko Agustus–September," 10 Agustus 2026.
89 Kementerian Kehutanan. (2025). Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024. https://www.kehutanan.go.id/pers/article-10?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

hutan tetap menjadi persoalan serius yang memerlukan pengawasan, transparansi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan ruang.

Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25–27 November 2025 memperlihatkan bagaimana krisis iklim berinteraksi dengan kerusakan ekosistem dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Curah hujan ekstrem menjadi pemicu langsung bencana, tetapi besarnya risiko dan kerusakan juga berkaitan dengan kondisi tutupan hutan, perubahan penggunaan lahan, dan kemampuan ekosistem menyerap serta mengalirkan air. Kementerian Kehutanan menyebut curah hujan pada periode tersebut mencapai lebih dari 150 milimeter per hari dan menjelaskan bahwa perubahan tutupan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan memperbesar sedimentasi serta mengurangi kapasitas sungai menampung aliran air.[90]

Menurut catatan WALHI yang dipublikasikan pada 1 Desember 2025, sekitar 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami deforestasi selama 2016–2025, yang oleh WALHI dikaitkan dengan aktivitas 631 perusahaan pemegang berbagai izin, termasuk pertambangan, perkebunan sawit, kehutanan, panas bumi, serta pembangkit listrik tenaga air. WALHI juga mencatat bahwa Ekosistem Batang Toru di Sumatera Utara kehilangan sekitar 72.938 hektare hutan selama 2016–2024, yang dikaitkan dengan aktivitas 18 perusahaan.[91] Dalam konteks bencana November 2025, Kementerian Kehutanan juga melaporkan perubahan tutupan lahan hutan di wilayah Sumatera Utara seluas 9.424 hektare selama 2019–2024, dengan 36,4% terjadi di dalam kawasan hutan dan 63,6% di luar kawasan hutan. Temuan awal forensik kayu gelondongan yang terbawa banjir di Garoga, Batang Toru, menunjukkan pentingnya penyelidikan terhadap asal-usul kayu, aktivitas penebangan, dan kondisi kawasan hulu. Karena itu, penanganan bencana harus disertai penyelidikan terbuka atas perubahan tutupan lahan, perizinan, aktivitas pertambangan dan kehutanan, serta kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan.

persoalan tersebut menunjukkan bahwa keputusan tentang hutan, pertambangan, dan pemanfaatan ruang bukanlah keputusan teknis yang netral. Kebijakan perizinan dan pembangunan menentukan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari penguasaan sumber daya alam, sekaligus siapa yang menghadapi risiko ketika ekosistem kehilangan fungsi ekologisnya. Ketika kawasan hulu mengalami kerusakan, masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS dapat menghadapi banjir, kehilangan rumah dan lahan produktif, rusaknya kebun serta sawah, dan terputusnya akses terhadap sumber air maupun layanan publik. Perempuan petani, perempuan masyarakat adat, dan perempuan yang bergantung pada sumber daya lokal dapat kehilangan penghasilan dan sumber pangan, sementara pekerjaan mencari air, memenuhi kebutuhan keluarga, merawat anggota keluarga yang sakit, serta

90 Kementerian Kehutanan. (2025). Banjir Melanda Aceh–Sumut, Kementerian Kehutanan Siapkan Solusi Pemulihan dan Penguatan DAS. https://www.kehutanan.go.id/pers/banjir-melanda-aceh-sumut-kementerian-kehutanan-siapkan-solusi-pemulihan-dan-penguatan-das

91 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025). Legalisasi bencana ekologis di Sumatera dan tuntutan tanggung jawab negara serta korporasi. https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi

memulihkan kehidupan sehari-hari semakin berat. Dampak ini tidak selalu tercatat dalam penghitungan kerusakan fisik maupun kerugian ekonomi pascabencana.

Ketimpangan kekuasaan semakin terlihat ketika masyarakat harus menanggung kerugian dan biaya pemulihan, sedangkan proses pengambilan keputusan mengenai izin, pemanfaatan kawasan hutan, dan aktivitas ekstraktif berlangsung tanpa partisipasi bermakna mereka. Dalam siaran persnya, WALHI menuntut pemerintah mengevaluasi izin usaha di ekosistem penting, menegakkan hukum, dan meminta korporasi yang terbukti bertanggung jawab untuk ikut membiayai pemulihan lingkungan. Tuntutan ini relevan untuk memastikan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi, bantuan darurat, dan pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga menjawab persoalan yang meningkatkan risiko bencana. Evaluasi izin harus dilakukan secara transparan, berdasarkan bukti, serta disertai pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat terdampak.

Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 berdampak luas terhadap 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Per 26 Oktober 2026, pemerintah melaporkan bahwa lebih dari dua juta warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah atau menempati tempat tinggal lain, dan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.[92] Namun, berakhirnya pengungsian di tenda tidak otomatis berarti seluruh warga telah memperoleh hunian yang layak, aman, dan permanen, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap pemulihan psikososial dan pemulihan ekonomi masyarakat khususnya perempuan.

Pengabaian tanggung jawab negara juga terlihat pada Bencana galodo atau banjir bandang yang melanda wilayah Lambung Bukit dan Batu Busuk sumatera barat. Bencana ini tidak hanya menghancurkan rumah, jalan, jembatan, dan lahan pertanian warga. Bencana ini juga telah meruntuhkan sumber penghidupan masyarakat, memutus akses terhadap pendidikan dan aktivitas ekonomi, serta memperbesar beban perempuan dalam mempertahankan kehidupan keluarga. Di tengah kerusakan yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat masih menunggu realisasi janji pemerintah, sementara perempuan harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sumber pendapatan yang semakin terbatas.

92 Rassat, F. S. (2026). Mendagri: Pemulihan infrastruktur pascabencana catatkan progres. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/5813131/mendagri-pemulihan-infrastruktur-pascabencana-catatkan-progres



Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tindak lanjut komitmen pemerintah dan pihak-pihak yang sebelumnya menjanjikan bantuan. Pengalaman serupa dialami kelompok tani yang kehilangan lahan pertanian akibat bencana. Menurut Elvi, salah satu perempuan korban galodo (banjir bandang), lahan persawahan kelompok tani telah didata oleh Dinas Pertanian Sumatera Barat, dan warga diminta membuka rekening untuk menerima ganti rugi. Pendataan tersebut sempat menumbuhkan harapan bahwa kerugian mereka akan dipulihkan. Namun, bantuan yang diterima tidak sesuai dengan harapan yang dibangun melalui proses pendataan.

Elvi menceritakan bahwa untuk lahan seluas dua hektar, warga memperoleh informasi mengenai bantuan senilai Rp4 juta.[93] dan masyarakat diminta membuka rekening untuk realisasi bantuan. Akan tetapi, bantuan yang diberikan disebut berupa bibit kelapa dan 50 pohon manggis. sedangkan Rp 4 juta yang dijanjikan untuk pengganti kerugian lahan yang hilang akibat galodo tidak kunjung diberikan. Pendataan terhadap isi kebun yang ada di lahan terdampak oleh dinas pertanian dengan rencana ulang pemanfaatannya tidak menghasilkan pemulihan sebagaimana yang diharapkan. Kebanyakan warga hanya menerima dan malas mempertanyakan situasi yang terjadi.

Bagi warga yang kehilangan lahan pertanian, persoalannya bukan sekadar berkurangnya aset. Lahan merupakan sumber penghidupan keluarga, penyedia pangan, dan penopang ekonomi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ketika lahan hilang akibat bencana, pemulihan membutuhkan lebih dari sekadar pemberian bibit. Dibutuhkan kejelasan mengenai bentuk kompensasi, dukungan untuk mengembalikan produktivitas, serta jaminan agar keluarga dapat kembali memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pendataan dan janji bantuan dapat menciptakan harapan, tetapi tanpa pelaksanaan yang transparan dan sesuai kebutuhan, justru memperpanjang ketidakpastian masyarakat. Bagi perempuan yang berada di tengah tekanan psikologis akibat kehilangan sumber penghidupan, ketidakpastian tersebut menambah beban yang harus mereka tanggung.

93 Catatan hasil wawancara perempuan terdampak bencana galodo di Lambung Bukit dan Batu Busuk Sumatera Barat. Kegiatan dilakukan pada 28 September 2026, di desa Lambung bukit.

Bagi masyarakat Lambung Bukit, salah satu kebutuhan paling mendesak setelah bencana adalah pembangunan kembali jalan dan jembatan. Infrastruktur tersebut bukan hanya sarana transportasi, melainkan penghubung antara rumah, tempat kerja, sekolah, pasar, dan berbagai aktivitas sosial masyarakat. Ketika jalan dan jembatan terputus, kehidupan sehari-hari warga ikut terhambat. Dampak ini dirasakan langsung oleh perempuan yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas perdagangan kecil. Nora, seorang perempuan penjual kue, menceritakan kesulitannya membawa dagangan dari Lambung Bukit menuju kawasan Kapalo Koto setelah akses jembatan terputus. Sebelum bencana, ia dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp200.000. Setelah akses terputus, pendapatannya turun drastis menjadi sekitar Rp30.000.[94]





(Keterangan foto: Seorang ibu menyeberangi sungai dengan memanjat jembatan irigasi yang terputus akibat banjir bandang. ***Sumber***: Dokumentasi Solidaritas Perempuan.

Penurunan pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi perempuan. Ketika akses distribusi terganggu, perempuan kehilangan kesempatan untuk menjual dagangan, menjangkau pembeli, dan mempertahankan pendapatan keluarga. Bagi pedagang kecil, penurunan penghasilan seperti ini dapat langsung mempengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pengalaman serupa dialami Marnis, perempuan yang berjualan bubur dan bakwan di Lambung Bukit. Ia menyampaikan bahwa pendapatannya kini hanya sekitar Rp50.000 per hari. Dengan penghasilan yang terbatas dan kebutuhan keluarga yang tetap berjalan, ruang perempuan untuk bertahan secara ekonomi semakin sempit.

94 Wawancara langsung solidaritas perempuan kepada korban galodo Sumatera Barat

Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa pemulihan infrastruktur memiliki dimensi keadilan gender. Jalan dan jembatan yang tidak kunjung diperbaiki bukan hanya menghambat mobilitas warga secara umum, tetapi juga memperbesar hambatan ekonomi yang dihadapi perempuan, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan akses langsung kepada konsumen.

Berdasarkan hasil asesmen Solidaritas Perempuan, Bencana galodo turut mengubah pembagian kerja di dalam keluarga. Sebelum bencana, sejumlah laki-laki bekerja sebagai buruh tambang galian C, mengumpulkan pasir dan kerikil untuk dijual. Namun, setelah bencana, pekerjaan tersebut semakin sulit dilakukan karena perubahan kondisi lingkungan dan terganggunya akses. Dalam situasi ketika laki-laki kehilangan atau tidak memperoleh pekerjaan, perempuan mengambil alih peran untuk mempertahankan pendapatan keluarga. Mereka bekerja sebagai pengemudi ojek, penjual makanan, pekerja rumah tangga, pekerja di rumah makan, pengasuh anak, hingga pekerja di kafe. Perempuan yang sebelumnya juga mengerjakan pekerjaan domestik kini harus mencari penghasilan tambahan di tengah situasi yang belum pulih. Mereka bukan hanya menghadapi kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga harus memastikan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari keluarga tetap terpenuhi.

Desmawati, misalnya, menjadi salah satu perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek untuk mengantar anak-anak ke sekolah dengan jarak tempuh sekitar lima kilometer. Penghasilannya berkisar Rp20.000–Rp50.000 per hari.[95] Pekerjaan tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertahankan penghidupan keluarga selama kurang lebih empat bulan setelah bencana, sebagaimana dicatat dalam wawancara. Di sisi lain, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh laki-laki juga tidak selalu menghasilkan pendapatan yang pasti. Mengumpulkan pasir dan batu selama dua hari belum tentu menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut keterangan yang disampaikan, satu mobil pikap pasir dapat dihargai sekitar Rp110.000, tetapi pendapatan tersebut bergantung pada keberhasilan mengumpulkan material, ketersediaan pembeli, dan kesempatan untuk bekerja. Akibatnya, ketika suami tidak memperoleh penghasilan, istri harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga. Perempuan menjadi penyangga utama kehidupan rumah tangga di tengah ketidakpastian pekerjaan dan minimnya pemulihan ekonomi pascabencana.

Ketika pendapatan keluarga menurun sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi, utang menjadi salah satu cara masyarakat bertahan. Dalam wawancara, disampaikan bahwa banyak keluarga mulai berhutang di warung untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk membiayai sekolah anak. Utang tersebut bukan semata-mata akibat pengelolaan keuangan keluarga, melainkan berkaitan dengan hilangnya sumber pendapatan, terputusnya akses ekonomi, dan belum pulihnya kehidupan masyarakat setelah bencana. Ketika pendapatan tidak lagi cukup untuk

95 Tutur perempuan korban bencana galodo dalam diskusi kampung pada tanggal 28 September 2026, di desa Lambung bukit.

membeli kebutuhan pokok, keluarga harus mencari cara agar kehidupan tetap berjalan.

Ermidawati juga menyampaikan bahwa Dana Tunggu Hunian (DTH) dijanjikan selama enam bulan sebesar Rp600.000 per bulan, tetapi menurut keterangannya hanya diterima selama tiga bulan. Jatah hidup sebesar Rp15.000 per orang per hari juga hanya diberikan selama tiga bulan.[96] Berakhirnya bantuan sebelum kehidupan pulih memaksa keluarga memenuhi kebutuhan sendiri di tengah pendapatan yang belum stabil. Perempuan menanggung beban tambahan untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga melalui pekerjaan informal, penghematan, atau utang. Kondisi ini menegaskan pentingnya transparansi dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan nyata warga terdampak.

Bencana juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pendidikan anak, termasuk di PAUD Melati 2,[97] Lambung Bukit, yang dipimpin Yendrawati. Terbatasnya informasi wawancara belum memungkinkan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi sekolah tersebut. Namun, kerusakan infrastruktur, hambatan transportasi, dan penurunan pendapatan keluarga dapat mengganggu akses pendidikan. Perempuan kembali menghadapi beban untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, pemulihan harus menjamin keberfungsian fasilitas pendidikan, akses transportasi yang aman, dan dukungan ekonomi bagi keluarga terdampak.

Bagi perempuan akar rumput, situasi ini menciptakan kondisi berlapis. Mereka harus memikirkan cara memperoleh penghasilan, mengatur pengeluaran, membayar utang, memenuhi kebutuhan pangan, serta memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah. Dalam kondisi demikian, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dekat dengan persoalan sehari-hari keluarga sekaligus menanggung tekanan emosional akibat ketidakmampuan memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, banjir Sumatra 2025 perlu menjadi momentum untuk meninjau kebijakan yang mengatur penguasaan hutan, pertambangan, perkebunan, dan tata ruang, terutama di wilayah hulu dan ekosistem yang rentan. Negara harus memastikan bahwa izin usaha tidak mengabaikan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta bahwa pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Pada saat yang sama, perempuan akar rumput harus dilibatkan dalam penilaian kerusakan, penentuan prioritas pemulihan, pengawasan kebijakan, dan pengelolaan ruang hidup pascabencana. Keadilan ekologis tidak cukup diwujudkan dengan memulihkan wilayah yang rusak; keadilan juga mensyaratkan perubahan tata kuasa yang memungkinkan kerusakan terjadi, pengakuan atas hak perempuan dan komunitas, serta pertanggungjawaban pihak yang memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber daya alam.

96 ibid
97 ibid

MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KORPORASI SEBAGAI AKTOR BENCANA EKOLOGI DI INDONESIA

Bencana ekologis di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam atau dampak perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, kekeringan, dan pencemaran juga berkaitan dengan pilihan pembangunan, perubahan tata ruang, penguasaan tanah, pemberian izin usaha, eksploitasi sumber daya alam, serta lemahnya perlindungan terhadap ekosistem dan ruang hidup masyarakat. Hujan ekstrem dan kemarau dapat menjadi pemicu bencana, tetapi tingkat kerusakan dan kerentanan masyarakat turut ditentukan oleh bagaimana negara mengelola lingkungan dan mengatur aktivitas ekonomi.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa deforestasi neto Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 175.400 hektare, yang berasal dari deforestasi bruto 216.200 hektar dikurangi reforestasi 40.800 hektare. Angka ini menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan masih menjadi persoalan penting dalam tata kelola lingkungan Indonesia.[98] Persoalan ini memperlihatkan bahwa bencana ekologis berkaitan dengan relasi kuasa yang menentukan siapa yang menguasai tanah dan sumber daya alam, siapa yang memperoleh keuntungan dari pembangunan, serta siapa yang menanggung kerugian sosial dan ekologisnya. Ketika kebijakan lebih mengutamakan percepatan investasi dan eksploitasi sumber daya dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, risiko bencana berpotensi meningkat, sementara biaya pemulihannya justru dibebankan kepada masyarakat.

Kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam, pemberian konsesi, pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kawasan industri dan pertambangan. Kebijakan tersebut tidak netral karena dapat mengubah akses dan kontrol masyarakat terhadap ruang hidupnya.

Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 mendokumentasikan bahwa konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, dan kekerasan ekologis di wilayah pengorganisasian telah berdampak serius terhadap 6.577 perempuan akar rumput di 161 desa. Solidaritas Perempuan juga mencatat 3.234 konflik agraria yang mencakup lebih dari 7 juta hektare lahan dan berdampak terhadap sekitar 1,8 juta keluarga.[99]

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25–27 November 2025 memperlihatkan besarnya konsekuensi ketika bencana terjadi di wilayah dengan kerentanan ekologis yang serius. Memperlihatkan keterhubungan antara aktivitas usaha, pengelolaan konsesi, pengawasan lingkungan, dan pertanggungjawaban korporasi. Karhutla tidak

98 Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024. Sumber data resmi deforestasi bruto, reforestasi, dan deforestasi neto. Kementerian Kehutanan

99 Solidaritas Perempuan — Catatan Tahunan 2025, Nyala Harapan: Menolak Tunduk. Sumber data 6.577 perempuan akar rumput, 161 desa, 3.234 konflik agraria, lebih dari 7 juta hektare lahan, dan sekitar 1,8 juta keluarga terdampak. Amelia, Icut, A., Sani, F. F., Rina, Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025). Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.

dapat semata-mata dijelaskan sebagai akibat kemarau. Pengelolaan lahan dan gambut, pembukaan vegetasi, kondisi ekosistem, serta kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran juga perlu diperiksa.

Dalam pemantauan Solidaritas Perempuan bahwa Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memanggil delapan perusahaan di Sumatera Utara untuk meminta penjelasan dan memeriksa dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan banjir dan longsor. Perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru. Pemerintah menyebut adanya indikasi awal, antara lain pembukaan lahan di luar batas persetujuan lingkungan, lemahnya pengendalian erosi dan limpasan air, serta sedimentasi di DAS Batang Toru dan Garoga.[100]

Sedangkan WALHI memperkirakan bahwa sepanjang 2016–2025, sekitar 1,4 juta hektare hutan di tiga provinsi tersebut mengalami deforestasi yang dikaitkan dengan aktivitas 631 perusahaan pemegang izin di sektor pertambangan, perkebunan sawit, kehutanan, panas bumi, serta pembangkit listrik tenaga air. Di Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara, WALHI mencatat kehilangan tutupan hutan seluas 72.938 hektare selama 2016–2024, yang dikaitkan dengan aktivitas 18 perusahaan. Selain itu WALHI mencatat bahwa DAS Krueng Trumon di Aceh kehilangan sekitar 43% tutupan hutannya pada periode 2016–2022. Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin kehilangan sekitar 780 hektare tutupan pohon selama 2001–2024, terutama di wilayah hulu yang berperan penting dalam menahan limpasan air. Kerusakan hulu DAS dapat mengurangi kemampuan bentang alam menyerap dan memperlambat aliran air, sehingga hujan ekstrem berpotensi menghasilkan banjir bandang dan longsor.[101]

Temuan WALHI, terdapat 372 entitas perusahaan di delapan provinsi yang areal konsesinya terindikasi terbakar selama 1 Januari–6 September 2026. Sebelumnya, pada Maret 2026, WALHI mengidentifikasi 1.351 titik panas di dalam dan sekitar konsesi 15 perusahaan. Rinciannya ini meliputi 699 titik di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan perkebunan sawit, 285 titik di sekitar konsesi lima pemegang izin kehutanan, dan 367 titik di sekitar konsesi lima perusahaan pertambangan. Di antara perusahaan yang disebut dalam laporan tersebut adalah PT Arara Abadi, PT Wira Karya Sakti, Kaltim Prima Coal, Vale Indonesia, Weda Bay Nickel, dan Kideco Jaya Agung.[102] WALHI juga melaporkan bahwa pada September 2026, dari 372 perusahaan yang diidentifikasi, 223 merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), 148 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan satu pemegang izin pertambangan. Setelah laporan tersebut, pemerintah mengumumkan pencabutan izin

100https://www.kemenlh.go.id/news/detail/panggil-delapan-korporasi-di-sumatera-utara-menteri-lh-tegas-ungkap-dugaan-pelanggaran-penyebab-banjir-batangtoru?utm_source=chatgpt.com

101https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-barat-aceh-dan-sumatera-utara-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi?utm_source=chatgpt.com

102 WALHI — "Karhutla Berulang di Konsesi Korporasi: 1.351 Titik Api Ungkap Kegagalan Penegakan Hukum," 31 Maret 2026. Memuat data titik panas di dalam dan sekitar konsesi perusahaan sawit, kehutanan, dan pertambangan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2026). Karhutla berulang di konsesi korporasi: 1.351 titik api ungkap kegagalan penegakanhukum.https://www.walhi.or.id/karhutla-berulang-di-konsesi-korporasi-1-351-titik-api-ungkap-kegagalan-penegakan-hukum

lima perusahaan pemegang PBPH di Kalimantan. WALHI menyatakan empat di antaranya termasuk dalam daftar perusahaan yang sebelumnya dilaporkan.[103]

Dengan demikian Negara perlu melakukan pemeriksaan lapangan, mengungkap perkembangan penyelidikan, menelusuri tanggung jawab pengelola dan pengendali korporasi, serta memastikan pemulihan lingkungan. Perusahaan yang terbukti melanggar atau lalai harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, termasuk kewajiban pemulihan hak asasi manusia dan Lingkungan.

JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA: PERJUANGAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KORPORASI DAN KEADILAN EKOLOGIS

Salah satu kerangka regulasi yang perlu dikaji secara kritis adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.[104] Regulasi ini mengubah berbagai ketentuan, termasuk dalam sektor lingkungan hidup dan perizinan berusaha. Persoalannya bukan hanya penyederhanaan administrasi atau percepatan investasi, melainkan bagaimana perubahan tata kelola perizinan mempengaruhi perlindungan lingkungan, akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik, dan pemenuhan hak perempuan atas ruang hidup yang aman dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perlu dibaca bukan hanya sebagai regulasi investasi dan pembangunan, tetapi juga sebagai kebijakan yang menentukan siapa yang menguasai ruang hidup, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, dan siapa yang menanggung risiko kerusakan ekologis. Melalui Judicial Review (JR) Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, Solidaritas Perempuan bersama empat pemohon perempuan menguji lima ketentuan terkait tata ruang, partisipasi masyarakat dalam AMDAL, pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan lingkungan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan Bank Tanah.[105]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengatur peran masyarakat, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Namun, keberadaan kerangka hukum belum otomatis menjamin bahwa perempuan memiliki akses setara terhadap informasi dan pengambilan keputusan, termasuk dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).[106]

Namun terdapat persoalan hukum yang melegitimasi keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan usaha adalah perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32

103 WALHI — "Empat Korporasi PBPH yang Dilaporkan WALHI Dicabut Menhut: Masih Ada 144 Lagi," 25 September 2026. Memuat tindak lanjut laporan WALHI dan pencabutan lima izin PBPH oleh pemerintah. WALHI
104 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kementerian Sekretariat Negara. https://jdih.setneg.go.id/
105 Mahkamah Konstitusi RI, Solidaritas Perempuan Perbaiki Uji UU Cipta Kerja Menyoal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memuat ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup, peran masyarakat, pengawasan, dan penegakan hukum. JDIH BPK RI. (n.d.). Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pasal 22 angka 33 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut menghapus frasa *"tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"*, meskipun istilah *"bertanggung jawab mutlak"* tetap dipertahankan. Penghapusan frasa ini menimbulkan persoalan hukum karena menghilangkan prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak dalam perkara kerusakan lingkungan. Padahal, prinsip ini penting agar pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan dalam perkara yang memenuhi persyaratannya tidak bergantung pada pembuktian unsur kesalahan sebagaimana dalam pertanggungjawaban berbasis kesalahan.[107]

Perubahan tersebut berpotensi memperberat posisi masyarakat terdampak ketika menuntut pertanggungjawaban korporasi. Masyarakat yang kehilangan tanah, sumber air, lahan pertanian, atau sumber penghidupan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan sering menghadapi ketimpangan akses terhadap informasi, bukti teknis, keahlian, dan sumber daya hukum dibandingkan perusahaan. Ketika penerapan pertanggungjawaban mutlak tidak ditegaskan secara memadai, beban pembuktian dapat menjadi hambatan tambahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan pemulihan lingkungan dan memberikan kelonggaran kepada korporasi perusak lingkungan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Ketika proses hukum sulit diakses, perempuan dan komunitas terdampak berisiko menanggung kerugian sosial-ekologis dalam waktu panjang, sementara pemulihan dan pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan dibebaskan dari tanggung jawab mutlak.

Disisi lain, ketika kebijakan pembangunan mengabaikan relasi kuasa dan ketimpangan gender, kerusakan lingkungan dapat berkembang menjadi bencana ekologis yang dampaknya tidak terbagi secara setara. Banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan memang dipengaruhi banyak faktor, termasuk curah hujan ekstrem dan perubahan iklim; tetapi perubahan tutupan hutan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), alih fungsi lahan, dan tata kelola ruang dapat memperbesar risiko di wilayah tertentu. Berdasarkan data BNPB yang diberitakan pada Februari 2026, Indonesia mengalami 4.727 kejadian bencana sepanjang 2025, dengan 99,26% dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi. Terdapat 2.009 kejadian banjir, 1.329 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 958 cuaca ekstrem, dan 330 tanah longsor.

Hal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 UU Cipta Kerja mengenai tata ruang berkaitan dengan bagaimana ruang ditetapkan dan dialokasikan bagi pembangunan strategis. Ketika proyek dapat dijalankan tanpa kejelasan alokasi ruang atau pola ruang dalam prinsip kehati-hatian dan daya dukung lingkungan menjadi penting untuk diuji. Perubahan tata ruang bukan sekadar persoalan administratif: keputusan tersebut dapat menentukan hilangnya lahan pertanian, kawasan tangkap nelayan, hutan, sumber air, serta wilayah kelola perempuan adat.

107 Ilham, W. M. (2026). Kesetaraan gender dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/kesetaraan-gender-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-25918 – menjelaskan permohonan Nomor 307/PUU-XXIV/2026 dan pasal-pasal yang diuji.

Jika fungsi ekologis kawasan hulu, pesisir, atau daerah resapan terganggu, risiko banjir, longsor, abrasi, dan hilangnya sumber penghidupan dapat meningkat, bergantung pada kondisi tiap wilayah.[108] Selain itu, Pasal 26 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 22 angka 5 UU Cipta kerja, mengenai partisipasi masyarakat dalam AMDAL menyangkut siapa yang diakui memiliki suara dalam menentukan kelayakan lingkungan suatu proyek. Pembatasan partisipasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung dalam UU cipta kerja telah mengesampingkan perempuan yang mengalami dampak berlapis atau tidak segera terlihat, seperti penurunan kualitas air, berkurangnya hasil tangkapan, hilangnya tanaman pangan, gangguan kesehatan, dan bertambahnya kerja perawatan. Partisipasi yang bermakna tidak cukup diwakili oleh kehadiran formal masyarakat; perempuan harus memiliki akses terhadap informasi, kesempatan menyampaikan pengetahuan lokal, dan pengaruh nyata terhadap keputusan. Ketika pengalaman perempuan tidak masuk dalam AMDAL, risiko ekologis dan sosial dapat luput dari penilaian maupun langkah pencegahan.[109]

Persoalan tersebut relevan untuk ditelaah pada pembangunan Makassar New Port, kawasan pelabuhan NPCT1 di Jakarta Utara, PLTA PT Poso Energy di Sulewana, Bendungan Meninting di Lombok Barat, Bendungan Marga Tiga di Lampung Timur, proyek panas bumi di Poco Leok dan Gunung Rajabasa, konflik Bendungan Bener di Purworejo, serta klaim tanah masyarakat adat To Pekurehua Wanua Watteau di Poso, dapat digunakan untuk menguji dampak pembangunan terhadap ekosistem, penguasaan tanah, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan penghidupan.[110]

Dampak tersebut tidak dirasakan secara setara. Perempuan petani kehilangan lahan dan sumber pangan; perempuan nelayan kehilangan akses terhadap wilayah tangkap dan sumber daya pesisir; perempuan adat kehilangan tanah ulayat serta pengetahuan ekologis dan identitas adat; sementara perempuan miskin kota menghadapi risiko banjir, kehilangan aset, dan meningkatnya biaya hidup. Ketika sumber penghidupan hilang, perempuan juga harus menanggung tambahan kerja perawatan, mencari air dan pangan, serta memulihkan kehidupan keluarga. UN Women memperkirakan bahwa dalam skenario iklim yang lebih buruk, jumlah perempuan dewasa yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai 4,6 juta pada 2030.[111] Inilah salah satu bentuk feminisasi pemiskinan, yakni proses ketika ketimpangan penguasaan sumber daya dan pembagian kerja berbasis gender membuat perempuan menanggung beban ekonomi, sosial, dan ekologis yang lebih besar.

Dengan demikian, JR Solidaritas Perempuan penting dibaca sebagai upaya memperjuangkan keadilan ekologis dan keadilan gender sekaligus. Pengujian pasal tersebut mempertanyakan apakah kebijakan pembangunan telah menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, partisipasi yang bermakna, perlindungan hak

108https://www.mkri.id/berita/solidaritas-perempuan-perbaiki-uji-uu-cipta-kerja-menyoal-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-25721?utm_source=chatgpt.com
109 ibid
110https://en.mkri.id/news/details/2026-08-27/Solidaritas_Perempuan_Questions_Land_Acquisition_for_Public_Interest_under_Job_Creation_Law?utm_source=chatgpt.com
111 https://data.unwomen.org/indonesia?utm_source=chatgpt.com

tenurial, dan pertanggungjawaban yang efektif. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan strategis tidak mengabaikan daya dukung lingkungan; AMDAL mengakui dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan; pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dapat ditegakkan; serta pengadaan tanah dan Bank Tanah melindungi hak tenurial perempuan petani, perempuan nelayan, dan perempuan adat. Selanjutnya Mitigasi bencana pun harus mencakup pemulihan ekosistem, perlindungan sumber penghidupan, akses terhadap air dan pangan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana dan pengungsian.

Inisiatif Kolektif Perempuan dalam merawat dan melestarikan Lingkungan yang adil gender (Adaptasi, Mitigasi Bencana) 12 Komunitas

Di tengah krisis iklim, bencana ekologi, perampasan ruang hidup dan proyek pembangunan ekstraktif yang mengeksplorasi sumber daya alam yang berkontribusi terhadap pemiskinan perempuan. Perempuan khususnya di komunitas SP telah membangun gerakan kolektif untuk memperkuat perjuangan. Gerakan ini dibangun berangkat dari pengetahuan perempuan dan kearifan lokal, hubungan dengan alam dan kerja-kerja perawatan kehidupan. Misalnya pengetahuan mengenai perubahan musim, pemilihan benih, pengolahan tanah, pengelolaan pangan, serta pemeliharaan sumber air diwariskan melalui pengalaman dan praktik di dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini sering kali tidak diakui secara formal menjadi bagian penting dari ketahanan komunitas yang dapat menjadi strategi adaptasi dan mitigasi terhadap krisis iklim dan bencana ekologis.

Salah satu praktik konkret terlihat pada **Kelompok Tani Karisma di Kulon Progo, Yogyakarta**, yang diinisiasi oleh 25 perempuan lintas agama. Kelompok ini mengembangkan pertanian lestari sebagai bentuk perlawanan terhadap mekanisasi pertanian dan krisis iklim. Perempuan mempertahankan benih lokal, antara lain padi hitam cempo, mentik susu, mentik wangi, merah andel, raja lele gepyok, dan sri kuning, serta menanam berbagai umbi dan tanaman pangan lokal. Mereka juga menggunakan pupuk organik yang berasal dari sisa sayuran, buah, dan kotoran hewan. Praktik tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, benih korporasi, dan sistem pertanian yang merusak tanah serta keanekaragaman hayati.[112]

> *"Kami, perempuan Tani Karisma, memilih bertani secara lestari bukan karena ikut tren, tapi karena ini cara kami bertahan hidup. Di tengah mesin-mesin besar dan cuaca yang semakin tidak menentu, tanah dan benih lokal adalah pegangan kami. Pertanian lestari bagi kami adalah bentuk perlawanan agar kami tetap berdaulat atas pangan, alam, dan kehidupan kami sendiri." -* ***Perempuan akar rumput Kelompok Tani Karisma***

112 Ibid., bagian mengenai pengetahuan perempuan tentang musim, benih, tanah dan air serta relasi perempuan dengan alam berbasis perawatan dan keberlanjutan. Catahu-2025



(Perempuan Tani Karisma aktif dalam berbagai diskusi sebagai wadah saling menguatkan, menjaga kritis, dan merawat kolektif (2025). ***Sumber:*** SP Kinasih)

Pertanian lestari tersebut tidak hanya berhenti pada produksi pangan. Perempuan Karisma membangun ruang berbagi pengetahuan dan solidaritas termasuk melalui pertemuan kelompok setelah panen. Sejak tahun 2018-2024 perempuan juga masuk ke ruang-ruang advokasi kebijakan melalui musyawarah desa, forum pertanian dan diskusi di tingkat kabupaten maupun provinsi, perempuan memperjuangkan pengakuan sebagai subjek utama dalam pertanian, perlindungan praktek pertanian lestari, serta kebijakan desa yang berpihak pada perempuan petani, upaya tersebut telah menghasilkan komitmen pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pertanian lestari.

Inisiatif kolektif lainnya sebagai strategi mempertahankan ruang hidup dan menghadapi ancaman proyek pembangunan. Di Poco leok, Nusa Tenggara Timur, Perempuan adat berada di garis depan melalui Aksi Jaga Kampung untuk mempertahankan tanah ulayat, sumber air, pangan, dan keberlanjutan kehidupan perempuan adat dari dari rencana perluasan proyek geothermal. Aksi ini menjadi bentuk pertahanan kolektif perempuan ketika perusahaan dan aparat berupaya memasuki wilayah adat. Meskipun menghadapi intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi, perempuan terus mempertahankan ruang hidup dan memperluas perjuangan melalui pengaduan ke lembaga-lembaga negara dan mekanisme lainnya[113].

Perjuangan tersebut kemudian berkembang menjadi inisiatif kedaulatan pangan berbasis komunitas melalui kebun Kebun Campeseasep yang dikelola oleh perempuan Desa Lungar dengan dukungan JPIC OFM. Kebun tersebut ditanami berbagai pangan lokal, seperti singkong, ubi jalar, kentang, labu, sayuran, cabai, kacang brenebon, dan kemangi. Kebun ini menjadi bagian dari strategi perempuan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mempertahankan solidaritas dan keberlanjutan gerakan ketika menghadapi ancaman terhadap ruang hidup mereka.[114]

113 Ibid., bagian Mitos Proyek Energi Bersih: Aksi Jaga Kampung Perempuan Poco Leok, mengenai pertahanan kolektif perempuan terhadap ancaman perluasan geothermal. Catahu-2025
114 Ibid., mengenai inisiatif Kebun Campeseasep yang dikelola perempuan Desa Lungar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan perlawanan komunitas. Catahu-2025

Selain itu, Perempuan Desa Kuku Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, telah mengembangkan inisiatif kolektif perempuan yang menjadi dasar untuk merawat lingkungan sekaligus memperkuat kedaulatan pangan komunitas, melalui kelompok perempuan Mawongi dan inisiatif feminis ekonomi solidaritas (FES). Perempuan mengembangakan kebun kolektif dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan tanaman pangan lokal seperti padi ladang dan jagung pulut. Kelompok perempuan ini berkembang dari diskusi-diskusi perempuan sejak tahun 2017.[115]

Di Lampung, perempuan Desa Sidodadi membentuk kelompok feminis ekonomi solidaritas (FES) pada tahun 2019 yang berangkat dari situasi petani yang serba ketergantungan pada bibit atau benih hibrida yang dijual di kios-kios. Situasi ini berdampak pada hilangnya pengetahuan perempuan, baik dalam penyediaan benih atau kerja-kerja perawatan atau pemeliharaan tanaman pertanian karena semua bertumpu pada pupuk dan pestisida kimia. Namun keuntungan yang diperoleh perempuan petani tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan karena biaya produksi yang mahal.[116]

Melalui pengembangan kebun kolektif organik, perempuan membangun praktik pertanian yang lebih mandiri dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia, serta mengembangkan beragam jenis tanaman pangan dan sayuran. Praktik ini menjadi bagian penting dari strategi adaptasi krisis iklim karena mendorong keberagaman tanaman, memperkuat ketersediaan pangan di tingkat komunitas, dan membangun sistem produksi pangan yang lebih berkelanjutan. Di tengah ancaman krisis iklim yang dapat mengganggu produktivitas pertanian dan mengancam sumber pangan rumah tangga, kebun kolektif menjadi ruang bagi perempuan untuk mempertahankan akses terhadap pangan, mengembangkan pengetahuan ekologis, serta memperkuat kemampuan komunitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Lebih dari sekadar kegiatan bercocok tanam, praktik pertanian organik ini juga merupakan upaya perempuan untuk merebut kembali kendali atas sistem produksi pangan dari dominasi industri pertanian yang menciptakan ketergantungan terhadap benih komersial dan bahan kimia.

Inisiatif kolektif perempuan ini menunjukkan bahwa adaptasi krisis iklim tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kemampuan masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan melalui teknologi atau program pembangunan yang bersifat teknokratis. Adaptasi harus menyentuh akar persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya, ketergantungan ekonomi, hilangnya pengetahuan perempuan, serta sistem produksi pangan yang dikendalikan oleh kepentingan pasar dan industri. Perempuan bukan sekadar kelompok penerima manfaat program adaptasi, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kapasitas, dan kepemimpinan dalam membangun solusi atas krisis iklim. Melalui kebun kolektif organik, pengolahan hasil pertanian, dan koperasi simpan pinjam, perempuan

115 Solidaritas Perempuan, "Kisah Sukses Kelompok FES," mengenai pengembangan Feminis Ekonomi Solidaritas di Desa Kuku, Kecamatan Pamona Utara, Poso, termasuk kebun kolektif, padi lokal, jagung pulut, dan pengolahan pangan lokal.
116 Solidaritas Perempuan, "Kisah Sukses Kelompok FES," mengenai pengembangan Feminis Ekonomi Solidaritas di Desa Sidodadi, Lampung.

memperlihatkan bahwa adaptasi berbasis komunitas dapat dibangun melalui kemandirian, solidaritas, pengakuan terhadap pengetahuan perempuan, dan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, inisiatif perempuan juga terlihat dalam respons terhadap bencana ekologis. Ketika bencana terjadi di Aceh, perempuan di komunitas bersama solidaritas perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh menjangkau lima desa terdampak bencana untuk mendistribusikan bantuan pangan dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan yang sering terabaikan dalam setiap respons bencana seperti pembalut, mukena, kebutuhan bayi,dan kebutuhan pangan. Inisiatif ini menunjukan bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban bencana, tetapi juga menjadi aktor yang memastikan respons kemanusian yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan pengalaman perempuan.

Ketika bencana terjadi, situasi darurat sering kali tidak netral gender. Perempuan di pengungsian kerap menghadapi keterbatasan ruang aman, sanitasi, air bersih, layanan kesehatan reproduksi, serta risiko kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam mitigasi dan respon bencana bukan hanya persoalan representasi, tetapi menentukan apakah kebijakan dan bantuan benar-benar menjawab kebutuhan kelompok yang terdampak khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Berbagai inisiatif perempuan tersebut memperlihatkan bahwa kolektivitas perempuan merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi krisis ekologis. Praktik-praktik tersebut sebagai bagian dari gerakan politik feminis untuk menyuarakan kepentingannya dan juga mempengaruhi keputusan dan mendorong perubahan kebijakan.

Karena kebijakan adaptasi, mitigasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana perlu mengakui perempuan sebagai subjek pengetahuan, pengambil keputusan dan pelaku perubahan, buka semata-mata sebagai kelompok rentan atau penerima bantuan. Negara perlu memberikan dukungan terhadap inisiatif komunitas perempuan melalui akses terhadap pendanaan,teknologi, informasi, perlindungan hukum, pengakuan atas pengetahuan lokal, serta ruang partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian adaptasi dan mitigasi tidak hanya menjadi proyek yang berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi harus tumbuh dari praktik dan pengetahuan masyarakat yang telah menjaga keberlanjutan lingkungan dari tingkat komunitas.

Keadilan gender dalam kebijakan lingkungan berarti mengakui bahwa perempuan telah lama merawat kehidupan dan ekosistem, sehingga penting untuk memastikan negara melindungi, memperkuat dan memberikan sumber daya kepada inisiatif kolektif perempuan yang telah terbukti menjadi bagian strategi dalam menghadapi krisis iklim dan ekologis.

AGENDA POLITIK FEMINIS PEREMPUAN AKAR RUMPUT DALAM MENGHADAPI BENCANA EKOLOGI

Bencana ekologis merupakan krisis keadilan ekologis dan hak asasi perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari model pembangunan ekstraktif, ketimpangan penguasaan sumber daya alam, serta relasi kuasa patriarki yang meminggirkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan kerusakan wilayah pesisir bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menghilangkan sumber penghidupan, akses pangan dan air bersih, serta memperberat kerja domestik dan perawatan yang selama ini banyak dibebankan kepada perempuan. Ketika ruang hidup rusak atau hilang, perempuan akar rumput menghadapi dampak berlapis, termasuk kehilangan pendapatan, meningkatnya risiko kesehatan, dan kerentanan terhadap kekerasan. BNPB mencatat 1.784 kejadian bencana sepanjang Januari–Juni 2025. Besarnya kejadian tersebut memperlihatkan pentingnya penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pada pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemulihan kehidupan masyarakat secara berkeadilan. Karena itu, bencana harus ditempatkan sebagai persoalan politik dan pemenuhan hak konstitusional, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Dalam situasi bencana, partisipasi bermakna perempuan masih menjadi persoalan mendasar. Perempuan sering kali ditempatkan sebagai penerima bantuan, bukan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, suara, dan kewenangan untuk menentukan kebijakan penanggulangan bencana maupun dalam menentukan pengelolaan dan penguasaan sumberdaya alam. Akses terhadap informasi, ruang pengambilan keputusan, dan mekanisme dalam penyampaian penolakan atau keberatan perlu diperkuat. Padahal, pengetahuan perempuan tentang sumber pangan, air, kondisi lingkungan, kebutuhan komunitas, dan keamanan ruang pengungsian merupakan bagian penting dalam pencegahan risiko maupun pemulihan. Keterbatasan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan telah memperparah dampak kerentanan bagi perempuan saat mengalami bencana dan pasca bencana. UN Women mencatat keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sekitar 21,9% per Februari 2024, data ini memperlihatkan tantangan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan formal. Oleh karena itu, negara harus menjamin keterlibatan perempuan akar rumput sejak pemetaan risiko, penyusunan kebijakan dan anggaran, distribusi bantuan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Partisipasi tersebut harus memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif formal namun harus menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan dan subjek rentan yang mengalami dampak paling berlapis dari kekerasan struktural dan bencana ekologi.

Selain itu, negara harus membangun mekanisme pemulihan bencana yang berkeadilan gender, sekaligus mengevaluasi kebijakan serta proyek pembangunan

dan solusi palsu iklim[117] yang memperbesar risiko bencana.[118] Pemulihan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi harus memastikan terpenuhinya hak perempuan atas tempat tinggal yang aman, pangan, air bersih, layanan kesehatan, sumber penghidupan, dan perlindungan dari kekerasan. Pemulihan juga harus menjawab persoalan struktural yang membuat masyarakat rentan, termasuk kerusakan ekosistem, konflik agraria, alih fungsi lahan, dan pengabaian daya dukung lingkungan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 295 letusan konflik agraria sepanjang 2024 yang mencakup sekitar 1,11 juta hektare dan berdampak pada 67.436 keluarga. Data ini bukan data khusus bencana, tetapi memperlihatkan besarnya persoalan penguasaan ruang hidup yang perlu diperhitungkan dalam upaya mengurangi kerentanan masyarakat. Negara harus mengevaluasi dan menghentikan kegiatan atau proyek yang terbukti melanggar hukum serta memperbesar risiko ekologis, menindak pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, dan memastikan pemulihan tidak menjadi jalan bagi perampasan ruang hidup baru. Dalam kerangka ini, perjuangan kelompok rentan untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Keadilan Iklim perlu diakui dan didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak, partisipasi bermakna, serta pertanggungjawaban negara dan korporasi atas krisis iklim.[119]

Perlindungan ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan juga harus menjadi bagian utama dari agenda politik tersebut. Ruang hidup perempuan tidak terbatas pada rumah, tetapi mencakup tanah pertanian, kebun, hutan, laut, pesisir, sumber air, wilayah adat, dan sumber daya alam yang menopang kehidupan serta keberlanjutan komunitas. Ketika bencana merusak atau menghilangkan sumber daya tersebut, perempuan kehilangan bukan hanya pendapatan, melainkan juga akses terhadap pangan, kemandirian ekonomi, dan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi. Relokasi yang tidak mempertimbangkan akses terhadap lahan produktif, wilayah tangkap, pasar, layanan publik, dan jaringan sosial dapat memperpanjang kemiskinan serta ketidakadilan. Karena itu, negara wajib menjamin perlindungan hak perempuan atas ruang hidup, menghentikan perampasan ruang hidup dan kriminalisasi terhadap perempuan yang memperjuangkan hak lingkungannya, serta memastikan bahwa setiap kebijakan relokasi dan pemulihan disusun melalui partisipasi bermakna masyarakat terdampak.

Pada saat yang sama, perempuan dan komunitas lokal harus diakui sebagai penggerak perubahan yang memiliki pengetahuan dan inisiatif dalam menjaga keberlanjutan ekologis serta menghadapi bencana dan krisis iklim.[120] Berbagai upaya komunitas dalam melindungi hutan dan sumber air, menjaga benih lokal, mengembangkan pertanian ekologis, mempertahankan kedaulatan pangan, dan memulihkan ekosistem pesisir perlu memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan yang mudah diakses, dan perlindungan ruang kelola. Dukungan tersebut harus

117 Solidaritas Perempuan. (2026). Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan Dari Santa Marta: Suara Perempuan Akar Rumput – Menolak Transisi Energi Palsu- Mendesak Keadilan Energi Berbasis Feminisme dan Kedaulatan Rakyat. Solidaritas Perempuan. https://solidaritasperempuan.org/pernyataan-sikap-solidaritas-perempuan-dari-santa-marta-suara-perempuan-akar-rumput-menolak-transisi-energi-palsu-mendesak-keadilan-energi-berbasis-feminisme-dan-kedaulatan-rakyat/
118 Saputra, E. Y. (2026). Kerugian Konstitusional Perempuan Akibat PSN. Seperti Apa?. Tempo. https://www.tempo.co/politik/solidaritas-perempuan-undang-undang-cipta-kerja-2281862
119 Solidaritas Perempuan. (2025). ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim. Solidaritas Perempuan. https://solidaritasperempuan.org/aruki-konsolidasikan-gerakan-menuju-ruu-keadilan-iklim/
120 Solidaritas Perempuan. (n.d.). Feminist Economy Solidarity (FES). Solidaritas Perempuan. https://solidaritasperempuan.org/feminist-economy-solidarity-fes/

memperkuat otonomi perempuan dan komunitas, bukan mengambil alih inisiatif mereka atau membebankan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Pengalaman dan pengetahuan perempuan akar rumput harus menjadi dasar dalam perencanaan mitigasi, adaptasi, dan pemulihan bencana, dengan memastikan bahwa mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kendali atas sumber daya yang dibutuhkan.

Bagi Solidaritas Perempuan, perjuangan menegakkan hak konstitusional perempuan dalam konteks bencana ekologis merupakan perjuangan untuk mengubah relasi kuasa yang menciptakan ketidakadilan. Perempuan akar rumput bukan sekadar korban bencana atau penerima bantuan, melainkan subjek politik yang berhak menentukan arah pembangunan, mempertahankan ruang hidup, dan menuntut pertanggungjawaban negara serta korporasi. Negara tidak boleh menormalisasi bencana atau menyerahkan beban penanganan krisis kepada perempuan dan komunitas, tetapi wajib mencegah risiko, melindungi hak, menjamin pemulihan yang berkeadilan, serta menghentikan kebijakan yang memperbesar kerusakan ekologis dan memperdalam ketimpangan.

REKOMENDASI

Perempuan akar rumput bukan kelompok rentan yang pasif. Perempuan adalah subjek politik dalam penanggulangan bencana. Perempuan memiliki pengetahuan mengenai air, pangan, benih, hutan, pertanian, kesehatan keluarga, pengelolaan rumah tangga, jaringan sosial dan kebutuhan komunitas. Pengetahuan tersebut sering tidak diakui dalam kebijakan formal, padahal sangat menentukan kemampuan masyarakat menghadapi krisis. Karena itu, pendekatan penanggulangan bencana yang hanya menempatkan perempuan sebagai penerima bantuan harus dikritisi. Perempuan harus dilibatkan secara bermakna dalam seluruh tahapan: pencegahan, kesiapsiagaan, respons, pemulihan, relokasi, hingga pengambilan keputusan mengenai masa depan wilayah.

Hasil assesment bencana Solidaritas Perempuan, memotret ketidakadilan tidak berhenti pada saat bencana terjadi, tetapi dapat direproduksi melalui proses pemulihan. Bantuan yang tidak terdata secara gender, huntara yang tidak sesuai kebutuhan ekologis, relokasi yang jauh dari sumber penghidupan, tenda pengungsian yang tidak aman, dan bantuan yang tidak menyediakan alat produksi perempuan dapat menciptakan kemiskinan dan kerentanan baru.

Oleh karena itu, Pemulihan harus dimaknai sebagai pemulihan hak, bukan sekadar pembangunan kembali bangunan dan infrastruktur yang rusak. Bencana ekologis tidak boleh dinormalisasi sebagai kondisi yang harus terus-menerus diadaptasi oleh masyarakat, sementara akar persoalan struktural dan tanggung jawab negara diabaikan. Adaptasi seharusnya menjadi upaya untuk mengurangi risiko dan melindungi kehidupan, bukan menjadi alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kepada masyarakat.

Solidaritas Perempuan mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural yang berkontribusi terhadap meluasnya bencana ekologis dan menimbulkan dampak berlapis bagi perempuan. Berdasarkan hal tersebut, Solidaritas Perempuan menyampaikan catatan kritis dan rekomendasi berikut:

Pertama, memperkuat pengetahuan dan sistem data bencana yang terpilah gender dan inklusif. Data pemerintah di sejumlah wilayah perlu diperbarui dan diperkuat agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat terdampak secara menyeluruh. Data yang tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi berisiko membuat pengalaman serta kebutuhan perempuan tidak terlihat dalam kebijakan. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem data yang mencatat jumlah perempuan terdampak, kehilangan sumber penghidupan, kebutuhan pangan dan air bersih, layanan kesehatan reproduksi, peningkatan beban kerja perawatan, risiko kekerasan berbasis gender, serta kondisi pemulihan. Data tersebut harus menjadi dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana.

Kedua, menjamin perlindungan dan keamanan perempuan serta kelompok rentan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Situasi bencana dan pengungsian dapat memperbesar risiko kekerasan berbasis gender, eksploitasi, serta pelanggaran hak, terutama *ketika* layanan dasar dan mekanisme perlindungan tidak tersedia secara memadai. Pemerintah harus memastikan mekanisme perlindungan yang menyeluruh sejak tahap tanggap darurat hingga pemulihan, termasuk tempat pengungsian yang aman, sanitasi yang layak, layanan kesehatan dan kesehatan

reproduksi, dukungan psikososial, serta mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses. Perlindungan harus disusun berdasarkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, bukan melalui pendekatan seragam yang mengabaikan perbedaan pengalaman dan risiko.

Ketiga, memastikan pemulihan dan relokasi yang berkeadilan gender serta menjamin keberlanjutan ruang hidup. Relokasi tidak boleh semata-mata memindahkan masyarakat ke lokasi yang dinilai aman secara fisik tanpa mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan mereka. Pemerintah harus menjamin akses terhadap tanah, air bersih, pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaringan sosial, ruang budaya, dan keamanan perempuan. Relokasi juga tidak boleh menjadi instrumen yang menghilangkan hak masyarakat atas wilayahnya atau membuka ruang bagi penguasaan baru oleh kepentingan investasi. Karena itu, pemerintah perlu menyusun indikator relokasi yang aman dan berkeadilan gender sebagai instrumen kebijakan, dengan memastikan persetujuan, partisipasi bermakna, serta akses terhadap mekanisme keberatan dan pemulihan hak bagi masyarakat terdampak.

Keempat, memastikan pertanggungjawaban mutlak pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan mendorong penegakan hukum yang efektif. Ketika bencana berkaitan dengan perubahan tata guna lahan, aktivitas perusahaan, investasi, pembangunan infrastruktur, atau lemahnya tata kelola lingkungan, respons negara tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan kepada korban. Pemerintah harus melakukan investigasi yang transparan terhadap penyebab bencana, kebijakan yang berkontribusi terhadap risiko, serta aktor yang bertanggung jawab. Solidaritas Perempuan mendorong penerapan prinsip pencegahan, pertanggungjawaban, pemulihan kerusakan, dan jaminan ketidak berulangan. Perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, termasuk atas pemulihan ekosistem dan kerugian masyarakat terdampak. Tanggung jawab tersebut tidak boleh dialihkan kepada perempuan dan komunitas melalui kewajiban beradaptasi secara terus-menerus terhadap kerusakan yang bukan mereka sebabkan.

Kelima, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran bencana yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Pengelolaan anggaran pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi publik. Alokasi anggaran perlu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terdampak, terutama perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta kelompok lain yang menghadapi hambatan akses terhadap bantuan dan layanan dasar. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan penghidupan, layanan kesehatan, air bersih, pangan, perlindungan dari kekerasan, dukungan kerja perawatan, serta pemulihan ekosistem. Mekanisme pengawasan dan pengaduan publik harus tersedia untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, diskriminasi dalam distribusi bantuan, dan pengabaian terhadap kebutuhan kelompok terdampak.

Keenam, menjamin partisipasi bermakna perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan serta mengevaluasi kebijakan yang memperbesar risiko bencana. Perempuan tidak boleh ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan atau kelompok rentan yang menjadi objek perlindungan. Perempuan masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan pesisir, dan perempuan pembela lingkungan memiliki pengetahuan serta pengalaman penting dalam menjaga

ekosistem dan mempertahankan ruang hidup. Karena itu, pemerintah harus menjamin keterlibatan mereka secara bermakna dalam identifikasi risiko, penyusunan kebijakan, penentuan prioritas anggaran, relokasi, pemulihan, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan. Partisipasi tersebut harus disertai akses terhadap informasi, kewenangan mempengaruhi keputusan, dan mekanisme keberatan yang efektif.

Ketujuh, mengakui dan mendukung inisiatif perempuan dan komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan ekologis serta menghadapi krisis iklim. Negara harus mengakui perempuan dan komunitas lokal sebagai subjek pengetahuan dan penggerak perubahan, bukan sekadar kelompok terdampak. Inisiatif seperti perlindungan hutan dan sumber air, pertanian agroekologi feminis, kedaulatan pangan, serta pemulihan pesisir, serta kedaulatan energi harus didukung melalui pendanaan, perlindungan ruang hidup, dan pengakuan atas pengetahuan lokal. Dukungan ini harus memperkuat otonomi perempuan dan komunitas, bukan mengambil alih atau membebankan tanggung jawab negara kepada mereka. Negara juga harus merekognisi dan mendukung perjuangan kelompok rentan untuk menghadirkan UU Keadilan Iklim yang menjamin keadilan ekologis, perlindungan hak, partisipasi bermakna, serta tanggung jawab negara dan korporasi atas krisis iklim.

Kedelapan, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan, tata ruang, perizinan, dan investasi yang berpotensi memperbesar kerusakan ekologis serta kerentanan masyarakat. Evaluasi tersebut harus mencakup pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan peninjauan ketentuan turunannya yang dinilai melemahkan perlindungan lingkungan, hak masyarakat atas ruang hidup, serta partisipasi publik. Langkah ini perlu diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang menjamin perlindungan ekologis, keadilan gender, hak masyarakat, dan pertanggungjawaban korporasi.

Kesembilan, membangun sistem Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS) adalah serangkaian mekanisme untuk mendeteksi potensi ancaman bencana, menganalisis risiko, menyampaikan informasi peringatan kepada masyarakat, dan memastikan adanya tindakan dini untuk mengurangi risiko serta menyelamatkan jiwa.

Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa penanggulangan bencana ekologis harus bergerak melampaui pendekatan darurat dan adaptasi individual menuju perubahan struktural. Negara tidak boleh lepas tangan dengan menyerahkan beban penanganan dan pemulihan kepada masyarakat, terutama perempuan yang selama ini menanggung dampak berlapis dari kerusakan ekologis. Pemulihan yang berkeadilan harus mampu memulihkan hak, memperbaiki kerusakan ekologis, memastikan pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan, serta mengubah relasi kuasa yang selama ini meminggirkan perempuan dalam pengelolaan ruang hidup. Adaptasi tidak boleh menjadi normalisasi bencana, dan pemulihan tidak boleh menjadi jalan untuk mereproduksi ketidakadilan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Adzani, B. G. (2025). *Krisis air tanah di Yogyakarta: Bahaya di balik sumur bor dan hotel-hotel baru*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/bangkitgemmaadzani6789/682ec13cc925c41c223ace45

Akbar, A. (2026). *Gubernur NTB ungkap dugaan sementara penyebab kebakaran Kampung Adat Sade*. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8631665/gubernur-ntb-ungkap-dugaan-sementara-penyebab-kebakaran-kampung-adat-sade

Amalia, F. (2026). *Karhutla di Poso Hanguskan 100 Hektare Lahan, Polisi Sisir Kawasan Lembah Napu*. Tribun News. https://palu.tribunnews.com/sulteng/195817/karhutla-di-poso-hanguskan-100-hektare-lahan-polisi-sisir-kawasan-lembah-napu

Amelia, Icut, A., Sani, F. F., Rina, Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). *Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025)*. Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.

Ariana, N. (2026). *Palembang dilanda 17 banjir berulang hingga April 2026*. RRI.co.id. https://rri.co.id/palembang/regional/2358016/palembang-dilanda-17-banjir-berulang-hingga-april-2026

Ayu, S. R. (2026). *Kualitas Udara Palu Memburuk, PM 2,5 Tembus 206 akibat Kepungan Asap Karhutla.* Kompas.com. https://www.kompas.id/artikel/kualitas-udara-palu-memburuk-pm25-tembus-206-akibat-kepungan-asap-karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026, August 18). *BNPB siapkan dukungan perbaikan rumah warga terdampak gempabumi M 7,7 Flores*. BNPB. https://bnpb.go.id/index.php/berita/bnpb-siapkan-dukungan-perbaikan-rumah-warga-terdampak-gempabumi-m-77-flores

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *BNPB Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Logpal bagi TRC PB di Wilayah Timur*. https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-tingkatkan-kapasitas-pengelolaan-logpal-bagi-trc-pb-di-wilayah-timur

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Geoportal Data Bencana Indonesia: Banjir dan longsor Sumatera 2025* [Peta interaktif]. BNPB. https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). *(Update) Gempa Sulawesi Tengah, 6.458 Jiwa Terdampak*. https://www.bnpb.go.id/berita/update-gempa-sulawesi-tengah-6458-jiwa-terdampak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (n.d.). *Bencana Alam Banjir Bandang Melanda Kabupaten Sumbawa*. https://bpbd.ntbprov.go.id/post/bencana-alam-banjir-bandang-melanda-kabupaten-sumbawa

Badan Pusat Statistik. (2025). *Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen), 2024*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY3IzI%3D/sumbangan-pendapatan-perempuan.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026). *Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2026*. https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTU2IzI=/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html

Benua Indonesia. (2024). *Cerita perempuan terdampak proyek hilirisasi nikel di Morowali*. Benua Indonesia. https://benua.id/cerita-perempuan-terdampak-proyek-hilirisasi-nikel-di-morowali/

CNBC Indonesia. (2026). *BMKG ungkap daftar wilayah RI dikepung asap karhutla 15 Oktober 2026*. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20261015144828-37-776500/bmkg-ungkap-daftar-wilayah-ri-dikepung-asap-karhutla-15-oktober-2026

Evandio, A. (2026). *BNPB: Karhutla di Kalimantan hingga 513,89 hektare*. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20261013/15/2012121/bnpb-karhutla-di-kalimantan-hingga-51389-hektare

Fajar, J. (2017). *Perempuan Pesisir Perkotaan Rentan Terdampak Perubahan Iklim*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2017/12/19/perempuan-pesisir-perkotaan-rentan-terdampak-perubahan-iklim/

Geopark Jogja. (n.d.). *Telisik Bhumi Jogja #1: Sumbu imaginer tak lagi imaginer*. https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/news/telisik-bhumi-jogja-1-sumbu-imaginer-tak-lagi-imaginer

Huda, K. (2026, October 22). *ISPA di 7 provinsi terimbas karhutla tercatat 333.470 kasus*. Tirto.id. https://tirto.id/ispa-di-7-provinsi-terimbas-karhutla-tercatat-333470-kasus-hEa4

Husna, R. (2026). *Karhutla di Poso menjalar ke permukiman, dua rumah dan 15 hektare lahan terbakar*. AFU.id. https://afu.id/nusantara/karhutla-di-poso-menjalar-ke-permukiman-dua-rumah-dan-15-hektare-lahan-terbakar

Ilham, W. M. (2026). *Kesetaraan gender dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/kesetaraan-gender-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-25918

Ilham, W. M. (2026). *Solidaritas Perempuan perbaiki uji UU Cipta Kerja menyoal pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/solidaritas-perempuan-perbaiki-uji-uu-cipta-kerja-menyoal-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-25721

Indonesiago.id. (2026). *19.169 unit huntara sudah dibangun untuk warga terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat per 6 Mei 2026*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DYPCmOnEzdv/

Indriawati, T. (2026). *Way Kambas kebakaran, bagaimana nasib gajah dan siapa yang diduga membakar?*. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/08/22/185654678/way-kambas-kebakaran-bagaimana-nasib-gajah-dan-siapa-yang-diduga-membakar

Ini Lampung. (2026). *Pemprov Lampung gelar rakor siaga karhutla: Undang 6 perusahaan besar*. https://www.inilampung.com/2026/08/pemprov-lampung-gelar-rakor-siaga.html

JDIH BPK RI. (n.d.). *Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

Kamarudin. (2019). *Lingkungan Rusak Picu Bencana di Sulawesi Tenggara*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu-bencana-di-sulawesi-tenggara/

Karama.id. (2026). *Polres Morowali Utara Tetapkan Tersangka Karhutla, 15 Hektare Lahan Terbakar*. https://karama.id/hukum-kriminal/polres-morowali-utara-tetapkan-tersangka-karhutla-15-hektare-lahan-terbakar/

Kementerian Kehutanan. (2025). *Banjir Melanda Aceh–Sumut, Kementerian Kehutanan Siapkan Solusi Pemulihan dan Penguatan DAS*. https://www.kehutanan.go.id/pers/banjir-melanda-aceh-sumut-kementerian-kehutanan-siapkan-solusi-pemulihan-dan-penguatan-das

Kementerian Kehutanan. (2025). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024.* https://www.kehutanan.go.id/pers/article-10?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). *Antisipasi dampak karhutla, Kemenkes kerahkan nakes dan logistik ke 7 provinsi*. https://kemkes.go.id/id/antisipasi-dampak-karhutla-kemenkes-kerahkan-nakes-dan-logistik-ke-7-provinsi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Pooling fund bencana untuk ketahanan fiskal*. Kemenkeu https://fiskal.kemenkeu.go.id/parb/2026/09/21/pooling-fund-bencana-untuk-ketahanan-fiskal/

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2026). *Kemenko PMK koordinasikan perlindungan kesehatan dan pendidikan dari dampak karhutla*. https://kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-koordinasikan-perlindungan-kesehatan-dan-pendidikan-dari-dampak-karhutla

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).* Kementerian Sekretariat Negara. https://jdih.setneg.go.id/

KH1. (2018). *Memahami secara utuh potensi dan permasalahan air di Gunungkidul*. Kabarhandayani.com. https://kabarhandayani.com/memahami-secara-utuh-potensi-dan-permasalahan-air-di-gunungkidul/

Laksono, M. Y. (2026). *Anak di Sikka Diduga Jadi Korban Pemerkosaan, 2 Hari Setelah Gempa NTT*. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/09/09/085847578/anak-di-sikka-diduga-jadi-korban-pemerkosaan-2-hari-setelah-gempa-ntt?page=all

Litha, Y. (2021). *Petani Poso Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Pembangunan Bendungan PLTA Poso 1*. Voa Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/petani-poso-kehilangan-mata-pencaharian-akibat-pembangunan-bendungan-plta-poso-1/6260791.html

Ma'arif, K. (2026). *Kekeringan Kulonprogo makin parah, distribusi air bersih tembus 3 juta liter*. Harianjogja.com. https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1275249/kekeringan-kulonprogo-makin-parah-distribusi-air-bersih-tembus-3-juta-liter

Muryanto, B. (2021). '*Tanah Surga' Wadas Dijadikan Tambang: 'Mengapa Pemerintah Menindas Petani?*'. Project Multatuli https://projectmultatuli.org/tanah-surga-wadas-dijadikan-tambang-mengapa-pemerintah-menindas-petani/

Muryanto, B. (2021). *Wadon Wadas Menjaga Alam untuk Anak-Cucu*. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/wadon-wadas-menjaga-alam-untuk-anak-cucu/

Nurfaisal, M. D., Syarkawi, S., & Windra, P. (2026). Pengelolaan Risiko Bencana pada Peristiwa Gempa Bumi dan Tsunami Palu dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Ensiklopedia of Journal, 8*(2). https://doi.org/10.33559/eoj.v8i2.3654

Oktavia, V. (2025). *Kepala Desa di Lampung Timur Tewas Saat Halau Gajah Liar*. Kompas.com. https://www.kompas.id/artikel/kepala-desa-di-lampung-timur-tewas-saat-menghalau-gajah-liar

Paino, C. (2026). *Asap karhutla tak kenal batas administratif, bikin manusia dan satwa liar menderita*. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/09/15/asap-karhutla-tak-kenal-batas-administratif-bikin-manusia-dan-satwa-liar-menderita/

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. (n.d.). *Cek data bencana Aceh Tamiang*. https://cekdatabencana.acehtamiangkab.go.id/

Pemerintah Kota Mataram. (2026). *Jumlah penduduk. PINTAR: Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu*. https://pintar.mataramkota.go.id/detail/98-jumlah-penduduk

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2025). *Statistik perkebunan kelapa sawit Sulawesi Tenggara, tahun 2024.* Sistem Informasi Manajemen Data (SIMDATA). https://simdata.sultraprov.go.id/detail-tabel/tabel_74_328/2024

Permana, A. (2026). *6 gunung berapi di Indonesia erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026*. Spatial Highlights. https://spatialhighlights.com/news/6-gunung-berapi-di-indonesia-erupsi-secara-bersamaan-pada-31-agustus-2026

Putra, R. P. (2026). *Kekeringan Sumbawa Meluas, 42.728 Jiwa Terdampak*. RRI. https://rri.co.id/mataram/regional/2731267/kekeringan-sumbawa-meluas-42728-jiwa-terdampak

Ramadhani, M. Y. (2026). *Penyintas banjir Aceh Tamiang menghuni atap panas, menjaga harta yang tersisa*. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/penyintas-banjir-aceh-tamiang-menghuni-atap-panas-menjaga-harta-yang-tersisa/

Rassat, F. S. (2026). *Mendagri: Pemulihan infrastruktur pascabencana catatkan progres*. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/5813131/mendagri-pemulihan-infrastruktur-pascabencana-catatkan-progres

Riadi, M. (2025). *Etnobotani - Sejarah, Fungsi dan Ruang Lingkup*. Kajianpustaka.com. https://www.kajianpustaka.com/2025/03/etnobotani.html#:~:text=Etnobotani%20adalah%20ilmu%20yang%20mempelajari%20hubungan%20antara%20manusia,atau%20rumah%2C%20pengobatan%2C%20pakaian%2C%20perburuan%20dan%20upacara%20adat.

Ridwan, A. (2025). *45% izin tambang nikel RI berada di Sulawesi Tenggara pada 2024*. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/statistik/691a8d3e87cea/45-izin-tambang-nikel-ri-berada-di-sulawesi-tenggara-pada-2024

Ridwan, A. (2026). *Banjir dan karhutla, bencana terbanyak di Indonesia sepanjang 2025*. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/699fbe3bdc44a/banjir-dan-karhutla-bencana-terbanyak-di-indonesia-sepanjang-2025

Saputra, E. Y. (2026). *Kerugian Konstitusional Perempuan Akibat PSN. Seperti Apa?*. Tempo. https://www.tempo.co/politik/solidaritas-perempuan-undang-undang-cipta-kerja-2281862

Saputra, T. (2026). *Bandar Lampung kembali dikepung banjir, aktivitas warga terganggu*. DetikSumbagsel. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8444473/bandar-lampung-kembali-dikepung-banjir-aktivitas-warga-terganggu

Saputra, T. (2026). *Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas seluas 673 hektare, belum padam.* DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8630380/kebakaran-di-taman-nasional-way-kambas-seluas-673-hektare-belum-padam

Sawal, R. (2023). *Krisis Air Bersih Hantui Jogja, Budayakan Panen Air Hujan*. Mongabay. https://mongabay.co.id/2023/05/23/krisis-air-bersih-hantui-jogja-budayakan-panen-air-hujan/

Setiawan, D. (2023). *Banjir di Wadas Setelah Hutan Ditebas. Project Multatuli*. https://projectmultatuli.org/banjir-di-wadas-setelah-hutan-ditebas/

Shafa, C. A. (2026). *Dari Kalimantan hingga Taman Nasional Way Kambas: Mengapa karhutla terus mengancam hutan Indonesia?*. Jurnalposmedia. https://jurnalposmedia.com/dari-kalimantan-hingga-taman-nasional-way-kambas-mengapa-karhutla-terus-mengancam-hutan-indonesia/

Siaga NTB. (2024). *Bencana Alam Banjir Bandang Melanda Kabupaten Sumbawa*. https://siaga.ntbprov.go.id/info-kebencanaan/bencana-alam-banjir-bandang-melanda-kabupaten-sumbawa

Sidik, B. (2025). *Dalam jangka panjang, investasi pertambangan berpotensi mendegradasi lingkungan dan menurunkan kualitas pembangunan*. Perpustakaan DPR RI. https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/20092

Sinombor, S. H. (2026). *Ruang Hidup Perempuan yang Terenggut Karhutla*. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/ketika-karhutla-merampas-ruang-hidup-perempuan?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic

Solidaritas Perempuan. (2026). *259–297 warga jadi korban ISPA, karhutla berulang di konsesi bukti lemahnya tata kelola dan pengawasan korporasi*. Solidaritas Perempuan https://solidaritasperempuan.org/259-297-warga-jadi-korban-ispa-karhutla-berulang-di-konsesi-bukti-lemahnya-tata-kelola-dan-pengawasan-korporasi/

Solidaritas Perempuan. (2025). *ARUKI Konsolidasikan Gerakan Menuju RUU Keadilan Iklim*. Solidaritas Perempuan. https://solidaritasperempuan.org/aruki-konsolidasikan-gerakan-menuju-ruu-keadilan-iklim/

Solidaritas Perempuan. (n.d.). *Feminist Economy Solidarity (FES)*. Solidaritas Perempuan. https://solidaritasperempuan.org/feminist-economy-solidarity-fes/

Solidaritas Perempuan. (2026). *Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan Dari Santa Marta: Suara Perempuan Akar Rumput – Menolak Transisi Energi Palsu-Mendesak Keadilan Energi Berbasis Feminisme dan Kedaulatan Rakyat*. Solidaritas Perempuan. https://solidaritasperempuan.org/pernyataan-sikap-solidaritas-perempuan-dari-santa-marta-suara-perempuan-akar-rumput-menolak-transisi-energi-palsu-mendesak-keadilan-energi-berbasis-feminisme-dan-kedaulatan-rakyat/

Styawan, W. E. (2026). *Bencana ekologis sebagai krisis capitalogenic: Membaca dari Sumatra*. WALHI. https://www.walhi.or.id/bencana-ekologis-sebagai-krisis-capitalogenic-membaca-dari-sumatra

Suryansyah, E. (2026). *Kebakaran Desa Adat Sade: 75 Rumah-69 Art Shop Hangus, Kerugian Rp 34 M*. Detik.com. https://www.detik.com/bali/nusra/d-8632270/kebakaran-desa-adat-sade-75-rumah-69-art-shop-hangus-kerugian-rp-34-m

Syahbana, P. (2021). *Wanita hilang terseret banjir di Palembang ditemukan tewas*. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-5870326/wanita-hilang-terseret-banjir-di-palembang-ditemukan-tewas

Syahroni, I. (2026). *Wilayah Terdampak Kekeringan di Sumbawa Meluas*. Suara NTB. https://suarantb.com/2026/09/17/wilayah-terdampak-kekeringan-di-sumbawa-meluas-2

Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2*(2), 147–161. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990

Syambudi, I. (2020). *Ironi Sleman: Warga Krisis Air di Tengah Geliat Bisnis Hotel & Mal*. Tirto. https://tirto.id/ironi-sleman-warga-krisis-air-di-tengah-geliat-bisnis-hotel-mal-ep4w

United Nations. (n.d.). *Why women are key to climate action*. https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/women

Vun, J., Widjarnarso, T. H., & Sari, K. (2022). *Melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dalam situasi pascabencana di Sulawesi Tengah, Indonesia. Bank Dunia*. World Bank Blogs https://blogs.worldbank.org/in/eastasiapacific/melindungi-perempuan-dan-anak-anak-perempuan-dalam-situasi-pascabencana-di-sulawesi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2026). *Karhutla berulang di konsesi korporasi: 1.351 titik api ungkap kegagalan penegakan hukum*.

https://www.walhi.or.id/karhutla-berulang-di-konsesi-korporasi-1-351-titik-api-ungkap-kegagalan-penegakan-hukum

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025). *Legalisasi bencana ekologis di Sumatera dan tuntutan tanggung jawab negara serta korporasi*. https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi

WALHI Sulawesi Selatan. (2025). *Bencana terus berulang, WALHI Sulawesi Selatan beberkan penyebabnya*. WALHI Sulawesi Selatan. https://walhisulsel.or.id/4604-bencana-terus-berulang-walhi-sulawesi-selatan-beberkan-penyebabnya/

WALHI Sulawesi Selatan. (2026). *Catahu 2025 region Sulawesi: Ragam perlawanan perempuan Sulawesi melindungi, menjaga hutan hujan*. WALHI Sulawesi Selatan. https://walhisulsel.or.id/4863-catahu-2025-region-sulawesi-ragam-perlawanan-perempuan-sulawesi-melindungi-menjaga-hutan-hujan/

Yayasan Komite Relawan Nusantara. (2026). *Kebakaran Desa Adat Sade Lombok: Ketika Riwayat Suku Sasak Berubah Menjadi Puing*. Relawan Nusantara. https://relawannusantara.org/kebakaran-desa-adat-sade-lombok-tengah/

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2026). *Pidato yang menghapus korban: Prabowo memamerkan capaian, Aceh-Sumatera dihilangkan dari ingatan negara*. YLBHI https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pidato-yang-menghapus-korban-prabowo-memamerkan-capaian-aceh-sumatera-dihilangkan-dari-ingatan-negara/

Yunus, M. (2026). *BNPB: 60 hektare hutan terbakar di Palolo Sigi*. Suara.com. https://sulsel.suara.com/read/2026/10/21/155210/bnpb-60-hektare-hutan-terbakar-di-palolo-sigi

Yunus, S. R. (2026). *Kabut Asap Terus Meluas di Sulawesi, Kendari Terapkan PJJ, Makassar Waspadai ISPA*. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/kabut-asap-terus-meluas-di-sulawesi-kendari-terapkan-pjj-makassar-waspadai-ispa

Zamroni, M. (2025). *Suku Kajang dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana*. Tunas Hijau ID. https://tunashijau.id/suku-kajang-dan-kearifan-lokal-dalam-mitigasi-bencana/



Komunitas Solidaritas Perempuan

SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan), SP Bungoeng Jeumpa (Aceh), SP Flobamoratas (Nusa Tenggara Timur), SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Kinasih (Yogyakarta), SP Palembang (Sumatera Selatan), SP Palu (Sulawesi Tengah), SP Mataram (Nusa Tenggara Barat), SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah), SP Sebay Lampung (Lampung), SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah)